



BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH NOMOR 62 TAHUN 2023

TENTANG

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah perlu disusun kembali Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1282) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1953);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 969);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144);

15. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 04 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip adalah merupakan aturan pembatasan hak akses terhadap fisik Arsip dan informasinya sebagai dasar untuk menentukan keterbukaan dan kerahasiaan Arsip dalam rangka melindungi hak dan kewajiban pencipta arsip dan pengguna dalam pelayanan Arsip.
7. Klasifikasi Keamanan Arsip adalah kategori kerahasiaan informasi Arsip berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkannya terhadap kepentingan dan keamanan negara, masyarakat dan perorangan.
8. Klasifikasi Akses Arsip adalah kategori pembatasan akses terhadap Arsip berdasarkan kewenangan penggunaan Arsip terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu.
9. Pengamanan Arsip adalah program perlindungan fisik dan informasi Arsip berdasarkan klasifikasi keamanannya.

10. Tingkat Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis adalah pengelompokan Arsip dalam tingkatan tertentu berdasarkan dampak yang ditimbulkan apabila informasi yang terdapat di dalamnya diketahui oleh pihak yang tidak berhak.
11. Klasifikasi Keamanan Arsip yang bersifat Terbatas yang selanjutnya disebut Terbatas adalah Arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
12. Klasifikasi Keamanan Arsip yang bersifat Biasa/Terbuka yang selanjutnya disebut Biasa/Terbuka adalah Arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh orang banyak tidak merugikan siapapun.
13. Klasifikasi Keamanan Arsip yang bersifat Rahasia yang selanjutnya disebut Rahasia adalah Arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro dan apabila informasi yang terdapat pada Arsip bersifat sensitif bagi lembaga/organisasi akan menimbulkan kerugian yang serius terhadap *privacy*, keuntungan kompetitif hilangnya kepercayaan serta merusak kemitraan dan reputasi.
14. Klasifikasi Keamanan Arsip yang bersifat Sangat Rahasia yang selanjutnya disebut Sangat Rahasia adalah Arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan bangsa.
15. Informasi Yang Dikecualikan adalah informasi yang apabila dipertimbangkan bahwa membuka informasi publik tersebut dapat menimbulkan konsekuensi sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta setelah dipertimbangkan secara seksama bahwa dengan menutup informasi dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya.
16. Publik adalah warga negara atau badan hukum yang mengajukan permohonan untuk mengakses Arsip Dinamis.
17. Penggunaan Arsip adalah kegiatan penyediaan dan pemanfaatan Arsip bagi kepentingan pengguna Arsip yang berhak.
18. Pengguna Internal adalah setiap orang atau unit kerja yang menggunakan Arsip dan berasal dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.
19. Pengguna Eksternal adalah setiap orang atau badan hukum yang menggunakan Arsip dan berasal dari luar lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.
20. Prosedur Pengaksesan Informasi Publik adalah tata cara atau aturan ketersediaan informasi sesuai kewenangan hukum dan otorisasi legal pemanfaatan informasi publik.

21. Nilai Guna Arsip adalah nilai Arsip yang didasarkan pada kegunaannya bagi kepentingan pengguna Arsip.
22. Nilai Guna Primer adalah nilai Arsip yang didasarkan pada kegunaan Arsip bagi kepentingan lembaga/instansi pencipta Arsip.
23. Nilai Guna Sekunder adalah nilai Arsip yang didasarkan pada kegunaan Arsip bagi kepentingan lembaga/instansi lain dan atau kepentingan umum di luar lembaga/instansi pencipta Arsip dan kegunaannya sebagai bahan bukti pertanggungjawaban.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. sebagai pedoman penggunaan arsip di lingkungan Pemerintah Daerah.
 - b. mendorong unit-unit kerja agar memberkaskan arsip dinamis unit kerjanya secara tertib yang disertai dengan daftar arsip aktifnya.
 - c. memberikan petunjuk kepada unit-unit kerja agar dapat mengamankan dan mematuhi kewenangan akses terhadap klasifikasi informasi arsip yang telah ditetapkan, melindungi fisik dan informasi arsip dari kerusakan dan kehilangan sehingga ketersediaan, keterbacaan, keutuhan, otentisitas dan realibilitas arsip dapat tetap terjaga.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. melindungi arsip dari pengaksesan yang tidak sesuai aturan, sehingga dapat dicegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak yang tidak berhak untuk tujuan dan kepentingan yang tidak sah.
 - b. agar pelayanan penggunaan arsip dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;

BAB II SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

Bagian Kesatu Ruang Lingkup dan Asas Klasifikasi

Pasal 3

Ruang lingkup Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis meliputi:

- a. klasifikasi keamanan Arsip Dinamis memuat informasi:
 1. Biasa/Terbuka;
 2. Terbatas;
 3. Rahasia; dan
 4. Sangat Rahasia.
- b. pengamanan Arsip Dinamis memuat pengamanan:
 1. Ruang simpan;
 2. Penentuan pengelola Arsip; dan
 3. Daftar informasi Terbatas, Rahasia dan Sangat Rahasia.

- c. klasifikasi dan pengaturan akses Arsip Dinamis memuat:
 - 1. Pengguna internal; dan
 - 2. Pengguna eksternal.

Pasal 4

- (1) Asas Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis dilaksanakan dengan menerapkan asas gabungan.
- (2) Asas gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sentralisasi dalam penetapan kebijakan dan desentralisasi dalam pelaksanaan di lapangan.
- (3) Penetapan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyusunan dan penerapan pedoman serta standar operasional prosedur, sumber daya manusia, prasarana, dan sarana.

Bagian Kedua Arsip Dinamis

Pasal 5

- (1) Arsip Dinamis Pemerintah Daerah dapat diakses oleh:
 - a. pengguna internal; dan
 - b. pengguna eksternal.
- (2) Pengguna internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah sebagai berikut:
 - a. Bupati sebagai pimpinan tingkat tertinggi di Daerah, dapat mengakses seluruh Arsip yang berada di bawah kewenangannya;
 - b. Sekretaris Daerah, sebagai pimpinan tingkat tinggi di Daerah, dapat mengakses Arsip di bawah kewenangannya, tetapi tidak dapat mengakses informasi yang terdapat pada pimpinan level tertinggi dan yang satu level dengan unit di luar unit kerjanya, kecuali telah mendapatkan izin dari Bupati;
 - c. Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati, sebagai pimpinan tingkat tinggi di Daerah, dapat mengakses seluruh Arsip sesuai bidangnya setelah mendapatkan izin dari Sekretaris Daerah;
 - d. Kepala Perangkat Daerah dan Pejabat eselon III (Sekretaris / Kepala Bidang / Kepala Bagian / Camat), sebagai pimpinan tingkat menengah, dapat mengakses seluruh Arsip di bawah kewenangannya, namun tidak dapat mengakses informasi yang terdapat pada pimpinan level tertinggi dan yang satu level di luar unit kerjanya, kecuali telah mendapatkan izin dari Sekretaris Daerah;
 - e. Pejabat eselon IV (Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian), Ketua Tim, Pejabat Fungsional, dan Aparatur Sipil Negara (ASN), sebagai pejabat pelaksana, hanya dapat mengakses seluruh Arsip yang berada pada tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya dengan tingkat klasifikasi biasa; dan

- f. pengawas internal mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip pada Pencipta Arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengguna Eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pengawas eksternal, mempunyai hak untuk mengakses seluruh Arsip pada Pencipta Arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. aparat penegak hukum, mempunyai hak untuk mengakses Arsip pada Pencipta Arsip yang terkait dengan perkara atau proses hukum yang sedang ditanganinya dalam rangka melaksanakan fungsi penegakan hukum; dan
 - c. publik, dapat mengakses informasi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dikategorikan terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Sarana Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis

Pasal 6

- (1) Sarana Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Pemerintah Daerah menggunakan sarana perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*).
- (2) Perangkat keras (*hardware*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. sarana penyimpanan Arsip konvensional berupa *filing cabinet*/rak Arsip untuk menyimpan Arsip Biasa/Terbuka dan Terbatas, dan brankas atau lemari besi untuk Arsip Rahasia dan Sangat Rahasia.
 - b. sarana penyimpanan Arsip media baru berupa lemari Arsip sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi.
 - c. prasarana berupa penyimpanan yang sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi.
- (3) Perangkat lunak (*software*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. daftar Arsip aktif, inaktif, terjaga dan vital; dan
 - b. aplikasi pengelolaan Arsip aktif dan inaktif.

Bagian Keempat

Pengelola Arsip

Pasal 7

- (1) Pejabat fungsional Arsiparis dan/atau pengelola Arsip yang bertugas mengelola Arsip merupakan pegawai yang profesional baik dalam substansi kearsipan maupun dalam dedikasi dan integritas.
- (2) Pejabat fungsional Arsiparis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Kepala Perangkat Daerah dapat menetapkan pegawai pada Perangkat Daerah yang dipimpinnya sebagai pengelola Arsip untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan Arsip.
- (4) Pengelola Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan kepala Perangkat Daerah.

Bagian Kelima Klasifikasi Keamanan

Pasal 8

- (1) Klasifikasi Keamanan Arsip dinamis Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. Biasa/Terbuka;
 - b. Terbatas;
 - c. Rahasia; dan
 - d. Sangat Rahasia.
- (2) Arsip dengan klasifikasi keamanan Biasa/Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hak akses diberikan kepada semua tingkat pejabat dan staf yang berkepentingan.
- (3) Arsip dengan klasifikasi keamanan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hak akses diberikan kepada pimpinan tingkat menengah dan setingkat dibawahnya apabila sudah diberikan izin dari Sekretaris Daerah, pengawas internal/eksternal dan penegak hukum.
- (4) Arsip dengan klasifikasi keamanan Rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hak akses diberikan kepada pimpinan tingkat tinggi dan setingkat di bawahnya apabila sudah diberikan izin dari Bupati, pengawas internal/eksternal dan penegak hukum.
- (5) Arsip dengan klasifikasi keamanan Sangat Rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, hak akses diberikan kepada pimpinan tertinggi Perangkat Daerah dan yang setingkat di bawahnya apabila sudah diberikan izin dari Bupati, pengawas internal/eksternal dan penegak hukum.

Bagian Keenam Pengamanan Tingkat Klasifikasi

Pasal 9

- (1) Tingkat Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis bagi Pencipta Arsip dalam pelaksanaan pengamanan fisik Arsip Dinamis maupun informasinya sesuai dengan tingkat klasifikasi, meliputi:
 - a. penyimpanan; dan
 - b. penyampaian.
- (2) Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam rangka penanganan fisik maupun informasi Arsip Dinamis sesuai dengan tingkat klasifikasi dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. media Arsip;

- b. pengaturan pengguna Arsip; dan
- c. prasarana dan sarana Arsip.

Bagian Ketujuh Penyimpanan

Pasal 10

Penyimpanan dalam rangka penanganan fisik maupun informasi Arsip dinamis sesuai dengan tingkat klasifikasi dengan memperhatikan media Arsip, pengaturan pengguna Arsip, dan prasarana dan sarana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a terdiri dari:

- a. Arsip konvensional; dan
- b. Arsip elektronik.

Paragraf 1

Penyimpanan Arsip Konvensional dengan Klasifikasi Keamanan Biasa/Terbuka

Pasal 11

- (1) Penyimpanan Arsip konvensional dengan klasifikasi keamanan Biasa/Terbuka untuk media Arsip tidak ada persyaratan dan prosedur khusus.
- (2) Penyimpanan Arsip konvensional dengan klasifikasi keamanan Biasa/Terbuka untuk pengguna Arsip, pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses tidak ada persyaratan dan prosedur khusus.
- (3) Penyimpanan Arsip konvensional dengan klasifikasi keamanan Biasa/Terbuka untuk prasarana dan sarana Arsip, tidak memerlukan prasarana dan sarana khusus.

Paragraf 2

Penyimpanan Arsip Konvensional dengan Klasifikasi Keamanan Terbatas

Pasal 12

- (1) Penyimpanan Arsip konvensional dengan klasifikasi keamanan Terbatas untuk media Arsip ada persyaratan dan prosedur dengan memberikan cap "TERBATAS" pada fisik Arsip.
- (2) Penyimpanan Arsip konvensional dengan klasifikasi keamanan Terbatas untuk pengguna Arsip dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum.
- (3) Penyimpanan Arsip konvensional dengan klasifikasi keamanan Terbatas untuk prasarana dan sarana Arsip diperlukan tempat penyimpanan yang aman.

Paragraf 3

Penyimpanan Arsip Konvensional dengan Klasifikasi Keamanan Rahasia

Pasal 13

- (1) Penyimpanan Arsip konvensional dengan klasifikasi keamanan Rahasia untuk media Arsip ada persyaratan dan prosedur rahasia dengan memberikan cap “RAHASIA” pada fisik Arsip dan tidak sembarangan meletakkan Arsip/ dokumen yang bersifat Rahasia.
- (2) Penyimpanan Arsip konvensional dengan klasifikasi keamanan Rahasia untuk pengguna Arsip dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum.
- (3) Penyimpanan Arsip konvensional dengan klasifikasi keamanan Rahasia untuk prasarana dan sarana Arsip, lokasi aman dengan akses yang terbatas.

Paragraf 4

Penyimpanan Arsip Konvensional dengan Klasifikasi Keamanan Sangat Rahasia

Pasal 14

- (1) Penyimpanan Arsip konvensional dengan klasifikasi keamanan Sangat Rahasia untuk media arsip ada persyaratan dan prosedur Rahasia dengan memberikan cap “SANGAT RAHASIA” pada fisik arsip.
- (2) Penyimpanan Arsip konvensional dengan klasifikasi keamanan Sangat Rahasia untuk pengguna arsip dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas dan penegak hukum.
- (3) Penyimpanan Arsip konvensional dengan klasifikasi keamanan Sangat Rahasia untuk prasarana dan sarana arsip, disimpan dalam zona yang sangat aman dengan penelusuran jejak akses dan penerapan kebijakan “Meja harus bersih”.

Paragraf 5

Penyimpanan Arsip Elektronik dengan Klasifikasi Keamanan Biasa/Terbuka

Pasal 15

- (1) Penyimpanan Arsip elektronik dengan klasifikasi keamanan Biasa/Terbuka untuk media arsip di *backup* secara teratur untuk tujuan pemulihan sistem dalam rangka menjamin autensitas arsip.
- (2) Penyimpanan Arsip elektronik dengan klasifikasi keamanan Biasa/Terbuka untuk pengguna arsip, pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses.
- (3) Penyimpanan Arsip elektronik dengan klasifikasi keamanan Biasa/Terbuka untuk prasarana dan sarana arsip, tidak memerlukan prasarana dan sarana khusus.

Paragraf 6

Penyimpanan Arsip Elektronik dengan Klasifikasi Keamanan Terbatas

Pasal 16

- (1) Penyimpanan Arsip elektronik dengan klasifikasi keamanan Terbatas untuk media arsip *dibackup* secara teratur untuk tujuan pemulihan sistem dalam rangka menjamin autentisitas arsip dan *file* elektronik (termasuk *database*) harus dilindungi terhadap penggunaan internal atau oleh pihak eksternal.
- (2) Penyimpanan Arsip elektronik dengan klasifikasi keamanan Terbatas untuk pengguna arsip, autentikasi pengguna (nama pengguna/*password* atau *id* digital) dan penggunaan untuk *log in* pada tingkat individual.
- (3) Penyimpanan Arsip elektronik dengan klasifikasi keamanan Terbatas untuk prasarana dan sarana arsip, meliputi:
 - a. autentikasi server;
 - b. langkah-langkah keamanan dengan *operating system* khusus atau aplikasi khusus; dan
 - c. *firewall* dan sistem serta prosedur deteksi terhadap intrusi.

Paragraf 7

Penyimpanan Arsip Elektronik dengan Klasifikasi Keamanan Rahasia

Pasal 17

- (1) Penyimpanan Arsip elektronik dengan klasifikasi keamanan Rahasia untuk media arsip *dibackup* secara teratur untuk tujuan pemulihan sistem dalam rangka menjamin autentisitas arsip dan *file* elektronik (termasuk *database*) harus dilindungi terhadap penggunaan internal atau oleh pihak eksternal.
- (2) Penyimpanan Arsip elektronik dengan klasifikasi keamanan Rahasia untuk pengguna arsip, hanya staf yang ditunjuk oleh organisasi dan tingkat di atasnya yang dapat mengakses arsip tersebut, autentikasi pengguna (nama pengguna/*password* atau *id* digital), dan penggunaan untuk *log in* pada tingkat individual.
- (3) Penyimpanan Arsip elektronik dengan klasifikasi keamanan Rahasia untuk prasarana dan sarana arsip, langkah-langkah keamanan dengan *operating system* khusus atau aplikasi khusus dan *firewall* serta sistem dan prosedur deteksi terhadap intrusi.

Paragraf 8

Penyimpanan Arsip Elektronik dengan Klasifikasi Keamanan Sangat Rahasia

Pasal 18

- (1) Penyimpanan Arsip elektronik dengan klasifikasi keamanan sangat rahasia untuk media arsip *dibackup* secara teratur untuk tujuan pemulihan sistem dalam rangka menjamin autentisitas arsip dan *file*

elektronik (termasuk *database*) harus dilindungi terhadap penggunaan internal atau oleh pihak eksternal.

- (2) Penyimpanan Arsip elektronik dengan klasifikasi keamanan sangat rahasia untuk pengguna arsip, autentikasi pengguna (nama pengguna/*password* atau *id* digital), dan penggunaan untuk *log in* pada tingkat individual.
- (3) Penyimpanan Arsip elektronik dengan klasifikasi keamanan sangat rahasia untuk prasarana dan sarana arsip, autentikasi server, langkah-langkah keamanan dengan *operating system* khusus atau aplikasi khusus serta *firewall* dan sistem dan prosedur deteksi terhadap intrusi.

Bagian Kedelapan Penyampaian

Pasal 19

- (1) Penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dalam rangka penanganan fisik maupun informasi Arsip Dinamis sesuai dengan tingkat klasifikasi dilakukan dengan memperhatikan cara pengiriman.
- (2) Penyampaian Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Arsip konvensional; dan
 - b. Arsip elektronik.

Paragraf 1

Penyampaian Arsip Konvensional

Pasal 20

- (1) Penyampaian Arsip konvensional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dengan klasifikasi keamanan Biasa/Terbuka tidak ada persyaratan khusus.
- (2) Penyampaian Arsip konvensional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dengan klasifikasi keamanan Terbatas amplop harus disegel.
- (3) Penyampaian Arsip konvensional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dengan klasifikasi Rahasia, harus:
 - a. menggunakan warna kertas yang berbeda;
 - b. diberi kode Rahasia;
 - c. menggunakan amplop ganda;
 - d. amplop segel, stempel Rahasia;
 - e. konfirmasi tanda terima; dan
 - f. harus dikirim melalui orang yang sudah diberi wewenang dan tanggung jawab terhadap pengendalian Arsip/dokumen Rahasia.
- (4) Penyampaian Arsip konvensional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dengan klasifikasi Sangat Rahasia, harus:
 - a. menggunakan warna kertas yang berbeda;
 - b. menggunakan amplop ganda bersegel;

- c. audit jejak untuk setiap titik akses (misal: tandatangan); dan
- d. harus dikirim melalui orang yang sudah diberi wewenang dan tanggung jawab terhadap pengendalian Arsip/dokumen Rahasia.

Paragraf 2

Penyampaian Arsip Elektronik

Pasal 21

- (1) Penyampaian Arsip elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dengan klasifikasi keamanan Biasa/Terbuka tidak ada prosedur khusus.
- (2) Penyampaian Arsip elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dengan klasifikasi keamanan Terbatas, apabila pesan elektronik atau email berisi data tentang informasi personal, harus menggunakan enkripsi, email yang dikirim dengan alamat khusus, *password*, dan lain-lain.
- (3) Penyampaian Arsip elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dengan klasifikasi keamanan Rahasia, harus:
 - a. ada konfirmasi dari penerima pesan elektronik atau *email*;
 - b. menggunakan perangkat yang dikhususkan bagi pesan elektronik atau email Rahasia; dan
 - c. menggunakan persandian atau kriptografi.
- (4) Penyampaian Arsip elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dengan klasifikasi keamanan Sangat Rahasia, harus:
 - a. ada konfirmasi dari penerima pesan elektronik atau *email*;
 - b. menggunakan perangkat yang dikhususkan bagi pesan elektronik atau *email* Rahasia;
 - c. menggunakan persandian atau kriptografi; dan
 - d. harus ada pelacakan akses informasi untuk suatu pesan elektronik atau *email*.

Pasal 22

Daftar Klasifikasi Keamanan Akses Arsip Dinamis Pemerintah Daerah tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh

Penggolongan Hak Akses Arsip Dinamis

Pasal 23

- (1) Pengguna yang berhak di lingkungan internal instansi meliputi
 - a. Penentu Kebijakan yaitu Bupati, Sekretaris Daerah, Pimpinan Perangkat Daerah, mempunyai hak untuk mengakses seluruh arsip yang berada di bawah kewenangannya.

- b. Pelaksana kebijakan, mempunyai hak untuk mengakses seluruh arsip yang berada dibawah kewenangannya dengan tingkat klasifikasi biasa.
 - c. Pengawas internal, mempunyai hak untuk mengakses seluruh arsip pada pencipta arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan internal.
- (2) Pengguna yang berhak di lingkungan eksternal instansi meliputi :
- a. Publik, mempunyai hak untuk mengakses seluruh arsip dengan kategori biasa/terbuka.
 - b. Pengawas eksternal, mempunyai hak untuk mengakses seluruh arsip pada pencipta arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan eksternal.
 - c. Aparat penegak hukum, mempunyai hak untuk mengakses arsip pada pencipta arsip yang terkait dengan perkara atau proses hukum yang sedang ditangani.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pedoman Sistem Klasifikasi, Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 14 Desember 2023

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

Ttd

MUSA AHMAD

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 14 Desember 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**

Ttd

NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2023 NOMO 62.

DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DAN AKSES		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	000				UMUM			
		000.2			KETATAUSAHAAN DANKERUMAHTANGGAAN			
			000.2.1		Telekomunikasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			000.2.2		Pejalanan Dinas Dalam Negeri			
				000.2.2.1	Perjalanan Dinas Kepala Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				000.2.2.2	Perjalanan Dinas DPRD	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				000.2.2.3	Perjalanan Dinas Pegawai	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			000.2.3		Perjalanan Dinas Luar Negeri			
				000.2.3.1	Perjalanan Dinas Kepala Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				000.2.3.2	Perjalanan Dinas DPRD	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				000.2.3.3	Perjalanan Dinas Pegawai	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			000.2.4		Pengguna Fasilitas Kantor (antara lain: Permintaan dan Pengguna ruang, gedung, kendaraan, wisma, rumah dinas dan fasilitas kantor lainnya)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			000.2.5		Rapat pimpinan antara lain: Notula/Risalah Rapat	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			000.2.6		Penyediaan Konsumsi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			000.2.7		Pengurusan Kendaraan Dinas			
				000.2.7.1	Pengurusan surat-surat kendaraan dinas	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				000.2.7.2	Pemeliharaan dan perbaikan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				000.2.7.3	Pengurusan kehilangan dan masalah kendaraan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan Eksternal
			000.2.8		Pemeliharaan Gedung, Taman dan Peralatan Kantor			
				000.2.8.1	Pertamanan/ Landscape	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan Eksternal
				000.2.8.2	Penghijauan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan Eksternal
				000.2.8.3	Perbaikan Gedung	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan Eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				000.2.8.4	Perbaikan Peralatan Kantor	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan Eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				000.2.8.5	Perbaikan Rumah Dinas/ Wisma	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan Eksternal
				000.2.8.6	Kebersihan Gedung dan Taman	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan Eksternal
			000.2.9		Pengelolaan Jaringan Listrik, Air, Telepon dan Komputer			
				000.2.9.1	Perbaikan / Pemeliharaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan Eksternal
				000.2.9.2	Pemasangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan Eksternal
			000.2.10		Ketertiban dan Keamanan			
				000.2.10.1	Pengamanan, Penjagaan, dan Pengawasan terhadap Pejabat, Kantor dan Rumah Dinas	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan Eksternal
				000.2.10.2	Laporan Ketertiban dan Keamanan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan Eksternal
			000.2.11		Administrasi Pengelolaan Parkir	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan Eksternal
			000.2.12		Administrasi Pakaian Dinas Pegawai, Satpam, Petugas Kebersihan dan Pegawai lainnya	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan Eksternal
		000.3			PERLENGKAPAN			
			000.3.1		Inventarisasi dan Penyimpanan			

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				000.3.1.1	Data hasil inventarisasi dan penyimpanan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan Eksternal
				000.3.1.2	Laporan dan evaluasi inventarisasi dan penyimpanan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan Eksternal
			000.3.2		Pemeliharaan peralatan kantor			
				000.3.2.1	Data hasil pemeliharaan kantor	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan Eksternal
				000.3.2.2	Laporan dan evaluasi pemeliharaan kantor	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan Eksternal
			000.3.3		Distribusi			
				000.3.3.1	Barang habis pakai	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan Eksternal
				000.3.3.2	Barang milik daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan Eksternal
			000.3.4		Penghapusan Barang Milik Daerah antara lain: Keputusan Pembentukan Tim, Berita Acara Penghapusan Barang Milik Daerah, Daftar Barang yang dihapuskan, Laporan Hasil Pelaksanaan Penghapusan BMD termasuk didalamnya proses lelang penghapusan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan Eksternal
			000.3.5		Pengelolaan Database Barang Milik Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan Eksternal
		000.4			PENGADAAN			

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			000.4.1		Rencana pengadaan Barang dan jasa (antara lain: : Identifikasi dan analisis kebutuhan barang/jasa, penyusunan dan penetapan rencana penganggaran pengadaan, penetapan kebijakan umum, penyusunan kerangka Acuan Kerja (KAK), Pengumuman Rencana Umum Pengadaan)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan Eksternal
			000.4.2		Pengadaan Langsung (antara lain: persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, pelaksanaan kontrak)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan Eksternal
			000.4.3		Pengadaan Tidak Langsung/Lelang (antara lain: persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, pelaksanaan kontrak)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan Eksternal
			000.4.4		Swakelola (antara lain: perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan Eksternal
			000.4.5		Pengolahan Sistem Informasi Pengadaan antara lain : Data base pengguna sistem informasi pengadaan barang/jasa, Data Base kontrak, Data Base Pengadaan Barang/jasa	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan Eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			000.4.6		Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan pengadaan antara lain: Laporan Hasil Monitoring, Laporan hasil evaluasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan Eksternal
		000.5			PERPUSTAKAAN			
			000.5.1		Kebijakan di bidang Perpustakaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan Eksternal
			000.5.2		Deposit Bahan Pustaka			
				000.5.2.1	Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				000.5.2.2	Pangkalan Data Penerbit dan Pengusaha Rekaman	Biasa	Terbuka	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum
				000.5.2.3	Terbitan Internasional dan Regional	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				000.5.2.4	Pemantauan Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				000.5.2.5	Bibliografi dan Katalog	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			000.5.3		Koleksi Pustaka			
				000.5.3.1	Pembelian	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				000.5.3.2	Hibah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				000.5.3.3	Hadiah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				000.5.3.4	Tukar Menukar	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				000.5.3.5	Implementasi Undang-Undang KCKR	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				000.5.3.6	Terbitan Internal	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				000.5.3.7	Pendistribusian bahan pustaka surplus	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				000.5.3.8	Inventarisasi koleksi (Buku Induk)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			000.5.4		Pengolahan Bahan Pustaka	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			000.5.5		Pangkalan Data Katalog Koleksi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			000.5.6		Layanan Perpustakaan			
				000.5.6.1	Keanggotaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				000.5.6.2	Peminjaman	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				000.5.6.3	Pengembangan gemar baca	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			000.5.7		Kerjasama Perpustakaan			
				000.5.7.1	MoU	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum
				000.5.7.2	Perjanjian kerjasama	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum
				000.5.7.3	Partisipasi organisasi profesi dan kerjasama internasional	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			000.5.8		Pengembangan Implementasi Teknologi Informasi Perpustakaan			
				000.5.8.1	Pengembangan situs web	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				000.5.8.2	Pengembangan kemas ulang informasi multimedia	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				000.5.8.3	Pengembangan program aplikasi perpustakaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				000.5.8.4	Pengembangan pangkalan data keputastakaan digital	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			000.5.9		Pangkalan Data Layanan Perpustakaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			000.5.10		Konservasi			
				000.5.10.1	Perawatan Bahan Perpustakaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				000.5.10.2	Perbaikan Bahan Perpustakaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				000.5.10.3	Penjilidan Bahan Perpustakaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			000.5.11		Reprografi (Mikrofilm, Reproduksi Foto)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			000.5.12		Transformasi Digital	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			000.5.13		Kurasi Digital	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			000.5.14		Pengembangan Perpustakaan			
				000.5.14.1	Perpustakaan Umum	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				000.5.14.2	Perpustakaan Khusus	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				000.5.14.3	Perpustakaan Sekolah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				000.5.14.4	Perpustakaan Perguruan Tinggi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
		000.6			KEARSIPAN			
			000.6.1		Kebijakan di bidang kearsipan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Terbuka	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum
			000.6.2		Pembinaan Kearsipan			
				000.6.2.1	Pengembangan Profesi Arsiparis, antara lain Formasi Jabatan Arsiparis, Analisis Kebutuhan Arsiparis	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				000.6.2.2	Bimbingan Konsultasi Arsiparis	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				000.6.2.3	Penilaian Arsiparis	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				000.6.2.4	Pemilihan Arsiparis Teladan, antara lain Berkas Penyelenggaraan Pemilihan Arsiparis Teladan, Berkas Penetapan Arsiparis Teladan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				000.6.2.5	Data Base Arsiparis	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				000.6.2.6	Bimbingan Konsultasi Kearsipan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				000.6.2.7	Supervisi dan Evaluasi, antara lain: Perencanaan Supervisi dan Evaluasi, Pelaksanaan Supervisi dan Evaluasi, Laporan Hasil Supervisi dan Evaluasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				000.6.2.8	Data Base Bimbingan dan Konsultasi dan Supervisi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				000.6.2.9	Fasilitasi Kearsipan, antara lain: Fasilitasi SDM Kearsipan, Fasilitasi Prasarana dan Sarana Kearsipan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				000.6.2.10	Lembaga/Unit Kearsipan Teladan, antara lain: Berkas Penyelenggaraan Pemilihan Lembaga/Unit Kearsipan, Berkas Penetapan Lembaga/Unit Kearsipan Teladan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				000.6.2.11	Jadwal Retensi Arsip, antara lain: Berkas Usulan Persetujuan JRA, Surat Persetujuan JRA dari Kepala ANRI	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			000.6.3		Pengelolaan Arsip Dinamis			
				000.6.3.1 Penciptaan	(antara lain: Buku Registrasi Naskah Masuk dan Keluar, Buku Agenda, Kartu Kendali, Lembar Pengantar/Buku Ekspedisi)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				000.6.3.2	Pemberkasan Arsip Aktif (antara lain: daftar berkas dan daftar isi berkas)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				000.6.3.3	Penataan Arsip Inaktif (antara lain: daftar arsip inaktif, daftar arsip inaktif tematik)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				000.6.3.4	Pengguna (antara lain: daftar arsip dinamis berdasarkan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis, bukti peminjaman arsip)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				000.6.3.5	Autentikasi Arsip Dinamis (antara lain: pembuktian autentisitas, pendapat tenaga ahli, pengujian, penetapan autentisitas arsip dinamis)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			000.6.4		Program Arsip Vital (antara lain: Identifikasi Arsip Vital, Perlindungan dan Pengamanan Arsip Vital, Penyelamatan Arsip Vital dan Pemulihan Arsip Vital)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			000.6.5		Pengelolaan Arsip Terjaga (antara lain: Daftar Identifikasi Arsip Terjaga, Daftar Berkas Arsip Terjaga, Daftar Isi Berkas Arsip Terjaga, Surat Penetapan Autentifikasi Arsip Terjaga, Surat Penyerahan Arsip Terjaga, Daftar Salinan Autentik Arsip Terjaga, Berita Acara Penyerahan Salinan Autentik Arsip Terjaga	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			000.6.6		Penyusutan Arsip			
				000.6.6.1	Pemindahan Arsip (antara lain: Berita Acara Pemindahan, Daftar Arsip yang dipindahkan)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				000.6.6.2	Pemusnahan Arsip (antara lain: SK Penetapan Panitia Penilai Arsip, Pertimbangan Panitia Penilai, Permintaan Persetujuan Kepala ANRI untuk pemusnahan arsip dengan retensi sekurang-kurangnya 10 Tahun atau Persetujuan Kepala Daerah selaku Pimpinan Pencipta Arsip untuk pemusnahan arsip dengan retensi di bawah 10 Tahun, Penetapan Arsip Yang Dimusnahkan, Berita Acara Pemusnahan Arsip, Daftar Arsip Yang Dimusnahkan.	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				000.6.6.3	Penyerahan Arsip Statis (antara lain: Pembentukan panitia penilai, Notulen rapat panitia, Surat pertimbangan panitia penilai, Surat persetujuan dari Kepala Lembaga Kearsipan, Surat pernyataan autentik, terpercaya, utuh, dan digunakan dari pencipta arsip, Keputusan Penetapan Penyerahan, Berita Acara Penyerahan Arsip, Daftar Arsip yang diserahkan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			000.6.7		Alih Media Arsip (antara lain: Kebijakan alih media, Autentikasi, Berita Acara, Daftar Arsip yang alih mediakan)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			000.6.8		Data Base Pengelolaan Arsip Dinamis			
				000.6.8.1	Data Base Pengelolaan Arsip Aktif	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				000.6.8.2	Data Base Pengelolaan Arsip Inaktif	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			000.6.9		Pengelolaan Arsip Statis			

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				000.6.9.1	Akuisisi (antara lain: Monitoring fisik dan daftar, Verifikasi terhadap daftar arsip, Menetapkan status arsip statis, Persetujuan untuk Penyerahan, Penetapan arsip yang diserahkan Berita Acara Penyerahan, Daftar Arsip yang diserahkan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				000.6.9.2	Penghargaan dan Imbalan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				000.6.9.3	Sejarah Lisan (antara lain: Administrasi kegiatan, Berita Acara Wawancara Sejarah Lisan, Laporan Kegiatan, Hasil Wawancara (Kaser/CD/media lain sesuai perkembangan TI, dan Transkrip)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				000.6.9.4	Daftar Pencarian Arsip Statis (antara lain: pengumuman, akuisisi daftar pencarian arsip statis)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				000.6.9.5	Menyusun Sarana Bantu Temu Balik (antara lain: daftar arsip statis, inventaris arsip statis, guide)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				000.6.9.6	Preservasi Preventif (antara lain: penyimpanan, pengendalian hama terpadu, reproduksi (alih media)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				000.6.9.7	Preservasi Kuratif	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				000.6.9.8	Autentikasi Arsip Statis (antara lain: pembuktian autentisitas, pendapat tenaga ahli, pengujian, penetapan autentitas arsip statis)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				000.6.9.9	Akses Arsip Statis (antara lain: Layanan arsip, Penerbitan naskah sumber)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			000.6.10		Jasa Kearsipan (antara lain konsultasi kearsipan, manual kearsipan, penataan arsip, otomasi kearsipan, penyimpanan arsip, perawatan dan pemeliharaan arsip)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			000.6.11		Pengelolaan SIKN dan JIKN	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			000.6.12		Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			000.6.13		Penyelamatan arsip Perangkat Daerah digabung dan/atau dibubarkan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			000.6.14		Penerbitan izin Pengguna arsip yang bersifat tertutup	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			000.6.15		Pengawasan Kearsipan			
				000.6.15.1	Pengawasan Kearsipan Internal	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				000.6.15.2	Pengawasan Kearsipan Eksternal	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				000.6.15.3	Sanksi	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum
		000.7			PERSANDIAN			
			000.7.1		Kebijakan di bidang Persandian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			000.7.2		Pengamanan persandian			
				000.7.2.1	Pengamanan sinyal: teknik sandi dan kriptografi	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum
				000.7.2.2	Analisis sinyal: teknik sandi dan kriptografi	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas
								internal dan eksternal serta penegak hukum
				000.7.2.3	Materiil sandi: sistem dan peralatan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum
			000.7.3		Pengkajian persandian: Kriptografi, Peralatan Sandi, Komunikasi Sandi			
				000.7.3.1	Perencanaan Pengkajian	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				000.7.3.2	Administrasi Pengkajian	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				000.7.3.3	Pelaksanaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				000.7.3.4	Pelaporan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			000.7.4		Pembinaan dan Pengendalian Persandian			
				000.7.4.1	Sumber Daya Manusia (SDM)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				000.7.4.2	Jaring Komunikasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			000.7.5		Layanan Sertifikasi Elektronik			
				000.7.5.1	Perencanaan dan Administrasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				000.7.5.2	Pelaksanaan Verifikasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				000.7.5.3	Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				000.7.5.4	Penyesuaian Sistem dan Testing	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				000.7.5.5	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengguna	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				000.7.5.6	Pelaksanaan Penerbitan Sertifikat Elektronik	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum
				000.7.5.7	Pelaporan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
		000.8			PERENCANAAN PEMBANGUNAN			
			000.8.1		Musyawaharah Perencanaan Pembangunan /Musrenbang			
				000.8.1.1	Musrenbang Provinsi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				000.8.1.2	Musrenbang Nasional	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				000.8.1.3	Musrenbang Kab/Kota	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				000.8.1.4	Musrenbang Kecamatan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				000.8.1.5	Musrenbang Kelurahan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				000.8.1.6	Musrenbang Desa	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			000.8.2		Perencanaan Pembangunan Daerah			

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				000.8.2.1	Rencana Pembangunan Jangka Panjang	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				000.8.2.2	Rencana Pembangunan Jangka Menengah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				000.8.2.3	Rencana Anggaran Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				000.8.2.4	Rencana Pembangunan Tahunan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				000.8.2.5	Rencana Pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				000.8.2.6	Program kerja tahunan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				000.8.2.7	Penetapan / Kontrak Kinerja	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				000.8.2.8	Laporan Berkala	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				000.8.2.9	Laporan Insidental	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				000.8.2.10	Evaluasi Program	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			000.8.3		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			000.8.4		Konsultasi Perencanaan Pembangunan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			000.8.5		Pemantauan, Evaluasi, Penilaian, dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			000.8.6		Aksi Strategis Daerah			
				000.8.6.1	Rancangan awal perencanaan aksi strategi daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				000.8.6.2	Rapat pembahasan rancangan awal dengan Perangkat Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				000.8.6.3	Sosisalisasi dengan Perangkat Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				000.8.6.4	Rancangan akhir perencanaan aksi strategi daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				000.8.6.5	Penerapan perencana aksi strategi daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			000.8.7		Perencanaan Pendanaan Pembangunan			
				000.8.7.1	Pendanaan Nasional dan Hibah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				000.8.7.2	Pendanaan Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				000.8.7.3	Kerjasama Pembangunan Nasional	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				000.8.7.4	Surat Berharga Syariah Negara	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				000.8.7.5	Pendanaan On Top atau Inisiatif Baru	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
		000.9			ORGANISASI DAN TATA LAKSANA			
			000.9.1		Struktur Organisasi di lingkungan Pemerintahan Daerah Kab/Kota			
				000.9.1.1	Pembentukan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				000.9.1.2	Pengubahan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				000.9.1.3	Pembubaran	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			000.9.2		Uraian Jabatan			
				000.9.2.1	Analisa Jabatan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				000.9.2.2	Analisa Beban Kerja	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			000.9.3		Ketatalaksanaan			
				000.9.3.1	Proses Bisnis	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				000.9.3.2	Standar Pelayanan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				000.9.3.3	Standar Operasional Prosedur	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				000.9.3.4	Pelayanan Publik	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			000.9.4		Standar Kompetensi jabatan struktural dan fungsional	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			000.9.5		Evaluasi Kelembagaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			000.9.6		Koordinasi Penguatan Reformasi dan Birokrasi			
				000.9.6.1	Budaya Kerja	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				000.9.6.2	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				000.9.6.3	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
		000.10			PENELITIAN, PENGKAJIAN , DANPENGEMBANGAN			
			000.10.1		Kebijakan di bidang penelitian, pengkajian, pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			000.10.2		Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan meliputi: rencana kerja, administrasi penelitian, pelaksanaan, hasil penelitian/pengkajian/rekomendasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksterna
			000.10.3		Sosialisasi dan desiminasi hasil penelitian, hasil pengkajian dan pengembangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksterna
			000.10.4		Bimbingan teknis penelitian, pengkajian dan pengembangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksterna
			000.10.5		Forum komunikasi penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksterna
			000.10.6		Data dan informasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi			
				000.10.6.1	Data	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksterna
				000.10.6.2	Statistik	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksterna
				000.10.6.3	Jurnal Hasil Penelitian/Pengkajian	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksterna
			000.10.7		Master proceeding/ jurnal penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksterna

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			000.10.8		Hak atas kekayaan intelektual (HaKI)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksterna
			000.10.9		Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksterna
			000.10.10		Seminar, lokakarya, temukarya, workshop	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksterna
	100				PEMERINTAHAN			
		100.1			OTONOMI DAERAH			
			100.1.1		Kebijakan di bidang Otonomi Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksterna
			100.1.2		Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Fasilitasi, Bimbingan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksterna
			100.1.3		Penataan Daerah, Pembinaan Daerah Pemekaran, Otonomi Khusus, Daerah Istimewa dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum
			100.1.4		Pemilihan Kepala Daerah, DPRD, dan Hubungan Antar Lembaga (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)			
				100.1.4.1	Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				100.1.4.2	Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum
				100.1.4.3	Penyiapan Perumusan Kebijakan Pemberdayaan Kapasitas Kepala Daerah dan DPRD di Bidang Pemerintahan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				100.1.4.4	Hubungan Antar Lembaga Daerah (Pemerintah Daerah dan DPRD)	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum
				100.1.4.5	Assosiasi Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			100.1.5		Otonomi Khusus dan daerah Istimewa			
			100.1.6		Peningkatan Kapasitas Dan Evaluasi Kinerja Daerah (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				100.1.61	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum
				100.1.6.2	Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				100.1.6.3	Pengembangan Kapasitas Daerah	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijaka, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum
			100.1.7		LKPJ/ LKPJAMJ dan LPPD (Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
		100.2			PEMERINTAHAN UMUM			
			100.2.1		Kebijakan di bidang Pemerintahan Umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			100.2.2		Dekonsentrasi dan Kerjasama			
				100.2.2.1	Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				100.2.2.2	Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Tugas Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				100.2.2.3	Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				100.2.2.4	Fasilitasi Kecamatan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				100.2.2.5	Fasilitasi Pelayanan Umum	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			100.2.3		Wilayah Administrasi dan Perbatasan			
				100.2.3.1	Toponimi dan Data Wilayah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				100.2.3.2	Pengembangan dan Penataan Batas Antar Negara	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum
				100.2.3.3	Batas Antar Daerah Wilayah	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum
				100.2.3.4	Penataan Batas Wilayah Antar Kecamatan, Batas Wilayah Antar Kelurahan Satu Kecamatan Dan Batas Wilayah Kelurahan Antar Kecamatan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum
				100.2.3.5	Pemeliharaan Batas Wilayah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
		100.3			HUKUM			
			100.3.1		Program Legislasi			
				100.3.1.1	Bahan/Materi Program Legislasi Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				100.3.1.2	Program Legislasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			100.3.2		Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Rancangan Peraturan Daerah, termasuk naskah akademik, <u>rancangan awal sampai</u>	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
					dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai <u>diundangkan</u>			
			100.3.3		Keputusan/Ketetapan Pimpinan Pemerintah			
				100.3.3.2	Keputusan / Ketetapan Bupati	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				100.3.3.5	Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			100.3.4		Instruksi / Surat Edaran			
				100.3.4.2	Instruksi / Surat Edaran Kabupaten	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				100.3.4.4	Instruksi / Surat Edaran Setingkat Eselon II	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			100.3.5		Surat Perintah			
				100.3.5.2	Surat Perintah Bupati	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				100.3.5.4	Surat Perintah Setingkat Eselon II	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum
			100.3.6		Standar/ Pedoman/ Prosedur Kerja/ Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			100.3.7		Nota Kesepakatan/ Memorandum of Understanding (MOU)/ Kontrak/ Perjanjian kerja sama			
				100.3.7.1	Dalam Negeri	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				100.3.7.2	Luar Negeri	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta
								penegak hukum
			100.3.8		Dokumentasi Hukum, (antara lain: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Peraturan-Peraturan yang dijadikan referensi)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			100.3.9		Sosialisasi/ Penyuluhan/ Pembinaan Hukum	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			100.3.10		Bantuan/ Konsultasi Hukum/ Advokasi Pemberian bantuan/ konsultasi hukum (Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara dan Agama)	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum
			100.3.11		Kasus/ Sengketa Hukum			
				100.3.11.1	Pidana Kasus/ sengketa pidana, baik kejahatan maupun pelanggaran	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum
				100.3.11.2	Perdata Kasus/sengketa perdata	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta
								penegak hukum
				100.3.11.3	Tata Usaha Negara	Rahasia	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum
				100.3.11.4	Perburuhan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum
				100.3.11.5	Arbitrase	Rahasia	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				100.3.11.6	Sengketa Adat	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum
			100.3.12		Perijinan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum
			100.3.13		Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)			
				100.3.13.1	Hak Cipta	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum
				100.3.13.2	Hak Paten	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum
				100.3.13.3	Hak Desain Industri	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum
				100.3.13.4	Hak Rahasia Dagang	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				100.3.13.5	Hak Merk	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum
			100.3.14		Permohonan HAKI yang ditolak	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum
	200				POLITIK			
		200.1			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
			200.1.1		Kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			200.1.2		Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan			
				200.1.2.1	Ketahanan Ideologi Negara	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				200.1.2.2	Wawasan Kebangsaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				200.1.2.3	Bela Negara	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				200.1.2.4	Nilai Nilai Sejarah Kebangsaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				200.1.2.5	Pembauran dan Kewarganegaraan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			200.1.3		Kewaspadaan Nasional			
				200.1.3.1	Fasilitasi dan Evaluasi Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Keamanan	Rahasia	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasan internal dan eksternal serta penegak hukum
				200.1.3.2	Fasilitasi Bina Masyarakat Perbatasan Antar Negara dan Kehidupan Masyarakat Perbatasan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				200.1.3.3	Fasilitasi dan Evaluasi Penanganan Konflik Pemerintahan	Rahasia	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasan internal dan eksternal serta penegak hukum
				200.1.3.4	Fasilitasi dan Laporan Penanganan Konflik Sosial	Rahasia	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasan internal dan eksternal serta penegak hukum
				200.1.3.5	Fasilitasi Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing	Rahasia	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasan internal dan eksternal serta penegak hukum
			200.1.4		Ketahanan Seni, Budaya, Adat, Agama, dan Kemasyarakatan			
				200.1.4.1	Ketahanan Seni	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				200.1.4.2	Ketahanan Budaya	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				200.1.4.3	Agama dan Kepercayaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				200.1.4.4	Organisasi Kemasyarakatan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				200.1.4.5	Masalah Sosial Kemasyarakatan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				200.1.4.6	Fasilitasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				200.1.4.7	Pelaksanaan Identifikasi dan Kompilasi Organisasi Masyarakat	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				200.1.4.8	Laporan Hasil Kerjasama Kegiatan Dengan Ormas/LNL	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				200.1.4.9	Evaluasi Aktifitas Ormas: Sanksi Administrasi	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasan internal dan eksternal serta penegak hukum
				200.1.4.10	Fasilitasi Sengketa Ormas	Rahasia	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasan internal dan eksternal serta penegak hukum

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				200.1.4.11	Fasilitasi Ormas	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			200.1.5		Politik Dalam Negeri			
				200.1.5.1	Implementasi Kebijakan Politik	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				200.1.5.2	Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				200.1.5.3	Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				200.1.5.4	Verifikasi dan Evaluasi Partai Politik Yang Memperoleh Kursi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				200.1.5.5	Partai Politik Yang Tidak Memperoleh Kursi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				200.1.5.6	Pemerintah Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				200.1.5.7	Database Parpol	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				200.1.5.8	Pendidikan Budaya Politik	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				200.1.5.9	Pemilihan Umum	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			200.1.6		Ketahanan Ekonomi			

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				200.1.6.1	Ketahanan Sumberdaya Alam dan Kesenjangan Perekonomian	Rahasia	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasan internal dan eksternal serta penegak hukum
				200.1.6.2	Ketahanan Perdagangan Investasi, Fiskal dan Moneter	Rahasia	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasan internal dan eksternal serta penegak hukum
				200.1.6.3	Perilaku Perekonomian Masyarakat	Rahasia	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasan internal dan eksternal serta penegak hukum
				200.1.6.4	Ketahanan Lembaga Sosial Ekonomi	Rahasia	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasan internal dan eksternal serta penegak hukum
		200.2			PEMILU			
			200.2.1		Kebijakan di bidang Pemilu yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			200.2.2		Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih			

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				200.2.2.1	Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) Pemilu	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				200.2.2.2	Daftar Pemilih Sementara (DPS)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				200.2.2.3	Daftar Pemilih Tambahan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				200.2.2.4	Keputusan KPU tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				200.2.2.5	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			200.2.3		Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu			
				200.2.3.1	Dokumen pendaftaran peserta Pemilu dari partai politik	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				200.2.3.2	Dokumen hasil verifikasi administrasi dan faktual partai politik	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				200.2.3.3	Dokumen pendaftaran peserta Pemilu dari Calon Perseorangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				200.2.3.4	Dokumen hasil verifikasi administrasi dan faktual	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			200.2.4		Penetapan Peserta Pemilu			
				200.2.4.4	Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				200.2.4.5	Peta Daerah Pemilihan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			200.2.5		Pencalonan Pemilu			
				200.2.5.1	Petunjuk teknis pencalonan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				200.2.5.2	Surat pencalonan pendaftaran	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				200.2.5.3	Daftar bakal calon	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				200.2.5.4	Dokumen persyaratan masing-masing bakal calon	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				200.2.5.5	Dokumen verifikasi administrasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				200.2.5.6	Daftar Calon Sementara dan Calon Tetap	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			200.2.6		Kampanye Pemilu			
				200.2.6.1	Keputusan KPU tentang penetapan jadwal kampanye	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				200.2.6.2	Nama juru kampanye/pelaksana kampanye	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				200.2.6.3	Peringatan tertulis/penghentian kegiatan kampanye	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			200.2.7		Dana Kampanye			

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				200.2.7.1	Pedoman audit dana kampanye	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				200.2.7.2	Laporan dana kampanye peserta Pemilu	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				200.2.7.3	Laporan hasil audit dana kampanye	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			200.2.8		Pemungutan dan Penghitungan Suara			
				200.2.8.1	Keputusan KPU tentang desain dan spesifikasi surat suara	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				200.2.8.2	Master surat suara	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				200.2.8.3	Surat suara yang terpakai	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				200.2.8.4	Surat Suara Tidak terpakai (rusak, salah, dan tidak digunakan)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				200.2.8.5	Formulir pemilu di Pemerintah Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
	300				KEAMANAN DAN KETERTIBAN			
		300.1			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			
			300.1.1		Kebijakan di bidang Polisi Pamong Praja yang dilakukan di Pemerintah Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			300.1.2		Tata Operasional dan Prasarana Sarana Polisi Pamong Praja			

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				300.1.2.1	Tata Operasiona Polisi Pamong Praja	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				300.1.2.2	Sarana Prasarana Polisi Pamong Praja	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			300.1.3		Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			300.1.4		Perlindungan Masyarakat	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			300.1.5		Penyidik Pegawai Negeri Sipil	Rahasia	Tertutup	Penentu kebijakan, Pengawas internal/ek sternal, Penegak hukum
			300.1.6		Perlindungan Hak-Hak Sipil dan Hak Asasi Manusia	Rahasia	Tertutup	Penentu kebijakan, Pengawas internal/ek sternal, Penegak hukum
		300.2			PENANGGULANGAN BENCANA, PENCARIAN, DAN PERTOLONGAN			
			300.2.1		Kebijakan di bidang Penanggulangan Bencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			300.2.2		Perencanaan Penanggulangan Bencana, Pencarian, dan Pertolongan			

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				300.2.2.1	Rencana dan standardisasi dan pengawakan dan perbekalan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				300.2.2.2	Kurikulum dan silabus, evaluasi dan monitoring	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				300.2.2.3	Tenaga pencarian pertolongan, penyiapan potensi pencarian dan pertolongan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				300.2.2.4	Permasyarakatan pencarian dan pertolongan, sertifikasi pencarian dan pertolongan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				300.2.2.5	Perencanaan dan standardisasi, penyelenggaraan operasi SAR, Siaga dan latihan, tempat latihan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				300.2.2.6	Registrasi BEACON	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			300.2.3		Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			300.2.4		Potensi Pencarian dan Pertolongan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			300.2.5		Bina Ketenagaan dan Masyarakat			
				300.2.5.1	Rencana Pendidikan dan Pelatihan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				300.2.5.2	Penyiapan tenaga dan potensi Pencarian dan Pertolongan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				300.2.5.3	Pemasyarakatan dan Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				300.2.5.4	Pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan (Sosialisasi dan Penyuluhan)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				300.2.5.5	Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			300.2.6		Operasi Pencarian dan Pertolongan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			300.2.7		Rencana Pengembangan dan Standardisasi Komunikasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			300.2.8		Operasi Komunikasi			
				300.2.8.1	Operasi Peralatan Komunikasi (Berita SAR)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				300.2.8.2	Operasi Peralatan Deteksi Dini (Berita SAR)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				300.2.8.3	Registrasi BEACON	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			300.2.9		Inventarisasi dan Pemeliharaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			300.2.10		Pengembangan Sistem Informasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			300.2.11		Penyajian dan Layanan Informasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				400.1.2.5	Fasilitasi Teknologi dan inovasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.1.2.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan sumber daya	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.1.2.7	Pemantauan dan evaluasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.1.3		Peningkatan Infrastruktur			
				400.1.3.1	Fasilitasi Transportasi peningkatan infrastruktur	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.1.3.2	Fasilitasi Informasi dan Telekomunikasi dalam peningkatan infrastruktur	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.1.3.3	Fasilitasi Sosial dalam peningkatan infrastruktur	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.1.3.4	Fasilitasi Ekonomi dalam peningkatan infrastruktur	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.1.3.5	Fasilitasi energi dalam peningkatan infrastruktur	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.1.3.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan peningkatan infrastruktur	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.1.3.7	Pemantauan dan evaluasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.1.4		Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha			

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				400.1.4.1	Fasilitasi Invenstasi pembinaan ekonomi dan dunia usaha	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.1.4.2	Fasilitasi Kelembagaan ekonomi dan dunia usaha	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.1.4.3	Fasilitasi Usaha mikro, kecil dan menengah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.1.4.4	Fasilitasi Kemitraan usaha	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.1.4.5	Fasilitasi Pengembangan komoditas unggulan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.1.4.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan ekonomi dan dunia usaha	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.1.4.7	Pemantauan dan evaluasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.1.4.8	Identifikasi dan inventarisasi pengembangan usaha ekonomi perdesaan tertinggal	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.1.4.9	Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi perdesaan tertinggal	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.1.4.10	Monitoring dan evaluasi Ekonomi desa tertinggal	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.1.4.11	Identifikasi dan inventarisasi pengembangan masyarakat dan desa tertinggal	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				400.1.4.12	Fasilitasi pengembangan masyarakat dan desa tertinggal	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.1.4.13	Monitoring dan evaluasi Masyarakat tertinggal	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.1.4.14	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.1.5		Pembinaan Lembaga Sosial dan Budaya			
				400.1.5.1	Penguatan kapasitas lembaga lokal	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.1.5.2	Penguatan organisasi masyarakat	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.1.5.3	Pemberdayaan masyarakat	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.1.5.4	Kerjasama antar lembaga sosial dan budaya	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.1.5.5	Ketenagakerjaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.1.5.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan lembaga sosial dan budaya	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.1.5.7	Pemantauan dan evaluasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.1.6		Pengembangan Daerah Khusus			

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				400.1.6.1	Fasilitasi pengembangan Daerah perbatasan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.1.6.2	Fasilitasi pengembangan Daerah rawan konflik dan bencana	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.1.6.3	Fasilitasi pengembangan Daerah Perdesaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.1.6.4	Fasilitasi pengembangan Daerah pulau terpencil dan terluar	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.1.6.5	Fasilitasi pengembangan Wilayah strategis	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.1.6.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan daerah khusus	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.1.6.7	Pemantauan dan evaluasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
		400.2			PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
			400.2.1		Kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.2.2		Pengarusutamaan Gender Ekonomi, Politik Sosial dan Hukum			
				400.2.2.1	Data gender	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				400.2.2.2	Advokasi dan fasilitasi	Terbatas	Tertutup	"Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum"
			400.2.3		Perlindungan Perempuan (Kekerasan, Masalah Sosial, Tenaga Kerja, Korban Perdagangan)			
				400.2.3.1	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.2.3.2	Data perlindungan perempuan	Terbatas	Tertutup	"Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum"
				400.2.3.3	Advokasi dan fasilitasi	Terbatas	Tertutup	"Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum"
				400.2.3.4	Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan perempuan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.2.3.5	Sistem aplikasi dan jaringan informasi gender	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.2.3.6	Analisis dan penyajian informasi gender	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.2.3.7	Partisipasi publik untuk kesejahteraan ibu	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			400.2.4		Perlindungan Anak (Hak Sipil, Masalah Sosial, Kekerasan Terhadap Anak, Anak Berkebutuhan Khusus, Anak Berhadapan Dengan Hukum)			
				400.2.4.1	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.2.4.2	Data perlindungan anak	Terbatas	Tertutup	"Penentu kebijakan, pengawas
								internal dan eksternal serta penegak hukum"
				400.2.4.3	Advokasi dan fasilitasi	Terbatas	Tertutup	"Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum"
				400.2.4.4	Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan anak	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.2.4.5	Partisipasi publik untuk kesejahteraan anak	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.2.5		Tumbuh Kembang Anak (Pendidikan, Kesehatan, Partisipasi, Lingkungan dan Penanaman Nilai-Nilai Luhur, Pengembangan Kota Layak Anak)			

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				400.2.5.1	Pemenuhan Hak Anak	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.2.5.2	Data Klaster Hak Anak	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.2.5.3	Data tumbuh kembang anak	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.2.5.4	Advokasi dan fasilitasi	Terbatas	Tertutup	"Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum"
				400.2.5.5	Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan tumbuh kembang anak	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.2.5.6	Penyelenggaraan parenting pola pengasuhan anak	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.2.6		Penghargaan terkait gender (Anugerah Parahita Ekapraya/APE)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.2.7		Penghargaan Kabupaten Layak Anak	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.2.8		Penghargaan Desa Ramah Perempuan Peduli Anak	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
		400.3			PENDIDIKAN			
			400.3.1		Kebijakan di bidang Pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			400.3.2		Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nonformal, Informal			
				400.3.2.1	Bahan Ajar (Alat Permainan Edukatif)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.3.2.2	Pelatihan Sosial	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.3.2.3	Peringatan Hari anak	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.3.2.4	Block Grant	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.3.3		Pendidikan Masyarakat			
				400.3.3.1	Penyelenggaraan Program	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.3.3.2	Penilaian dan pemberian bantuan sosial	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.3.3.3	Pembinaan Program	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.3.3.4	Lomba/Pemberian Penghargaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.3.3.5	Pameran	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.3.3.6	Rakor	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				400.3.3.7	Sosialisasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.3.3.8	Sertifikasi dan Akreditasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.3.4		Kursus/Pelatihan Pendidik dan Tenaga Pendidik	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.3.5		Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama			
				400.3.5.1	Kurikulum, bahan ajar	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.3.5.2	Block Grant	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.3.5.3	Pelatihan, Bimtek, sosialisasi,	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.3.5.4	Lomba, penghargaan, penganugerahan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.3.5.5	Bantuan operasional sekolah (BOS)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.3.5.6	Bantuan Siswa Miskin	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.3.6		Pendidikan khusus/Layanan Khusus			
				400.3.6.1	Kurikulum, Bahan ajar, alat bantu pembelajaran	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				400.3.6.2	Block Grant	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.3.6.3	Lomba, festival	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.3.6.4	Sosialisasi, bimtek	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.3.6.5	Pendataan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.3.6.6	Kelembagaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.3.7		Pembinaan Pendidik dan Tenaga Pendidik			
				400.3.7.1	Pendataan dan Pemeetaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.3.7.2	Uji Kompetensi Guru	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.3.7.3	Sertifikasi Guru	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.3.7.4	Penghargaan guru dan tenaga kependidikan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.3.7.5	Peningkatan kesejahteraan guru	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				400.3.7.6	Sosialisasi, bimtek	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.3.7.7	Block Grant	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.3.8		Sekolah Menengah Atas			
				400.3.8.1	Kurikulum	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.3.8.2	Bahan Ajar	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.3.8.3	Pelatihan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.3.8.4	Block grant	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.3.8.5	Bimbingan teknis/sosialisasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.3.8.6	Lomba, Sayembara, festival	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.3.8.7	Bantuan operasional Sekolah (BOS)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.3.8.8	Bantuan siswa miskin	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.3.9		Pendidikan Khusus-Layanan Khusus			

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				400.3.9.1	Bahan ajar	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.3.9.2	Petunjuk Teknis	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.3.9.3	Block grant	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.3.9.4	Sosialisasi, bimtek	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.3.9.5	Lomba, sayembara, jambore, festival	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.3.9.6	Kurikulum/bahan pembelajaran	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.3.9.7	Alat bantu pembelajaran	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.3.9.8	Pendataan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.3.9.9	Kelembagaan (Unit kesehatan sekolah, Pendidikan jasmani adaptif, pendidikan inklusi)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.3.10		Pendidik dan Tenaga Pendidik			
				400.3.10.1	Pendataan dan Pemetaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.3.10.2	Uji Kompetensi Guru	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				400.3.10.3	Setifikasi Guru	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.3.10.4	Penilaian prestasi kerja guru dan pengawas sekolah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.3.10.5	Penghargaan guru dan tenaga kependidikan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.3.10.6	Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik		Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.3.10.7	Block grant	Biasa	Terbuka	Pengguna internal
								dan eksternal
				400.3.10.8	Bimbingan teknis/sosialisasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.3.11		Penilaian Pendidikan			
				400.3.11.1	Penilaian Akademik	Terbatas	Tertutup	"Penentu kebijaka, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum"
				400.3.11.2	Penilaian Non Akademik	Terbatas	Tertutup	"Penentu kebijaka, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum"

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				400.3.11.3	Analisis dan Sistem Informasi Penilaian	Terbatas	Tertutup	"Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum"
			400.3.12		Data dan Statistik Pendidikan			
				400.3.12.1	Data peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.3.12.2	Data Satuan Pendidikan dan Proses Pembelajaran	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.3.13		Prasarana dan Sarana Pendidikan			
				400.3.13.1	Prasarana Pendidikan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.3.13.2	Sarana Pendidikan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.3.13.3	Monitoring dan Evaluasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
		400.4			KEOLAHRAGAAN			
			400.4.1		Kebijakan di bidang Keolahragaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.4.2		Pengelolaan Olahraga Pendidikan			
				400.4.2.1	Olahraga Pendidikan Dasar dan Menengah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				400.4.2.2	Olahraga Pendidikan Tinggi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.4.2.3	Olahraga Pendidikan Nonformal dan Informal	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.4.3		Pengelolaan Olahraga Rekreasi			
				400.4.3.1	Olahraga Massal	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.4.3.2	Olahraga Tradisional	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.4.3.3	Olahraga Petualangan, Tantangan dan wisata	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.4.4		Pengelolaan Pembinaan Sentra dan sekolah Khusus Olahraga			
				400.4.4.1	Olahraga Pendidikan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.4.4.2	Olahraga Rekreasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.4.4.3	Olahraga Prestasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.4.4.4	Sekolah Khusus Olahraga	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.4.5		Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus			

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				400.4.5.1	Olahraga Tradisional	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.4.5.2	Layanan Khusus	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.4.6		Kemitraan dan Penghargaan Olahraga			
				400.4.6.1	Kemitraan Keolahragaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.4.6.2	Penghargaan Olahraga	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.4.7		Pembibitan dan IPTEK Olahraga			
				400.4.7.1	Pembibitan Olahraga	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.4.7.2	Kompetisi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.4.7.3	IPTEK Olahraga	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.4.8		Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan			
				400.4.8.1	Tenaga Keolahragaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.4.8.2	Organisasi Keolahragaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.4.9		Industri dan Promosi Olahraga			

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				400.4.9.1	Industri Olahraga	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.4.9.2	Promosi Olahraga	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.4.10		Olahraga Prestasi			
				400.4.10.1	Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.4.10.2	Nasional	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.4.10.3	Internasional	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.4.11		Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga			
				400.4.11.1	Standardisasi Keolahragaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.4.11.2	Akreditasi dan Sertifikasi Keolahragaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.4.11.3	Infrastruktur Olahraga	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
		400.5			KEPEMUDAAN			
			400.5.1		Kebijakan di bidang Kepemudaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.5.2		Peningkatan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda			

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				400.5.2.1	Penelusuran (Duta Kepemudaan)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.5.2.2	Pengkajian (Rekomendasi Kepemudaan melalui forum kepemudaan)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.5.2.3	Pengembangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.5.3		Peningkatan Wawasan Pemuda			
				400.5.3.1	Wawasan Kebangsaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.5.3.2	Wawasan Lingkungan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.5.3.3	Wawasan Sosial dan Hukum	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.5.4		Peningkatan Kapasitas Pemuda			
				400.5.4.1	Kapasitas Iman dan Taqwa	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.5.4.2	Kapasitas IPTEK	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.5.4.3	Pemanfaatan IPTEK	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.5.5		Peningkatan Kreativitas Pemuda (Pemetaan Kreativitas/seni kepemudaan)			

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				400.5.8.2	Pemberdayaan Organisasi Mahasiswa: Kelembagaan dan Sumberdaya	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.5.8.3	Pemberdayaan Organisasi Kepeleajaran: Kelembagaan dan Sumberdaya	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.5.8.4	Pengawasan Kepramukaan: Kelembagaan, Program dan Sumberdaya	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.5.9		Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda			
				400.5.9.1	Standardisasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.5.9.2	Infrastruktur Pemuda	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.5.10		Kemitraan dan Penghargaan Pemuda			
				400.5.10.1	Kemitraan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.5.10.2	Penghargaan Pemuda	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
		400.6			KEBUDAYAAN			
			400.6.1		Kebijakan di bidang Kebudayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.6.2		Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman			
				400.6.2.1	Registrasi Nasional	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				400.6.2.2	Pelindungan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.6.2.3	Pengembangan dan Pemanfaatan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.6.2.4	Eksplorasi dan Dokumentasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.6.3		Pembinaan Kesenian dan Perfilman			
				400.6.3.1	Pembinaan Seni Pertunjukan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.6.3.2	Pembinaan Seni Rupa	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.6.3.3	Pembinaan Seni Literasi dan apresiasi film	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.6.3.4	Dokumentasi dan Publikasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.6.4		Sejarah dan Nilai Budaya			
				400.6.4.1	Sejarah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.6.4.2	Pemetaan nilai	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.6.4.3	Verifikasi dan Perumusan Nilai	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				400.6.4.4	Dokumentasi dan Publikasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.6.4.5	Dokumentasi sejarah dan nilai sejarah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.6.4.6	Publikasi sejarah dan nilai sejarah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.6.5		Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya			
				400.6.5.1	Internalisasi nilai budaya	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.6.5.2	Kekayaan budaya	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.6.5.3	Warisan budaya nasional dan dunia	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.6.5.4	Diplomasi budaya	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
		400.7			KESEHATAN			
			400.7.1		Kebijakan di bidang Kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.7.2		Upaya Kesehatan Dasar			
				400.7.2.1	Pelayanan kedokteran keluarga	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				400.7.2.2	Praktek klinis dokter di pelayanan kesehatan primer	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.7.2.3	Pelaksanaan kesehatan primer	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.7.2.4	Kesehatan gigi dan mulut di puskesmas	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.7.2.5	Kesehatan gigi dan mulut di rumah sakit	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.7.2.6	ICD 10, Destistry & Stomatology	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.7.2.7	Infeksi menular lewat transfusi darah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.7.2.8	Penyakit mulut di tingkat primer	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.7.2.9	Pembiayaan darah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.7.2.10	Pengguna darah rasional	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.7.2.11	Unit transfusi darah, bank darah rumah sakit dan jejaring pelayanan darah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.7.2.12	Pelayanan kesehatan di daerah terpencil, sangat terpencil dan kepulauan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				400.7.2.13	Akreditasi puskesmas	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.7.2.14	Puskesmas berprestasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.7.3		Upaya Kesehatan Rujukan			
				400.7.3.1	Pelayanan kesehatan rujukan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.7.3.2	Pelayanan kedokteran, organisasi profesi dan konsorsium upaya kesehatan (KUK)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.7.3.3	Pelayanan rumah sakit privat	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.7.3.4	Pelayanan kesehatan rumah sakit khusus dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.7.3.5	Pelayanan kesehatan rumah sakit pendidikan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.7.3.6	Pelayanan pasien jaminan kesehatan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.7.3.7	Fasilitas pelayanan kesehatan asing dan perdagangan jasa	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.7.3.8	Badan pengawas rumah sakit	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				400.7.3.9	Perizinan dan penetapan kelas rumah sakit kelas A dan Penanam Modal Asing (PMA)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.7.3.10	Akreditasi rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.7.4		Keperawatan dan keteknisian medik			
				400.7.4.1	Pelayanan Keperawatan Dasar	Biasa	Biasa	Pengguna internal dan eksternal
				400.7.4.2	Pelayanan keperawatan profesional di rumah sakit	Biasa	Biasa	Pengguna internal dan eksternal
				400.7.4.3	Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Umum	Biasa	Biasa	Pengguna internal dan eksternal
				400.7.4.4	Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Khusus	Biasa	Biasa	Pengguna internal dan eksternal
				400.7.4.5	Bina pelayanan kebidanan	Biasa	Biasa	Pengguna internal dan eksternal
			400.7.5		Penunjang medik dan sarana kesehatan			
				400.7.5.1	Mikrobiologi dan imunologi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.7.5.2	Patologi dan toksilologi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.7.5.3	Radiologi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				400.7.5.4	Perizinan dan sertifikasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.7.5.5	Sarana dan prasarana kesehatan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.7.5.6	Peralatan medis di fasilitas pelayanan kesehatan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.7.5.7	Aplikasi sarana dan prasarana alat kesehatan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.7.6		Kesehatan Jiwa			
				400.7.6.1	Kesehatan jiwa di non fasilitas pelayanan kesehatan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum
				400.7.6.2	Bina kesehatan jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum
				400.7.6.3	Etikolegal dan asesmen	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				400.7.6.4	Pencegahan dan penanggulangan narkotika dan sejenisnya	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum
				400.7.6.5	Etikolegal dan asesmen	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum
				400.7.6.6	Kesehatan jiwa kelompok beresiko	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum
			400.7.7		Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra			
				400.7.7.1	Surveilans dan respon kejadian luar biasa	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.7.7.2	Imunisasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.7.7.3	Karantina kesehatan dan kesehatan di pelabuhan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.7.7.4	Kesehatan matra	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.7.8		Pengendalian penyakit menular langsung			

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				400.7.8.1	Pengendalian tuberkolosis	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.7.8.2	Pengendalian AIDS dan penyakit menular seksual	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.7.8.3	Pengendalian infeksi saluran pernafasan akut	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.7.8.4	Pengendalian diare dan infeksi saluran pencernaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.7.8.5	Pengendalian kusta dan frambusia	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.7.9		Pengendalian penyakit bersumber binatang			
				400.7.9.1	Pengendalian malaria	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.7.9.2	Pengendalian arbovirosis	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.7.9.3	Pengendalian zoonosis	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.7.9.4	Pengendalian filariasis dan kecacingan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.7.10		Pengendalian penyakit tidak menular			
				400.7.10.1	Pengendalian penyakit jantung dan pembuluh darah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				400.7.10.2	Pengendalian penyakit diabetes melitus dan penyakit metabolik	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.7.10.3	Penyakit kanker	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.7.10.4	Penyakit kronis dan generatif	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.7.10.5	Gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.7.11		Penyehatan lingkungan			
				400.7.11.1	Penyehatan air dan sanitasi dasar	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.7.11.2	Pemukiman dan tempat umum	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.7.11.3	Kawasan dan sanitasi darurat	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.7.11.4	Higien sanitasi pangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.7.11.5	Pengamanan limbah, udara, radiasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.7.12		Pengembangan dan penapisan teknologi pengendalian penyakit dan pengendalian lingkungan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.7.13		Gizi			

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				400.7.13.1	Gizi makro	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.7.13.2	Gizi mikro	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.7.13.3	Gizi klinik dan diatetik	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.7.13.4	Konsumsi makanan dan jasa makanan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.7.13.5	Kewaspadaan gizi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.7.14		Kesehatan ibu			
				400.7.14.1	Kesehatan ibu hamil	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.7.14.2	Kesehatan ibu bersalin dan nifas	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.7.14.3	Kesehatan maternal dengan pencegahan komplikasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.7.14.4	Keluarga berencana	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.7.14.5	Perlindungan kesehatan reproduksi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.7.15		Kesehatan anak			

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				400.7.15.1	Kelangsungan hidup bayi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.7.15.2	Kelangsungan anak balita dan pra sekolah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.7.15.3	Kewaspadaan penanganan balita beresiko	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.7.15.4	Kualitas hidup anak usia sekolah dan remaja	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.7.15.5	Perlindungan kesehatan anak	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.7.16		Kesehatan Tradisional alternatif dan komplementer			
				400.7.16.1	Kesehatan tradisional keterampilan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.7.16.2	Kesehatan tradisional ramuan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.7.16.3	Kesehatan alternatif dan komplementer	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.7.16.4	Penapisan dan kemitraan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.7.17		Kesehatan kerja dan Olah raga			
				400.7.17.1	Pelayanan kesehatan kerja	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				400.7.17.2	Kapasitas kerja	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.7.17.3	Lingkungan kerja	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.7.17.4	Kemitraan kesehatan kerja	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.7.17.5	Kesehatan perkotaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.7.17.6	Kesehatan olahraga	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.7.18		Obat Publk dan perbekalan kesehatan			
				400.7.18.1	Harga obat publik	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.7.18.2	Pengadaan obat	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.7.18.3	Perbekalan kesehatan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.7.19		Produksi dan distribusi alat kesehatan			
				400.7.19.1	Alat kesehatan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.7.19.2	Produsen dan distributor alat kesehatan dan obat	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				400.7.19.3	Produk diagnostik in vitro dan perbekalan kesehatan rumah tangga	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.7.20		Kefarmasian			
				400.7.20.1	Pelayanan kefarmasian	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.7.20.2	Farmasi klinis	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.7.20.3	Farmasi Komunitas	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.7.20.4	Pengguna obat rasional	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.7.21		Produksi dan distribusi kefarmasian			
				400.7.21.1	Obat tradisional	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.7.21.2	Kosmetik dan makanan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.7.21.3	Narkotika, psikotropika, prekursor farmasi dan sediaan farmasi khusus	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.7.21.4	Kemandirian obat dan bahan baku obat	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.7.22		Surat Keterangan, Sertifikasi dan Perijinan			

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				400.7.22.1	Surat keterangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.7.22.2	Sertifikasi dan perijinan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.7.23		Penanggulangan Krisis Kesehatan			
				400.7.23.1	Pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.7.23.2	Tanggap darurat dan pemulihan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.7.23.3	Pemantauan dan informasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.7.23.4	Penanggulangan krisis kesehatan dalam bidang pengendalian penyakit dan <u>penyehatan</u>	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.7.23.5	Pelayanan kesehatan reproduksi situasi bencana	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.7.24		Pengembangan dan Jaminan Kesehatan			
				400.7.24.1	Tersedianya data NHA setiap tahun	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.7.24.2	Tersedianya dokumen teknis penguatan pelaksanaan JKN	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.7.25		Intelegensia Kesehatan			

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				400.7.25.1	Pemeliharaan dan peningkatan kemampuan inteligensia kesehatan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.7.25.2	Penanggulangan masalah inteligensia kesehatan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.7.26		Kesehatan Haji			
				400.7.26.1	Pelayanan dan pendayagunaan sumber daya kesehatan haji	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.7.26.2	Peningkatan kesehatan dan pengendalian faktor risiko kesehatan haji	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.7.27		Promosi Kesehatan			
				400.7.27.1	Sarana Promosi Kesehatan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.7.27.2	Pembinaan advokasi dan kemitraan serta pemberdayaan peran	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.7.27.3	Pengembangan pesan promosi kesehatan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.7.27.4	Hari Kesehatan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.7.28		Data dan Informasi			
				400.7.28.1	Statistik kesehatan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.7.28.2	Analisis dan diseminasi informasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				400.7.28.3	Pengembangan sistem informasi dan bank data kesehatan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.7.29		Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen			
				400.7.29.1	Penilaian obat tradisional, suplemen makanan dan kosmetik	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.7.29.2	Standardisasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.7.29.3	Inspeksi dan sertifikasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.7.29.4	Obat Asli Indonesia	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.7.30		Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya			
				400.7.30.1	Penilaian keamanan pangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.7.30.2	Standardisasi produk pangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.7.30.3	Inspeksi dan sertifikasi produk pangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.7.30.4	Surveilans dan penyuluhan keamanan pangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				400.7.30.5	Pengawasan produk dan bahan berbahaya	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.7.31		Rekam Medis	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum
		400.8			AGAMA DAN KEPERCAYAAN			
			400.8.1		Kebijakan di bidang Agama dan Kepercayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.8.2		Fasilitasi			
				400.8.2.1	Data Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Prov/Kab/Kota	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.8.2.2	Pelaksanaan Kerukunan Umat Beragama dan Kepercayaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.8.2.3	Pelestarian Nilai-Nilai Keagamaan dan Kepercayaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.8.2.4	Kasus Keagamaan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum
				400.8.2.5	Kasus Aliran Keagamaan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			400.8.3		Pembinaan Kepercayaan Kepada Tuhan YME			
				400.8.3.1	Kelembagaan dan kepercayaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.8.3.2	Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.8.3.3	Komunitas Kepercayaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.8.3.4	Pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.8.3.5	Lingkungan Budaya dan Pranata Sosial	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
		400.9			SOSIAL			
			400.9.1		Kebijakan di bidang Sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.9.2		Kesejahteraan Sosial Anak			
				400.9.2.1	Kesejahteraan sosial anak balita	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.9.2.2	Kesejahteraan sosial anak terlantar	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.9.2.3	Kesejahteraan sosial anak berhadapan dengan hukum	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.9.2.4	Kesejahteraan sosial anak dengan kecatatan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				400.9.2.5	Kesejahteraan sosial anak yang membutuhkan perlindungan khusus	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.9.3		Rehabilitasi Sosial			
				400.9.3.1	Rehabilitasi sosial orang dengan kecacatan tubuh dan bekas penderita penyakit kronis, netra dan rungu wicara, mental	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum
				400.9.3.2	Kelembagaan dan advokasi social	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum
				400.9.3.3	Asistensi dan pemeliharaan kesejahteraan social	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.9.4		Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial			
				400.9.4.1	Gelandangan, pengemis dan pemulung	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.9.4.2	Tuna susila dan korban trafficking perempuan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum
				400.9.4.3	Warga binaan lembaga pasyarakatan meliputi <u>penyiapan, reintegrasi</u>	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.9.4.4	Pelayanan sosial orang dengan HIV / AIDS dan kelompok minoritas	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			400.9.5		Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.9.6		Pelayanan sosial lanjut usia			
				400.9.6.1	Pelayanan sosial dalam dan luar panti	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.9.6.2	Pengembangan kelembagaan meliputi pembinaan lembaga, kerjasama lembaga	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.9.6.3	Advokasi dan pelayanan sosial kedaruratan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.9.7		Pengumpulan dan Pengelolaan sumber dana bantuan sosial	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.9.8		Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.9.9		Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial			
				400.9.9.1	Ketahanan sosial masyarakat meliputi keserasian sosial, penguatan Sumber Daya	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.9.9.2	Tanggap darurat meliputi bantuan darurat, advokasi sosial	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.9.9.3	Pemulihan sosial meliputi penguatan sosial, reintegrasi sosial	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.9.9.4	Kerjasama meliputi kerjasama pemerintah, kerjasama non pemerintah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			400.9.10		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam			
				400.9.10.1	Kesiapsiagaan dan mitigasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.9.10.2	Tanggap darurat meliputi bantuan darurat, advokasi sosial	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.9.10.3	Pemulihan sosial dan penguatan sosial	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.9.10.4	Kerjasama	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.9.11		Jaminan Sosial			
				400.9.11.1	Seleksi dan verifikasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.9.11.2	Asuransi kesejahteraan sosial meliputi kelembagaan, pengelolaan premi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.9.11.3	Bantuan langsung dan tunjangan berkelanjutan meliputi pendampingan dan penyaluran	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.9.11.4	Kerjasama	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.9.12		Pemberdayaan keluarga dan kelembagaan Sosial			
				400.9.12.1	Ketahanan keluarga	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				400.9.12.2	Asistensi keluarga dan pemberdayaan perempuan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.9.12.3	Tenaga kesejahteraan sosial masyarakat dan organisasi sosial	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.9.12.4	Kemitraan dunia usaha	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.9.12.5	Karang taruna meliputi kelembagaan, pengembangan kapasitas	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.9.13		Pemberdayaan komunitas adat terpencil			
				400.9.13.1	Persiapan pemberdayaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.9.13.2	Pemberdayaan sumber daya manusia	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.9.13.3	Penggalian dan pengembangan potensi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.9.13.4	Keserasian dan penguatan komunitas adat terpencil	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.9.13.5	Kerjasama kelembagaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.9.14		Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan			
				400.9.14.1	Identifikasi dan analisis	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				400.9.14.2	Pengembangan kapasitas	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.9.14.3	Penataan sosial lingkungan kumuh	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.9.14.4	Advokasi sosial dan pengembangan aksesibilitas	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.9.14.5	Bantuan Langsung	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.9.14.6	Kerjasama Kelembagaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.9.15		Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial			
				400.9.15.1	Penghargaan dan kesejahteraan keluarga pahlawan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.9.15.2	Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.9.15.3	Pengembangan kesetiakawanan sosial	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.9.15.4	Pengelolaan taman makam pahlawan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
		400.10			PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA			
			400.10.1		Kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			400.10.2		Pemerintahan Desa dan Kelurahan			
				400.10.2.1	Fasilitasi Pengembangan Desa dan Kelurahan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.10.2.2	Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.10.2.3	Fasilitasi Permusyawaratan Desa	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.10.2.4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.10.2.5	Pengembangan Kapasitas Desa	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.10.3		Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat			
				400.10.3.1	Lembaga Masyarakat	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.10.3.2	Pembangunan Partisipatif	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.10.3.3	Pendataan Potensi Masyarakat	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.10.3.4	Pengembangan Kawasan Perdesaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.10.3.5	Pelatihan Masyarakat	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			400.10.4		Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat			
				400.10.4.1	Budaya Nusantara	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.10.4.2	Pemberdayaan Perempuan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.10.4.3	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.10.4.4	Kesejahteraan Sosial	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.10.4.5	Tenaga Kerja Perdesaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.10.5		Usaha Ekonomi Masyarakat			
				400.10.5.1	Usaha Pertanian dan Pangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.10.5.2	Usaha Perkreditan dan Simpan Pinjam	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.10.5.3	Produksi dan Pemasaran	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.10.5.4	Usaha Ekonomi dan Keluarga	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.10.5.5	Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			400.10.6		Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna Perdesaan			
				400.10.6.1	Fasilitas Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan Perdesaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.10.6.2	Fasilitas Pemanfaatan Lahan dan Pesisir Perdesaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.10.6.3	Fasilitas Prasarana dan Sarana Perdesaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.10.6.4	Fasilitas Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Perdesaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.10.6.5	Pemasyarakatan dan Kerjasama Teknologi Perdesaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.10.7		Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
		400.11			PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN			
			400.11.1		Kebijakan di bidang Pertamanan dan Pemakaman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.11.2		Pertamanan			
				400.11.2.1	Perencanaan Pertamanan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.11.2.2	Taman Kota	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				400.11.2.3	Tata Hias dan Ornamen Kota	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.11.3		Pemakaman			
				400.11.3.1	Perencanaan Pemakaman	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.11.3.2	Pemakaman	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.11.3.3	Pelayanan Pemakaman	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.11.4		Jalur Hijau			
				400.11.4.1	Perencanaan Jalur Hijau	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.11.4.2	Jalur Hijau Jalan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.11.4.3	Jalur Hijau Penyempurna dan Tepian Air	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.11.5		Peran Serta Masyarakat	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.11.6		Pengawasan dan Penindakan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.11.7		Pengelolaan Data	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			400.11.8		Evaluasi dan Pelaporan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
		400.12			KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL			
			400.12.1		Kebijakan di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.12.2		Pendaftaran Penduduk			
				400.12.2.1	Identitas Penduduk	Terbatas	Tertutup	"Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum"
				400.12.2.2	Pindah Datang Penduduk Dalam Wilayah NKRI	Terbatas	Tertutup	"Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum"
				400.12.2.3	Pindah Datang Penduduk Antar Negara	Terbatas	Tertutup	"Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum"
				400.12.2.4	Pendataan Penduduk Rentan	Terbatas	Tertutup	"Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum"

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				400.12.2.5	Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi	Terbatas	Tertutup	"Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum"
			400.12.3		Pencatatan Sipil			
				400.12.3.1	Kelahiran dan Kematian	Terbatas	Tertutup	"Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum"
				400.12.3.2	Perkawinan dan Perceraian	Terbatas	Tertutup	"Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum"
				400.12.3.3	Pengangkatan Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubahan	Terbatas	Tertutup	"Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum"
				400.12.3.4	Pencatatan Kewarganegaraan	Terbatas	Tertutup	"Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum"
				400.12.3.5	Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi	Terbatas	Tertutup	"Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum"

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			400.12.4		Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			
				400.12.4.1	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Terbatas	Tertutup	"Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum"
				400.12.4.2	Kelembagaan Informasi Administrasi Kependudukan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.12.4.3	Pengelolaan data Administrasi Kependudukan	Terbatas	Tertutup	"Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum"
				400.12.4.4	Penyajian dan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan	Terbatas	Tertutup	"Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum"
				400.12.4.5	Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.12.5		Pengembangan Kebijakan Kependudukan			
				400.12.5.1	Kuantitas Penduduk	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.12.5.2	Kualitas Penduduk	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				400.12.5.3	Mobilitas Penduduk	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.12.5.4	Perlindungan dan Pemberdayaan Penduduk	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.12.5.5	Pengembangan Wawasan Kependudukan, Monitoring dan Evaluasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.12.6		Penyerasian Kependudukan			
				400.12.6.1	Indikator Kependudukan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.12.6.2	Proyeksi Penduduk	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.12.6.3	Perencanaan Kependudukan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.12.6.4	Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Non Pemerintah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.12.6.5	Pelaksanaan Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Pemerintah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
		400.13			KELUARGA BERENCANA			
			400.13.1		Kebijakan di bidang Keluarga Berencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.13.2		Analisis pengaduan kebijakan pengendalian penduduk			
				400.13.2.1	Pengumpulan dan pengolahan data	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				400.13.2.2	Evaluasi dan pelaporan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.13.3		Fasilitas pengaduan kebijakan pengendalian penduduk			
				400.13.3.1	Penyiapan fasilitas	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.13.3.2	Evaluasi dan pelaporan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.13.4		Profil dan proyeksi penduduk			
				400.13.4.1	Data profil dan proyeksi penduduk	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.13.4.2	Evaluasi data profil dan proyeksi penduduk	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.13.5		Penetapan parameter pengendalian penduduk			
				400.13.5.1	Penetapan sasaran parameter	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.13.5.2	Evaluasi sasaran parameter	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.13.6		Pemanfaatan perencanaan pengendalian penduduk			
				400.13.6.1	Pemanfaatan profil dan proyeksi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.13.6.2	Pemanfaatan parameter	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			400.13.7		Pengembangan Sistem			
				400.13.7.1	Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Formal	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.13.7.2	Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.13.8		Pengembangan Materi			
				400.13.8.1	Pengembangan Materi Jalur Pendidikan Formal	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.13.8.2	Pengembangan Materi Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.13.9		Monitoring dan Evaluasi			
				400.13.9.1	Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Formal	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.13.9.2	Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.13.10		Analisis Sosial	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.13.11		Analisis Ekonomi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.13.12		Analisis Dampak Politik, Pertahanan dan Keamanan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.13.13		Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			400.13.14		Bina Keluarga Berencana Rumah Sakit dan Klinik Pemerintah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.13.15		Jaminan pelayanan dan penyediaan sarana keluarga berencana	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.13.16		Kualitas pelayanan keluarga berencana pemerintah			
				400.13.16.1	Standarisasi pelayanan keluarga berencana pemerintah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.13.16.2	Monitoring dan evaluasi pelayanan keluarga berencana pemerintah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.13.17		Bina keluarga berencana rumah sakit dan klinik swasta	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.13.18		Jaminan dan ketersediaan sarana keluarga berencana swasta	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.13.19		Kualitas pelayanan keluarga berencana swasta			
				400.13.19.1	Standarisasi pelayanan keluarga berencana swasta	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.13.19.2	Monitoring dan Evaluasi pelayanan keluarga berencana swasta	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.13.20		Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana jalur wilayah tertinggal, terpencil dan perbatasan			

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				400.13.20.1	Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.13.20.2	Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.13.21		Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan			
				400.13.21.1	Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.13.21.2	Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.13.22		Kesertaan keluarga berencana pria			
				400.13.22.1	Peningkatan akses keluarga berencana pria	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.13.22.2	Peningkatan partisipasi keluarga berencana pria	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.13.23		Kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.13.24		Pencegahan PMS dan HIV/AIDS	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.13.25		Pencegahan kanker alat reproduksi dan penanggulangan infertilitas	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			400.13.26		Pelebagaan bina keluarga Balita dan anak			
				400.13.26.1	Pengembangan kelompok bina keluarga Balita dan anak	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.13.26.2	Pengembangan kemitraan bina keluarga dan anak	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.13.27		Monitoring dan evaluasi bina keluarga Balita dan anak			
				400.13.27.1	Monitoring bina keluarga Balita dan anak	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.13.27.2	Evaluasi dan pelaporan bina keluarga Balita dan anak	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.13.28		Pelebagaan bina ketahanan remaja			
				400.13.28.1	Pelebagaan bina ketahanan remaja jalur pendidikan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.13.28.2	Pelebagaan bina ketahanan remaja jalur masyarakat	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.13.29		Monitoring dan evaluasi bina ketahanan remaja			
				400.13.29.1	Monitoring bina ketahanan remaja	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.13.29.2	Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan remaja	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			400.13.30		Pengembangan Program Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan			
				400.13.30.1	Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Lansia	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.13.30.2	Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Rentan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.13.31		Pelebagaan Bina Ketahanan keluarga Lansia dan Rentan			
				400.13.31.1	Pengembangan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.13.31.2	Pengembangan Kemitraan Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.13.32		Monitoring dan evaluasi bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan			
				400.13.32.1	Monitoring Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.13.32.2	Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.13.33		Pengembangan program usaha ekonomi keluarga	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.13.34		Peningkatan teknologi dan permodalan usaha ekonomi keluarga	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.13.35		Peningkatan manajemen usaha ekonomi keluarga			

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				400.13.35.1	Pengembangan administrasi dan keuangan kelompok usaha ekonomi keluarga	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.13.35.2	Pengembangan pemasaran kelompok usaha ekonomi keluarga	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.13.36		Monitoring dan evaluasi usaha ekonomi keluarga	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.13.37		Pengembangan Program Pusat pelayanan Keluarga Sejahtera	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.13.38		Pelebagaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera			
				400.13.38.1	Pengembangan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.13.38.2	Pengembangan Kemitraan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.13.39		Monitoring dan Evaluasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera			
				400.13.39.1	Monitoring Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.13.39.2	Evaluasi dan pelaporan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.13.40		Pengembangan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi			
				400.13.40.1	Perencanaan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				400.13.40.2	Evaluasi dan pelaporan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.13.41		Advokasi dan pencitraan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.13.42		Komunikasi, Informasi dan Edukasi			
				400.13.42.1	Promosi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.13.42.2	Sarana produksi media komunikasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.13.42.3	Produk media komunikasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.13.43		Hubungan dengan lembaga pemerintah pusat dan provinsi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.13.44		Hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota			
				400.13.44.1	Pengembangan hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.13.44.2	Penguatan hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.13.45		Hubungan dengan lembaga nonpemerintah			
				400.13.45.1	Pengembangan hubungan dengan lembaga nonpemerintah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				400.13.45.2	Penguatan hubungan dengan lembaga nonpemerintah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.13.46		Tenaga Lini Lapangan			
				400.13.46.1	Pengembangan tenaga lini lapangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.13.46.2	Monitoring dan evaluasi tenaga lini lapangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.13.47		Institusi Masyarakat Pedesaan			
				400.13.47.1	Pengembangan institusi masyarakat pedesaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.13.47.2	Monitoring dan evaluasi institusi masyarakat pedesaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.13.48		Mekanisme Operasional lini lapangan			
				400.13.48.1	Pengembangan mekanisme operasional lini lapangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.13.48.2	Monitoring dan evaluasi mekanisme operasional lini lapangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.13.49		Pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan			
				400.13.49.1	Perumusan pola sistem pencatatan dan pelaporan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.13.49.2	Monitoring dan evaluasi sistem pencatatan dan pelaporan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			400.13.50		Pengumpulan dan pengolahan data	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.13.51		Analisis dan evaluasi			
				400.13.51.1	Analisis dan evaluasi pengendalian penduduk	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.13.51.2	Analisis dan evaluasi keluarga berencana dan keluarga sejahtera	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.13.52		Sistem aplikasi dan bank data			
				400.13.52.1	Pengembangan sistem aplikasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.13.52.2	Pengelolaan bank data	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.13.53		Infrastruktur teknologi informasi			
				400.13.53.1	Pengembangan infrastruktur teknologi informasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.13.53.2	Pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.13.54		Dokumentasi dan penyebarluasan informasi			
				400.13.54.1	Dokumentasi dan perpustakaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.13.54.2	Pengelolaan situs BKKBN dan media konferensi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
		400.14			HUBUNGAN MASYARAKAT			

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			400.14.1		Keprotokolan			
				400.14.1.1	Penyelenggaraan acara kedinasan (upacara, pelantikan, peresmian, dan jamuan termasuk acara peringatan hari-hari besar)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.14.1.2	Buku tamu Keprotokolan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.14.1.3	Agenda kegiatan pimpinan daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.14.1.4	Kunjungan dinas dalam dan luar negeri	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.14.2		Daftar nama/alamat kantor /pejabat	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.14.3		Dokumentasi/ liputan kegiatan dinas pimpinan, acara kedinasan dan peristiwa- peristiwa bidang masing- masing, dalam berbagai media: kertas, foto/ video/ rekaman suara/ multi media	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.14.4		Pengumpulan, pengolahan dan penyajian informasi kelembagaan			
				400.14.4.1	Kliping koran	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				400.14.4.2	Brosur /Leaflet/poster /plakat	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			400.14.8		Penerbitan Majalah, buletin, koran dan jurnal	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.14.9		Publikasi melalui media cetak maupun elektronik	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.14.10		Pameran /sayemara/lomba/festival, pembuatan spanduk dan iklan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.14.11		Penghargaan/ tanda kenang-kenangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			400.14.12		Ucapan Terimakasih, Ucapan Selamat, Bela Sungkawa, Permohonan Maaf	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
	500				PEREKONOMIAN			
		500.1			KETAHANAN PANGAN			
			500.1.1		Kebijakan di bidang Ketahanan Pangan yang dilakukan Pemerintah Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.1.2		Ketersediaan dan Kerawanan Pangan			
				500.1.2.1	Ketersediaan Pangan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawas an internal dan eksternal serta penegak hukum
				500.1.2.2	Akses Pangan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawas an internal dan eksternal serta penegak hukum

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				500.1.2.3	Kerawanan Pangan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawas an internal dan eksternal serta penegak hukum
			500.1.3		Distribusi dan Cadangan Pangan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawas an internal dan eksternal serta penegak hukum
				500.1.3.1	Distribusi Pangan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawas an internal dan eksternal serta penegak hukum
				500.1.3.2	Harga Pangan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawas an internal dan eksternal serta penegak hukum
				500.1.3.3	Cadangan Pangan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawas an internal
								dan eksternal serta penegak hukum
			500.1.4		Penganekaragaman Konsumsi dan Ketahanan Pangan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawas an internal dan eksternal serta penegak hukum

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				500.1.4.1	Konsumsi Pangan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawas an internal dan eksternal serta penegak hukum
				500.1.4.2	Penganekaragaman Pangan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawas an internal dan eksternal serta penegak hukum
				500.1.4.3	Keamanan Pangan Segar	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawas an internal dan eksternal serta penegak hukum
			500.1.5		Penguatan Kelembagaan Ketahanan Pangan			
				500.1.5.1	Dewan Ketahanan Pangan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawas an internal dan eksternal serta penegak hukum
				500.1.5.2	Penghargaan Ketahan Pangan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawas an internal dan eksternal serta penegak hukum
			500.1.6		Swasembada Pangan (Kearifan Lokal)	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawas an internal dan eksternal serta penegak hukum

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			500.1.7		Bimbingan Teknis	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.1.8		Evaluasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
		500.2			PERDAGANGAN			
			500.2.1		Kebijakan di bidang Perdagangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.2.2		Perdagangan Dalam Negeri			
				500.2.2.1	Bina Usaha Kelembagaan dan Penguatan Usaha	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.2.2.2	Bisa Usaha Jasa Perdagangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.2.2.3	Bina Usaha Dagang Asing dan Keagenan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.2.2.4	Informasi Perusahaan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawas an internal dan eksternal serta penegak hukum
				500.2.2.5	Pelaku Pasar	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.2.2.6	Iklim Usaha dan Bimbingan Teknis Usaha Dagang Kecil Menengah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				500.2.2.7	Fasilitasi Usaha dan Pemasaran Usaha Dagang Kecil Menengah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.2.2.8	Pengembangan Produk Lokal	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.2.2.9	Pencitraan Produk Dalam Negeri	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.2.2.10	Pengembangan Sarana Distribusi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.2.2.11	Pengelolaan Sarana Distribusi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.2.2.12	Kerjasama Pengembangan Sistem Logistik	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.2.2.13	Informasi dan Bimbingan Teknis Penyedia Jasa Logistik	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.2.2.14	Informasi Pasar	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.2.2.15	Informasi Hasil Industri	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.2.2.16	Barang Strategis	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.2.2.17	Bahan Pokok Agro	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				500.2.3.11	Jasa	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.2.3.12	Kerjasama	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.2.3.13	Sarana dan Kerjasama	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.2.3.14	Kelembagaan dan dan penilaian	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.2.3.15	UTTP dan Standar Ukuran	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.2.3.16	Pengawasan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.2.3.17	Balai pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.2.3.18	Balai Pengujian UTTP	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.2.4		Perdagangan Berjangka Komoditi			
				500.2.4.1	Pengkajian pasar	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.2.4.2	Pengawasan Transaksi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				500.2.4.3	Pengawasan Keuangan dan Audit	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.2.4.4	Pengkajian pasar	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.2.4.5	Pengembangan Pasar	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.2.4.6	Sistem informasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.2.4.7	Pembinaan pasar lelang dan sistem resi gudang	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.2.4.8	Pengawasan pasar lelang	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.2.4.9	Pengawasan sistem gudang	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.2.5		Bimbingan Teknis	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.2.6		Evaluasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
		500.3			KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH			
			500.3.1		Kebijakan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.3.2		Kelembagaan Koperasi dan UKM			

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				500.3.2.1	Organisasi dan Badan Hukum Koperasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.3.2.2	Tata Laksana Koperasi dan UKM	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.3.2.3	Keanggotaan Koperasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.3.2.4	Pengendalian dan Akuntabilitas	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.3.3		Produksi			
				500.3.3.1	Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.3.3.2	Kehutanan dan Perkebunan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.3.3.3	Perikanan dan Peternakan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.3.3.4	Industri Kerajinan dan Pertambangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.3.3.5	Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.3.4		Pembiayaan			
				500.3.4.1	Program Pendanaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				500.3.4.2	Pengembangan dan Pengendalian Simpan Pinjam	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.3.4.3	Urusan Permodalan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.3.4.4	Asuransi dan Jasa Keuangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.3.4.5	Pembiayaan dan Penjaminan Kredit	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.3.4.6	Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUKM (LPDB)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.3.5		Pemasaran dan Jaringan Usaha			
				500.3.5.1	Perdagangan Dalam Negeri	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.3.5.2	Ekspor dan Impor	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.3.5.3	Sarana dan Prasarana Pemasaran	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.3.5.4	Kemitraan dan Jaringan Usaha	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.3.5.5	Informasi dan Publikasi Bisnis	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.3.5.6	Lembaga Layanan Pemasaran LLP Koperasi dan UKM	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			500.3.6		Pengembangan Sumber Daya Manusia			
				500.3.6.1	Pengembangan Kewirausahaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.3.6.2	Kebijakan Pendidikan Koperasi dan UKM	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.3.6.3	Peran Serta Masyarakat	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.3.6.4	Monitoring dan Evaluasi Diklat Koperasi dan UKM	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.3.6.5	Advokasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.3.7		Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha			
				500.3.7.1	Produktifitas dan Mutu	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.3.7.2	Restrukturisasi Usaha	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.3.7.3	Pemberdayaan Lembaga Pengembangan Bisnis (LPB)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.3.7.4	Fasilitasi Investasi UKMK	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.3.7.5	Pengembangan Sarana Bisnis	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			500.3.8		Pengkajian Sumber Daya UKMK			
				500.3.8.1	Penelitian Koperasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.3.8.2	Penelitian UKM	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.3.8.3	Penelitian Sumber Daya	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.3.8.4	Pengembangan Perkaderan UMK	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.3.9		Kerja Sama Hubungan Antar Lembaga	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.3.10		Pedagang Kaki Lima (PKL)			
				500.3.10.1	Peraturan Perundang- Undangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.3.10.2	Sarana dan Prasarana	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.3.11		Monitoring dan Evaluasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
		500.4			KEHUTANAN			
			500.4.1		Kebijakan di bidang Kehutanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.4.2		Penyuluhan			

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				500.4.2.1	Program Kerja Penyuluhan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.4.2.2	Materi Penyuluhan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.4.2.3	Program Penyuluhan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.4.2.4	Sarana Penyuluhan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.4.2.5	Pengembangan Tenaga Penyuluhan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.4.2.6	Pelaksanaan Penyuluhan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.4.2.7	Pemberdayaan Masyarakat	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.4.2.8	Deseminasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.4.2.9	Evaluasi, dan Laporan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.4.3		Planologi Kehutanan			
				500.4.3.1	Perencanaan Makro Kawasan Hutan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawas an internal dan eksternal serta penegak hukum

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				500.4.3.2	Penataan Ruang Kawasan Hutan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawas an internal dan eksternal
								serta penegak hukum
				500.4.3.3	Statistik dan Jaringan Komunikasi Data Kehutanan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.4.3.4	Pengukuhan dan Penataaan Kawasan Hutan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawas an internal dan eksternal serta penegak hukum
				500.4.3.5	Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawas an internal dan eksternal serta penegak hukum
				500.4.3.6	Informasi dan Dokumentasi Kawasan Hutan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawas an internal dan eksternal serta penegak hukum
				500.4.3.7	Inventarisasi Sumber Daya Hutan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawas an internal dan eksternal serta penegak hukum

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				500.4.3.8	Pemantauan Sumber Daya Hutan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawas an internal dan eksternal serta penegak hukum
				500.4.3.9	Pemetaan Sumber Daya Hutan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawas an internal dan eksternal serta penegak hukum
				500.4.3.10	Jaringan Data Spasial	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawas an internal dan eksternal serta penegak hukum
				500.4.3.11	Pengguna Kawasan Hutan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawas an internal dan eksternal serta penegak hukum
				500.4.3.12	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pengguna Kawasan Hutan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.4.3.13	Informasi Pengguna Kawasan Hutan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.4.3.14	Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawas an internal dan eksternal serta penegak hukum

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				500.4.3.15	Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawas an internal dan eksternal serta penegak hukum
				500.4.3.16	Informasi Wilayah Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasan internal dan eksternal serta penegak hukum
			500.4.4		Bina Usaha Kehutanan			
				500.4.4.1	Data areal HPH /HTI/IUPHHK	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawas an internal dan eksternal serta penegak hukum
				500.4.4.2	SK HPH/HTI/IUPHHK	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawas an internal dan eksternal serta penegak hukum
				500.4.4.3	Kerjasama	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawas an internal dan eksternal serta penegak hukum
				500.4.4.4	Pembatalan/Penolakan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawas an internal dan eksternal serta penegak hukum

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				500.4.4.5	Perpanjangan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawas an internal dan eksternal serta penegak hukum
				500.4.4.6	Modal dan Peralatan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawas an internal dan eksternal serta penegak hukum
				500.4.4.7	Investasi Industri	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.4.4.8	Peralatan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.4.4.9	Tenaga Kerja	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.4.4.10	Pemegang Saham	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.4.4.11	Neraca Perusahaan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawas an internal dan eksternal serta <u>penegak hukum</u>
				500.4.4.12	Rencana Karya Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawas an internal dan eksternal serta penegak hukum

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				500.4.4.13	Rencana Karya Pengusahaan Hutan (RKPH)	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawas an internal dan eksternal serta penegak hukum
				500.4.4.14	Rencana Karya Tahunan Pengusahaan Hutan (RKT)	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawas an internal dan eksternal serta penegak hukum
				500.4.4.15	Rencana Karya Lima Tahun Pengusahaan Hutan (RKL)	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawas an internal dan eksternal serta penegak hukum
				500.4.4.16	Target Produksi RKT dan Beban Kerja	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasan internal dan eksternal serta penegak hukum
				500.4.4.17	Produksi Kayu	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawas an internal dan eksternal serta penegak hukum
				500.4.4.18	Produksi non kayu	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawas an internal dan eksternal serta penegak hukum

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				500.4.4.19	Industri Kayu HPH/HTI/IUPHHK	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawas an internal dan eksternal serta penegak hukum
				500.4.4.20	Industri Kayu Non HPH/HTI/IUPHHK	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawas an internal dan eksternal serta penegak hukum
				500.4.4.21	Industri Non Kayu	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawas an internal dan eksternal serta penegak hukum
				500.4.4.22	Hutan Tanaman Industri Pulp	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawas an internal dan eksternal serta penegak hukum
				500.4.4.23	Hutan Tanaman Industri Pertukangan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawas an internal dan eksternal serta penegak hukum
				500.4.4.24	Pelanggaran dan Sanksi	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawas an internal dan eksternal serta penegak hukum
				500.4.4.25	Pemblokiran	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawas an

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								internal dan eksternal serta penegak hukum
				500.4.4.26	Denda	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.4.4.27	Pencabutan Areal HPH/HTI/IUPHHK	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawas an internal dan eksternal serta penegak hukum
				500.4.4.28	Pola Pemanfaatan Hutan Produksi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.4.4.29	Penataan Pemanfaatan Hutan Produksi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.4.4.30	Informasi Sumber Daya Hutan Produksi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.4.4.31	Pengembangan Investasi Usaha	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.4.4.32	Penyiapan Pemanfaatan Hutan Alam	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.4.4.33	Rencana Kerja Pemanfaatan Hutan Alam/Rencana Kerja Usaha Produksi Hasil	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.4.4.34	Produksi Hutan Alam	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				500.4.4.35	Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Alam	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.4.4.36	Pengembangan Hutan Tanaman Industri	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.4.4.37	Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.4.4.38	Pengembangan Rencana Kerja dan Produksi Hutan Tanaman/Rencana Kerja Usaha Produksi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.4.4.39	Penilaian Kinerja Pengembangan Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.4.4.40	Pembiayaan Hutan Tanaman	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.4.4.41	Penerimaan Negara Bukan Pajak Hasil Hutan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.4.4.42	Peredaran Hasil Hutan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.4.4.43	Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.4.4.44	Penertiban Peredaran Hasil Hutan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				500.4.4.45	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawas an internal dan eksternal serta penegak hukum
				500.4.4.46	Pengendalian Bahan Baku dan Industri Primer Hasil Hutan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawas an internal dan eksternal serta penegak hukum
				500.4.4.47	Penilaian Kinerja Industri dan Pemasaran Hasil Hutan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawas an internal dan eksternal serta penegak hukum
				500.4.4.48	Pembinaan HPH/HTI/IUPHHK	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawas an internal dan eksternal serta penegak hukum
				500.4.4.49	Pembinaan TPTI/TPTJ/Silvikultur	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.4.5		Standardisasi dan Lingkungan			
				500.4.5.1	Standardisasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.4.5.2	Sarana Pengujian Hasil Hutan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.4.5.3	Pengembangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				500.4.5.4	Pemasaran Hasil Hutan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.4.5.5	Pengendalian Lingkungan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.4.5.6	Angkutan Hasil Hutan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.4.5.7	Tanda Pengenal Perusahaan Tata Usaha Hasil Hutan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.4.5.8	Legalitas Tata Usaha Hasil Hutan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.4.5.9	Palu Tok Kualitas Tata Usaha Hasil Hutan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.4.5.10	Pass Angkutan Hasil Hutan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.4.5.11	Sertifikat Ekspor Hasil Hutan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawas an internal dan eksternal serta penegak hukum
			500.4.6		Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam			
				500.4.6.1	Flora dan Fauna yang Dilindungi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.4.6.2	Flora dan Fauna yang Tidak Dilindungi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				500.4.6.3	Lembaga Konservasi/Kebun Binatang	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.4.6.4	Konvensi Keaneekaragaman Hayati	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.4.6.5	Kawasan Konservasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.4.6.6	Pengamanan Hutan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.4.6.7	Program dan Evaluasi Penyidikan dan Perlindungan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.4.6.8	Penyidikan dan Perlindungan Wilayah Hutan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.4.6.9	Polisi Kehutanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.4.6.10	Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.4.6.11	Bina Cinta Alam	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.4.6.12	Kader Konservasi Sumber Daya Alam	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.4.6.13	Data organisasi pencinta alam dan kader konservasi SDA	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			500.4.7		Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial			
				500.4.7.1	Pengelolaan Benih	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.4.7.2	Kebun Benih	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.4.7.3	Tegakan Benih	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.4.7.4	Pengadaan Benih	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.4.7.5	Pengujian dan Penyimpanan Benih	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.4.7.6	Lalu Lintas Angkutan Benih	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.4.7.7	Pembibitan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.4.7.8	Lalu Lintas Angkutan Benih	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.4.7.9	Pengembangan Usaha Perbenihan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.4.7.10	Pengendalian Peredaran Benih	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				500.4.7.11	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.4.7.12	Tanaman Reboisasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.4.7.13	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.4.7.14	Perhutanan Sosial	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.4.7.15	Pengendalian Perladangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.4.8		Penelitian dan Pengembangan Kehutanan			
				500.4.8.1	Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Kehutanan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.4.8.2	Monitoring dan Evaluasi Penelitian	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.4.8.3	Diseminasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.4.8.4	Gelar Teknologi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.4.8.5	Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
		500.5			KELAUTAN DAN PERIKANAN			

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			500.5.1		Kebijakan di bidang Kelautan dan Perikanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.5.2		Perikanan Tangkap			
				500.5.2.1	Data dan Statistik Perikanan Tangkap	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.5.2.2	Rancang Bangun dan Kelaikan Kapal Perikanan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.5.2.3	Rancang Bangun dan Kelaikan Alat Tangkap Ikan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.5.2.4	Pendaftaran Kapal Perikanan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.5.2.5	Pengawakan Kapal dan Ketenagakerjaan Perikanan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.5.2.6	Perbantuan dan Evaluasi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.5.2.7	Alokasi Usaha Penangkapan Ikan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.5.2.8	Tata Pengusahaan Penangkapan Ikan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.5.2.9	Verifikasi Dokumen Penangkapan Ikan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.5.2.10	Pelayanan Dokumen Penangkapan Ikan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				500.5.2.11	Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.5.2.12	Kelembgaan Usaha Penangkapan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.5.2.13	Investasi dan Permodalan Usaha	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.5.2.14	Kenelayanan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.5.2.15	Pembinaan Pengelolaan Usaha	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.5.2.16	Pemantauan dan Evaluasi Usaha Penangkapan Ikan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.5.3		Perikanan Budidaya			
				500.5.3.1	Potensi Lahan dan Air	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.5.3.2	Prasarana dan Sarana Budidaya Air Tawar	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.5.3.3	Pengelolaan Induk Perbenihan ikan air tawar	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.5.3.4	Perbenihan Skala Kecil	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.5.3.5	Informasi dan Distribusi Pembenihan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				500.5.3.6	Budidaya Air Tawar	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.5.3.7	Budidaya Ikan Hias	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.5.3.8	Sertifikasi Budidaya Perikanan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.5.3.9	Data dan Statistik Perikanan Budidaya	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.5.3.10	Hama dan Penyakit Ikan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.5.3.11	Perlindungan Lingkungan Budidaya	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.5.3.12	Investasi dan Permodalan Usaha Budidaya	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.5.3.13	Kewirausahaan Budidaya	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.5.3.14	Pelayanan Usaha Budidaya	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.5.3.15	Kelembagaan dan Ketenagaakerjaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.5.3.16	Promosi Usaha dan Budaya	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			500.5.4		Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan			
				500.5.4.1	Standarisasi Pengolahan Hasil	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.5.4.2	Pengembangan Produk	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.5.4.3	Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.5.4.4	Industri Pengolahan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.5.4.5	Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.5.4.6	Standarisasi Pengembangan Produk Non Konsumsi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.5.4.7	Promosi dan Jaringan Ikan Hias	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.5.4.8	Pengembangan Industri	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.5.4.9	Sarana dan Prasarana Pengembangan Produk Non Konsumsi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.5.4.10	Kelembagaan Pemasaran Dalam Negeri	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				500.5.4.11	Analisis dan Informasi Pasar Dalam Negeri	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.5.4.12	Jaringan Distribusi dan Kemitraan Pemasaran Dalam Negeri	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.5.4.13	Promosi dan Kerja Sama Pemasaran Dalam Negeri	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.5.4.14	Sarana dan Prasarana Pemasaran Dalam Negeri	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.5.4.15	Kelembagaan Pemasaran Luar Negeri	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.5.4.16	Analisis dan Informasi Pemasaran Luar Negeri	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.5.4.17	Pengembangan Ekspor	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.5.4.18	Pengembangan Impor	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.5.4.19	Promosi dan Kerja Sama Pemasaran Luar Negeri	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.5.4.20	Pelayanan Usaha	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.5.4.21	Kemitraan Usaha	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				500.5.4.22	Ketenagakerjaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.5.4.23	Pengolahan dan Pemasaran Investasi dan Permodalan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.5.4.24	Informasi dan Promosi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.5.6		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan			
				500.5.6.3	Pengawasan Pengangkutan, pengolahan dan Pemasaran	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan, Pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum
				500.5.6.4	Pengawasan Usaha Budidaya	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan, Pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum
				500.5.6.6	Pengawasan Pencemaran Perairan	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan, Pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum
				500.5.6.15	Pemantauan Sumber Daya Perikanan	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan, Pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				500.5.6.16	Pembangun Infrastruktur Pengawasan	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan, Pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum
			500.5.7		Karantina Ikan			
				500.5.7.1	Pemeriksaan Ikan	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan, Pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum
				500.5.7.2	Penahanan	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan, Pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum
				500.5.7.3	Pengasingan	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan, Pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum
				500.5.7.4	Pengamatan	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan, Pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum
				500.5.7.5	Pengakuan	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan, Pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				500.5.7.6	Penolakan	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan, Pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum
				500.5.7.7	Pemusnahan	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan, Pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum
				500.5.7.8	Persyaratan Lalu Lintas Pemasukan	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan, Pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum
				500.5.7.9	Persyaratan Lalu Lintas Pengeluaran	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan, Pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum
				500.5.7.10	Pemohonan Sertifikat	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan, Pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum
				500.5.7.11	Pemasukan Formulir	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan, Pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				500.5.7.12	Pemasukan Sertifikat	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan, Pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum
				500.5.7.13	Evaluasi dan Monitoring Sertifikat	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan, Pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum
				500.5.7.14	Surat Perintah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan, Pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum
				500.5.7.15	Rekomendasi	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan, Pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum
				500.5.7.16	Penutupan Suatu Area	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan, Pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum
				500.5.7.17	Pelanggaran Lalu Lintas Ikan	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan, Pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				500.5.7.18	Pengawasan Peraturan Perkarantinaan	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan, Pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum
				500.5.7.19	Pengawasan Pelaksanaan Operasional	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan, Pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum
				500.5.7.20	Instalasi Karantina Sementara	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan, Pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum
				500.5.7.21	Lokasi Karantina	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan, Pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum
		500.6			PERTANIAN			
			500.6.1		Kebijakan di bidang Pertanian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.6.2		Perlindungan hortikultura	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.6.2.1	Perlindungan Tanaman Buah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.6.2.2	Perlindungan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				500.6.2.3	Perlindungan Tanaman Florikultura	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.6.2.4	Dampak iklim dan Persyaratan Teknis	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.6.3		Perbenihan Hortikultura			
				500.6.3.1	Penilaian Varietas	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.6.3.2	Pengawasan Mutu Benih	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.6.3.3	Budidaya dan Pascapanen Florikultura	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.6.4		Perluasan dan Pengelolaan Lahan			
				500.6.4.1	Basis Data Lahan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.6.4.2	Pengendalian Lahan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.6.4.3	Optimasi, Rehabilitasi dan Konservasi Lahan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.6.4.4	Perluasan Kawasan Tanaman Pangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.6.4.5	Perluasan Kawasan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			500.6.5		Pengelolaan Air Irigasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.6.5.1	Pengembangan Sumber Air	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.6.5.2	Pengembangan Jaringan dan Optimasi Air	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.6.5.3	Iklim, Konservasi Air dan Lingkungan Hidup	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.6.5.4	Kelembagaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.6.6		Pembiayaan Pertanian			
				500.6.6.1	Pembiayaan Program	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.6.6.2	Pembiayaan Syariah dan Kerja Sama	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.6.6.3	Pembiayaan agribisnis	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.6.6.4	Kelembagaan dan Pemberdayaan agribisnis	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.6.7		Pupuk Pestisida			
				500.6.7.1	Pupuk Organik dan Pembenh Tanah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				500.6.7.2	Pupuk Anorganik	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.6.7.3	Pestisida	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.6.7.4	Pengawasan Pupuk dan Pestisida	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.6.8		Alat dan Mesin Pertanian			
				500.6.8.1	Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.6.8.2	Pengawasan dan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.6.8.3	Kelembagaan dan Pelayanan Alat dan Mesin Pertanian	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.6.9		Perbenihan Tanaman Pangan			
				500.6.9.1	Penilaian Varietas dan Pengawasan Mutu Benih	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.6.9.2	Produksi Benih Serealia	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.6.9.3	Produksi Benih Aneka Kacang dan Umbi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.6.9.4	Kelembagaan Benih	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.6.10		Budidaya Serealia			

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				500.6.10.1	Padi Irigasi dan Rawa	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.6.10.2	Padi Tadah Hujan dan Lahan Kering	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.6.10.3	Jagung	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.6.10.4	Serealia Lain	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.6.11		Budidaya Aneka Kacang dan Umbi			
				500.6.11.1	Kedelai	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.6.11.2	Ubi Kayu	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.6.11.3	Aneka Kacang	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.6.11.4	Aneka Umbi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.6.12		Tanaman Pangan			
				500.6.12.1	Pengelolaan Data Organisasi Pengganggu Tumbuhan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.6.12.2	Dampak Perubahan Iklim	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				500.6.12.3	Teknologi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.6.12.4	Pengelolaan Pengendalian Hama Terpadu	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.6.13		Pascapanen Tanaman Pangan			
				500.6.13.1	Padi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.6.13.2	Jagung dan Serealia alin	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.6.13.3	Kedelai dan Aneka Kacang	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.6.13.4	Aneka Umbi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.6.14		Pengolahan Hasil Pertanian			
				500.6.14.1	Tanaman Pangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.6.14.2	Hortikultura	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.6.14.3	Perkebunan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.6.14.4	Peternakan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.6.15		Mutu dan Standarasi			

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				500.6.15.1	Standardisasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.6.15.2	Penerapan dan Pengawasan Jaminan Mutu	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.6.15.3	Akreditasi dan Kelembagaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.6.15.4	Kerjasama dan Harmonisasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.6.16		Pengembangan Usaha dan Investasi			
				500.6.16.1	Kemitraan dan Kewirausahaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.6.16.2	Investasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.6.16.3	Promosi Dalam Negeri	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.6.16.4	Promosi Luar Negeri	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.6.17		Pemasaran Domestik			
				500.6.17.1	Informasi Pasar	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.6.17.2	Pemantauan Pasar dan Stabilisasi Harga	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				500.6.17.3	Sarana dan Kelembagaan Pasar	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.6.17.4	Jaringan Pemasaran	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.6.18		Administrasi Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan, antara lain: Rencana Kerja, TOR/ Proposal, Pembentukan Tim Kerja dan Surat menyurat	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.6.19		Hasil Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan			
				500.6.19.1	Hasil Penelitian dan Pengembangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.6.19.2	Hasil Pengkajian dan Kebijakan dan Strategi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.6.20		Diseminasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.6.21		Publikasi Hasil Penelitian/ Pengkajian			
				500.6.21.1	Pameran, Temu Lapang, Temu Bisnis, Demlot, Seminar Lokakarya, Temu Karya, Workshop	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.6.21.2	Jurnal, Buletin, Monograf, Prosiding, dan Publikasi lainnya	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			500.6.22		Bimbingan Teknis Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.6.23		Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.6.24		Data Penelitian dan Pengembangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.6.25		Evaluasi Penelitian/ Pengkajian dan Pengembangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.6.26		Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)			
				500.6.26.1	Hak Cipta	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawas an internal dan eksternal serta penegak hukum
				500.6.26.2	Hak Paten Sederhana	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawas an internal dan eksternal serta penegak hukum
				500.6.26.3	Hak Paten Biasa	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawas an internal dan eksternal serta penegak hukum

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				500.6.26.4	Hak Merek	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawas an internal dan eksternal serta penegak hukum
				500.6.26.5	Pendaftaran Varietas Tanaman	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawas an internal dan eksternal serta penegak hukum
				500.6.26.6	Permohonan Hak PVTT Tanaman Semusim dan Tahunan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawas an internal dan eksternal serta penegak hukum
				500.6.26.7	Permohonan HKI yang ditolak	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawas an internal dan eksternal serta penegak hukum
			500.6.27		Pelayanan Perijinan Pertanian	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.6.27.1	Sarana I (bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.6.27.2	Sarana II (bidang benih tanaman, bahan penelitian, teknis pangan segar asal tumbuhan, teknis pengalihan saham perkebunan)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				500.6.27.3	Sarana III (bidang bibit, karkas, daging, dan jeroan, pakan ternak, obat hewan, dan teknis sumber daya genetik ternak)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.6.28		Pelayanan Hukum			
				500.6.28.1	Sertifikasi	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawas an internal dan eksternal serta penegak hukum
				500.6.28.2	Pertimbangan Hukum	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawas an internal dan eksternal serta penegak hukum
			500.6.29		Karantina Pertanian			
				500.6.29.1	Karantina Tumbuhan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawas an internal dan eksternal serta penegak hukum
				500.6.29.2	Karantina Hewan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawas an internal dan eksternal serta penegak hukum
			500.6.30		Bimbingan Teknis	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			500.6.31		Evaluasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
		500.7			PETERNAKAN			
			500.7.1		Kebijakan di bidang Peternakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.7.2		Peternakan dan Kesehatan Hewan			
				500.7.2.1	Perbibitan Ternak, Antara lain: Produksi Bibit Ternak Ruminansia, Produksi Bibit Ternak Non Ruminansia, Penilaian dan Pelepasan Bibit ternak, Pengembangan Bibit Ternak, Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan/ Pengeluaran	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.7.2.2	Pakan Ternak	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.7.2.3	Budidaya Ternak	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.7.2.4	Kesehatan Hewan, Antara lain: Pengamatan Penyakit Hewan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan, Perlindungan Hewan, Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan, Pengawasan Obat Hewan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				500.7.2.5	Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen, Antara lain: Pascapanen, Higien Sanitasi, Pengawasan Sanitary dan Keamanan Produk Hewan, Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan, Pengujian dan Sertifikasi Produk Hewan, Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan/ Pengeluaran	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.7.3		Bimbingan Teknis	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.7.4		Evaluasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
		500.8			PERKEBUNAN			
			500.8.1		Kebijakan di bidang Perkebunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.8.2		Tanaman Semusim			
				500.8.2.1	Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Semusim	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.8.2.2	Perbenihan Tanaman Semusim	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.8.2.3	Budidaya Teknologi Budidaya Tanaman Semusim	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.8.2.4	Pemberdayaan Tanaman Semusim	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			500.8.3		Tanaman Rempah & Penyegar			
				500.8.3.1	Identifikasi dan Pendayaguunaan Sumber Daya Tanaman Rempah & Penyegar	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.8.3.2	Perbenihan Tanaman Rempah & Penyegar	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.8.3.3	Budidaya Tanaman Rempah & Penyegar	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.8.3.4	Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Rempah & Penyegar	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.8.4		Tanaman Tahunan			
				500.8.4.1	Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya, Tanaman Tahunan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.8.4.2	Perbenihan Tanaman Tahunan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.8.4.3	Budidaya Tanaman Tahunan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.8.4.4	Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Tahunan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.8.5		Perlindungan Perkebunan			
				500.8.5.1	Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim, Perlindungan Perkebunan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				500.8.5.2	Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Rempah dan Penyegar	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.8.5.3	Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Tahunan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.8.5.4	Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.8.6		Pascapanen dan Pembinaan Usaha			
				500.8.6.1	Pascapanen Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.8.6.2	Pascapanen Tanaman Tahunan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.8.6.3	Bimbingan Usaha dan Perkebunan Berkelanjutan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.8.6.4	Gangguan Usaha dan Penanganan Konflik	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.8.7		Bimbingan Teknis Perkebunan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.8.8		Evaluasi Perkebunan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
		500.9			PERINDUSTRIAN			
			500.9.1		Kebijakan di bidang Perindustrian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			500.9.2		Iklm Usaha dan Kerja Sama			
				500.9.2.1	Industri Manufaktur	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.9.2.2	Industri Agro	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.9.2.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.9.2.4	Industri Kecil dan Menengah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.9.3		Promosi Industri			
				500.9.3.1	Industri Manufaktur	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.9.3.2	Promosi Industri Agro	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.9.3.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.9.3.4	Industri Kecil dan Menengah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.9.4		Standarisasi dan Teknologi			
				500.9.4.1	Industri Manufaktur	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.9.4.2	Industri Agro	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				500.9.4.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.9.4.4	Industri Kecil dan Menengah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.9.5		Hak dan Kekayaan Intelektual			
				500.9.5.1	Industri Manufaktur	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.9.5.2	Industri Agro	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.9.5.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.9.5.4	Industri Kecil dan Menengah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.9.6		Industri Hijau			
				500.9.6.1	Industri Manufaktur	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.9.6.2	Industri Agro	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.9.6.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.9.6.4	Industri Kecil dan Menengah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			500.9.7		Analisis Kerja Sama Industri Unggulan Kabupaten/Kota	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.9.8		Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Inti Industri (Provinsi dan Kabupaten/Kota)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.9.9		Pengembangan Infrastruktur Pendukung Pengembangan Kawasan Industri	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.9.10		Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.9.11		Kerja Sama Ketahanan Industri Internasional	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.9.12		Standarisasi			
				500.9.12.1	Standar	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.9.12.2	Penyiapan Penerapan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.9.12.3	Infrastruktur Standar	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.9.13		Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri			
				500.9.13.1	Kebijakan Industri	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.9.13.2	Perpajakan dan Tarif	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				500.9.13.3	Pengembangan Model Industrial	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.9.14		Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup			
				500.9.14.1	Industri Hijau	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.9.14.2	Lingkungan Hidup	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.9.14.3	Energi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.9.15		Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual			
				500.9.15.1	Pengkajian dan Penerapan Kebijakan Teknologi Industri	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.9.15.2	Pengkajian dan Penerapan Inovasi Teknologi Industri	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.9.15.3	Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.9.16		Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Industri	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
		500.10			ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			
			500.10.1		Kebijakan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			500.10.2		Rekomendasi Kegeologian			
				500.10.2.1	Mitigasi Gunung Api, Gempa Bumi, Tsunami, dan Gerakan Tanah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.10.2.2	Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawas an internal dan eksternal serta penegak hukum
				500.10.2.3	Pertambangan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawas an internal dan eksternal serta penegak hukum
				500.10.2.4	Panas Bumi	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawas an internal dan eksternal serta penegak hukum
				500.10.2.5	Geosains	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.10.2.6	Pengukuran Time Domain Electromagnetic (TDEM)	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawas an internal dan eksternal serta penegak hukum
				500.10.2.7	Kelayakan Lingkungan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawas an internal dan eksternal serta penegak hukum
			500.10.3		Penelitian Kegeologian			

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				500.10.3.1	Administrasi pelaksanaan penelitian	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.10.3.2	Administrasi tenaga penelitian	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.10.3.3	Administrasi Pengguna peralatan penelitian	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.10.3.4	Log-book peralatan survei/peralatan uji/kalibrasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.10.3.5	Hasil penelitian dan penyelidikan kegeologian	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawas an internal dan eksternal serta penegak hukum
				500.10.3.6	Sumber Daya Geologi	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawas an internal dan eksternal serta penegak hukum
				500.10.3.7	Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.10.3.8	Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.10.3.9	Survei Geologi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.10.4		Inventarisasi dan evaluasi kegeologian			

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				500.10.4.1	Sumber Daya Geologi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.10.4.2	Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.10.4.3	Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.10.4.4	Survei Geologi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.10.4.5	Konservasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.10.5		Administrasi Pelayanan Kegeologian dan Penyajian Data dan Informasi			
				500.10.5.1	Peta potensi dan sebaran	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.10.5.2	Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.10.5.3	Mitigasi Bencana Gunungapi, Gerakan Tanah, Gempa Bumi dan Tsunami, Semburan Lumpur/Gas serta kebakaran Batubara	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.10.5.4	Survei Geologi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.10.6		Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi			

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				500.10.6.1	Rencana Induk Jaringan Gas Bumi	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawas an internal dan eksternal serta penegak hukum
				500.10.6.2	Rencana dan Realisasi Investasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.10.6.3	Penetapan Harga Minyak Mentah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.10.6.4	Penetapan Bagii Hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Minyak dan Gas Bumi	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawas an internal dan eksternal serta penegak hukum
				500.10.6.5	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian PNBP	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawas an internal dan eksternal serta penegak hukum
				500.10.6.6	Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawas an internal dan eksternal serta penegak hukum
				500.10.6.7	Rekomendasi Kemampuan Produksi Barang dan Jasa Dalam Negeri	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.10.6.8	Rencana Kebutuhan Impor Barang (RKIB) dan Rencana Impor Barang (RIB)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			500.10.11		Penyiapan Program Energi Terbarukan dan Konservasi Energi			
				500.10.11.1	Usulan Wilayah Kerja Panas Bumi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.10.11.2	Usul Program Aneka Energi Pemerintah Daerah dan Lembaga	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.10.11.3	Penyiapan Program Pemanfaatan Energi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.10.11.4	Proyeksi Kebutuhan Energi dari EBT	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.10.11.5	Perencanaan Pemanfaatan Energi dari EBT	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.10.11.6	Penyusunan Neraca Energi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.10.11.7	Road Map di Bidang EBT	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.10.12		Panas Bumi			
				500.10.12.1	Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.10.12.2	Sertifikasi Kelayakan Pengguna Instalasi (SKPI)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.10.12.3	Sertifikasi Kelayakan Pengguna Peralatan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				500.10.12.4	Rekomendasi Bahan Peledak	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawas an internal dan eksternal serta penegak hukum
				500.10.12.5	Perizinan Pengguna gudang bahan peledak	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.10.12.6	Izin Tangki Bahan Bakar Cair	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.10.12.7	Persetujuan sertifikasi Welding Procedure Specification (WPS) dan Procedure Qualification Record (PQR) dan kualifikasi Juru Las Qualification Record (PQR) dan kualifikasi Juru Las	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.10.12.8	Penerbitasn Izin Usaha Panas Bumi (IUP)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.10.12.9	Penerbitan Izin Panas Bumi (IPB)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.10.12.10	Penerbitan Izin Pemanfaatan Langsung (IPL)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.10.12.11	Penetapan kapasitas usaha panas bumi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.10.12.12	Penetapan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				500.10.12.13	Pengawasan Eksplorasi dan Eksploitasi Panas Bumi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.10.12.14	Pelaksanaan Kerja Sama Panas Bumi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.10.12.15	Inventarisasi, Verifikasi dan Evaluasi Obvitnas Bidang Panas Bumi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.10.12.16	Monitoring Pelaksanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) pada Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.10.12.17	Pembinaan dan Pengawasan Investasi Panas Bumi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.10.13		Bioenergi			
				500.10.13.1	Penerbitan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (BNN)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.10.13.2	Pengadaan Bahan Bakar Nabati (BBN)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.10.13.3	Penerbitan Rekomendasi Ekspor - Impor	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.10.13.4	Penetapan Indeks Harga Pasar BBN (HIP BBN)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.10.13.5	Evaluasi/Revisi HIP BBN	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				500.10.13.6	Database Perusahaan Bioenergi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.10.13.7	Penetapan Badan Usaha sebagai Pengelola Energi Biomassa atau Biogas untuk Pembangkit Listrik	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.10.13.8	Penetapan Spesifikasi Bahan Bakar Nabati	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.10.13.9	Usul Program Bioenergi Pemerintah Daerah dan Lembaga	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.10.14		Aneka Energi			
				500.10.14.1	Penerbitan Izin Usaha Aneka Energi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.10.14.2	Penetapan Kapasitas Usaha	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.10.14.3	Rekomendasi Kompetensi dan Rencana Pengguna Tenaga Kerja Asing	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.10.14.4	Rekomendasi Persetujuan Perubahan Pemegang Saham	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.10.14.5	Persetujuan Rencana Impor Barang (RIB)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.10.15		Konservasi Energi			
				500.10.15.1	Audit Energi melalui program kemitraan Konservasi Energi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				500.10.15.2	Monitoring Implementasi hasil audit energi melalui program kemitraan konservasi energi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.10.15.3	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan manajemen energi di pengguna energi di atas 6.000 TOE	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.10.15.4	Pengawasan sertifikasi label dan tanda hemat energi pada lampu swabalast	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.10.15.5	Penyusunan daftar peralatan/teknologi efisiensi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.10.15.6	Penyusunan emisi energi gas rumah kaca	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.10.15.7	Pemberian insentif dan disinsentif konservasi energi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.10.15.8	Profil investasi efisiensi energi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.10.15.9	Invesment Grade Audit (IGA)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.10.15.10	Bimbingan Teknis Bidang EBTKE	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.10.16		Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur EBTKE			
				500.10.16.1	Usul Pembangunan Infrastruktur Pemerintah Daerah dan Lembaga	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				500.10.16.2	Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.10.16.3	Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Bidang EBTKE	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.10.16.4	Evaluasi Program Kerja	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.10.28		Penerimaan Negara			
				500.10.28.1	Penerimaan Negara Bukan Pajak	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.10.28.2	Penetapan Bagi Hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.10.28.3	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian PNBP	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.10.29		Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara			
				500.10.29.1	Perumusan RSNI (Rancangan Standar Nasional Indonesia)/ RSKKNI (Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia), Antara lain: Draft Rancangan, Rancangan Standar Nasional	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.10.29.2	Pengawasan Standardisasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.10.29.3	Persetujuan Penunjukkan Kepala/Wakil Kepala Teknik Tambang	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				500.10.29.4	Pengawasan Keselamatan Kegiatan dan Keselamatan Pekerja, Antara lain: Laporan Kecelakaan Tambang/Statistik hingga Laporan Hasil Pemeriksaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.10.29.5	Pemeriksaan teknis dan pengujian instalasi dan peralatan tambang, Antara lain: Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi dan Peralatan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.10.29.6	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.10.29.7	Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.10.29.8	Rekomendasi bahan kimia	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.10.29.9	Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, Antara lain: Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)/Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) hingga Surat Penetapan Jaminan Pasca Tambang	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				500.10.29.10	Laporan berkala teknik dan lingkungan pertambangan/ laporan tahunan, Antara lain: Laporan Bulanan Terjadinya Pencemaran (LPL 5) pelaksanaan reklamasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.10.29.11	Pemberian Penghargaan, Antara lain: Pemberian Penghargaan Lingkungan Pertambangan, Pemberian Penghargaan Keselamatan Kerja, Dokumen Pengajuan dan Penilaian Tanda Penghargaan lingkungan Pertambangan, Dokumen Pengajuan dan Penilaian Tanda Penghargaan Keselamatan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.10.29.12	Pengawasan lingkungan pertambangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.10.29.13	Usaha Jasa Mineral dan Batubara	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.10.29.14	Pembinaan dan pengawasan usaha jasa mineral dan batubara	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.10.29.15	Rekomendasi Teknis, Antara lain: Pengajuan Rekomendasi Teknis, Hasil Evaluasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.10.29.16	Persetujuan Teknis, Antara lain: Pengajuan Persetujuan Teknis, Hasil Evaluasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				500.10.29.17	Pengawasan Teknis	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.10.29.18	Pengawasan Konservasi Mineral dan Batubara	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.10.29.19	Peminaan Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Antara lain: Sosialisasi Standardisasi, Bimbingan Teknis	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.10.30		Program Penelitian dan Pengembangan			
				500.10.30.1	Rencana Penelitian dan Pengembangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.10.30.2	Pengembangan dan inovasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.10.30.3	Dokumen penerapan/pemanfaatan/pendayagunaan/replikasi/prototipe hasil penelitian/pengkajian/pengembangan /inovasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.10.30.4	Advokasi dan fasilitasi penelitian, pengembangan dan inovasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.10.30.5	Diseminasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				500.10.30.6	Pembinaan penelitian/Pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.10.30.7	Jaringan Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.10.30.8	Data dan informasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.10.30.9	Master proceeding/ jurnal penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.10.30.10	Hak atas kekayaan intelektual (HaKI)	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasan internal dan eksternal serta penegak hukum
				500.10.30.11	Forum komunikasi penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.10.30.12	Layanan jasa penelitian, pengembangan, penerapan IPTEK	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.10.30.13	Sertifikasi personil peneliti bidang Sumber Daya Mineral	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.10.31		Sarana Litbang			

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				500.10.31.1	Administrasi Pengguna peralatan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.10.31.2	Log-book Peralatan Survei/Peralatan Uji Kalibrasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.10.32		Afiliasi			
				500.10.32.1	Proyek Percontohan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.10.32.2	Promosi dan Layanan Jasa Teknologi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.10.32.3	Pembinaan Penelitian dan Pengembangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.10.32.4	Penyajian Informasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.10.33		Penelitian dan Pengembangan Kegeologian			
				500.10.33.1	Pemetaan dan penelitian geologi, geokimia, dan geofisika kelautan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawas an internal dan eksternal serta penegak hukum
				500.10.33.2	Energi Kelautan dan Kewilayahan Penelitian Energi dan kewilayahan pantai	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawas an internal dan eksternal serta penegak hukum

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				500.10.33.3	Penelitian sumber daya energi dan mineral kelautan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawas an internal dan eksternal serta penegak hukum
				500.10.33.4	Penelitian Sumber Daya Mineral Kelautan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawas an internal dan eksternal serta penegak hukum
			500.10.34		Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi			
				500.10.34.1	Teknologi Eksplorasi	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawas an internal dan eksternal serta penegak hukum
				500.10.34.2	Teknologi Eksploitasi	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawas an internal dan eksternal serta penegak hukum
				500.10.34.3	Laboratorium	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawas an internal dan eksternal serta penegak hukum
				500.10.34.4	Study	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				500.10.34.5	Teknologi Proses	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.10.34.6	Teknologi Aplikasi Produk	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.10.34.7	Teknologi Gas	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.10.35		Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral Batubara			
				500.10.35.1	Teknologi Eksploitasi Tambang dan Pengolahan Sumber Daya	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawas an internal dan eksternal serta penegak hukum
				500.10.35.2	Teknologi Pengolahan dan Pemanfaatan mineral	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.10.35.3	Teknologi Pemanfaatan Batubara	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.10.36		Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan			
				500.10.36.1	Energi baru terbarukan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.10.36.2	Teknologi Ketenagalistrikan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.10.36.3	Lingkungan dan Konservasi Energi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				500.10.36.4	Penelitian dan Pengembangan Teknologi PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) dan Konservasi Energi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
		500.11			PERHUBUNGAN			
			500.11.1		Kebijakan di bidang Perhubungan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.11.2		Jaringan Prasarana dan Pelayanan			
				500.11.2.1	Penentuan lokasi terminal barang tipe pengumpul dan tipe penunjang	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.11.2.2	Penentuan lokasi terminal penumpang tipe A, tipe B, dan tipe C	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.11.2.3	Penetapan lokasi terminal barang utama	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.11.2.4	Standar pelayanan minimal pengoperasian terminal	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.11.2.5	Jaringan trayek angkutan antar kota/provinsi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.11.2.6	Jaringan lintas pada jaringan jalan primer	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.11.2.7	Penetapan kelas jalan primer	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.11.2.8	Kualifikasi teknis petugas terminal	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				500.11.2.9	Jaringan transportasi jalan sekunder	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.11.3		Pengembangan Transportasi Jalan			
				500.11.3.1	Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.11.3.2	Pengembangan transportasi jalan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.11.4		Pengujian Kendaraan Bermotor			
				500.11.4.1	Pengesahan hasil uji tipe kendaraan bermotor	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.11.4.2	Sertifikasi uji tipe kendaraan bermotor	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.11.4.3	Sertifikasi tenaga penguji kendaraan bermotor	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.11.4.4	Akreditasi unit pengujian kendaraan bermotor	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.11.5		Teknologi Kendaraan Bermotor			
				500.11.5.1	Sertifikasi rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.11.5.2	Pelaksanaan kalibrasi peralatan uji kendaraan bermotor	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.11.5.3	Persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				500.11.5.4	Harmonisasi dan standarisasi regulasi kendaraan bermotor	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.11.6		Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas			
				500.11.6.1	Analisa dampak lalu lintas jalan nasional di luar kawasan perkotaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.11.6.2	Manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.11.7		Perlengkapan Jalan			
				500.11.7.1	Pedoman teknis perlengkapan jalan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.11.7.2	Penimbangan kendaraan bermotor di jalan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.11.7.3	Akreditasi unit penimbangan kendaraan bermotor	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.11.7.4	Kualifikasi teknis petugas penimbangan kendaraan bermotor	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.11.7.5	Pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan nasional	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.11.8		Angkutan Penumpang			
				500.11.8.1	Tarif angkutan penumpang kelas ekonomi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				500.11.8.2	Izin trayek angkutan penumpang untuk trayek lintas batas negara	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.11.8.3	Izin trayek antar kota antar provinsi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.11.8.4	Izin operasi angkutan pariwisata dan angkutan penumpang tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya bersifat lintas batas negara & antar kota/provinsi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.11.8.5	Penilaian kinerja perusahaan angkutan umum	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.11.8.6	Pemberian subsidi angkutan umum	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.11.8.7	Angkutan perintis	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.11.8.8	Penghargaan perusahaan angkutan umum	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.11.9		<u>Angkutan Barang</u>			
				500.11.9.1	Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.11.9.2	Tarif angkutan barang	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.11.9.3	Izin operasi angkutan barang tertentu	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				500.11.9.4	Pembinaan angkutan barang	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.11.9.5	Izin dispensasi angkutan jalan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.11.10		Monitoring Operasional			
				500.11.10.1	Pengendalian operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.11.10.2	Pengawasan, penertiban dan pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran operasional kendaraan angkutan umum yang menjadi kewenangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.11.10.3	Berkas Pelanggaran Perda	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.11.11		Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil			
				500.11.11.1	Pedoman Teknis	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.11.11.2	Penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.11.11.3	Bimtek PPNS	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.11.11.4	Pengusulan pengangkatan dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			500.11.12		Analisa dan Evaluasi Jaringan Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan			
				500.11.12.1	Pendataan jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.11.12.2	Analisis serta informasi jaringan transportasi sungai, danau, & penyeberangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.11.13		Pengembangan Jaringan Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan			
				500.11.13.1	Pengembangan dan penetapan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan (peta jaringan, blueprint jaringan)	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasan internal dan eksternal serta penegak hukum
				500.11.13.2	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.11.14		Rancang Bangun Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.11.15		Bimbingan Perawatan Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan			
				500.11.15.1	Perawatan dan pemeliharaan sarana sungai, danau dan penyeberangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				500.11.15.2	Pengawasan dan registrasi sarana angkutan sungai dan danau danau dan penyeberangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.11.16		Rancang Bangun Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan			
				500.11.16.1	Perencanaan dan pembangunan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.11.16.2	Pemberian sertifikasi pelabuhan penyeberangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.11.16.4	Penyelenggaraan, pemeliharaan, perawatan dan perbaikan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.11.17		Kualifikasi teknis petugas pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.11.18		Manajemen Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan			
				500.11.18.1	Manajemen lalu lintas	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.11.18.2	Tata cara berlalu lintas di sungai, danau dan penyeberangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.11.18.3	Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang lalu lintas dan angkutan sungai & danau	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				500.11.18.4	Sertifikasi inspektur sungai dan danau dan pejabat pemberangkatan angkutan sungai dan danau	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.11.19		Alur dan Perambuan Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan			
				500.11.19.1	Pengerukan alur pelayaran sungai, danau dan kolam pelabuhan penyeberangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.11.19.2	Penetapan kelas alur dan peta alur pelayaran sungai dan danau	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.11.19.3	Perambuan sungai, danau dan penyeberangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.11.20		Bimbingan Usaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan			
				500.11.20.1	Penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.11.20.2	Persetujuan operasi kapal penyeberangan di lintas nasional dan internasional	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.11.21		Tarif dan Keperintisan			
				500.11.21.1	Perhitungan tarif, pemantauan tarif angkutan dan jasa pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan			
				500.11.21.2	Kriteria dan pelaksanaan pelayanan keperintisan			
			500.11.22		Bina Sistem Transportasi Perkotaan			

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				500.11.22.1	Jaringan Transportasi Perkotaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.11.22.2	Transportasi perkotaan yang berbasis jalan, jalan rel dan perairan daratan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.11.22.3	Transportasi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.11.23		Lalu Lintas Perkotaan			
				500.11.23.1	Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.11.23.2	Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan di jalan nasional dalam kawasan perkotaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.11.23.3	Penanganan lalu lintas perkotaan berbasis teknologi di wilayah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.11.24		Angkutan Perkotaan			
				500.11.24.1	Penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.11.24.2	Jaringan trayek perkotaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.11.24.3	Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			500.11.25		Pengaduan Moda Transportasi Perkotaan			
				500.11.25.1	Penyelenggaraan angkutan perkotaan tidak dalam trayek untuk angkutan penumpang dan/atau barang	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.11.25.2	Pengaduan moda transportasi perkotaan yang menghubungkan antar simpul (bandara, pelabuhan, stasiun, dan terminal) di kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.11.25.3	Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.11.26		Dampak Transportasi Perkotaan			
				500.11.26.1	Penyelenggaraan transportasi perkotaan berwawasan lingkungan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.11.26.2	Penanganan dampak transportasi di kawasan perkotaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.11.26.3	Masterplan pengembangan teknologi transportasi ramah lingkungan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.11.26.4	Pelaksanaan analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan kota	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				500.11.26.5	Rekomendasi hasil analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.11.26.6	Masterplan transportasi perkotaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.11.27		Monitoring dan Evaluasi Manajemen Keselamatan			
				500.11.27.1	Monitoring dan evaluasi data kecelakaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.11.27.2	Kualifikasi unit pengkajian	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.11.27.3	Pengembangan sistem informasi manajemen keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.11.28		Pengembangan Keselamatan			
				500.11.28.1	Program keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.11.28.2	Harmonisasi kebijakan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.11.29		Promosi dan Kemitraan Keselamatan			

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				500.11.29.1	Promosi Keselamatan: penyuluhan, publikasi dan destinasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.11.29.2	Kemitraan keselamatan antar lembaga dan masyarakat di bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.11.30		Bina Keselamatan Angkutan Umum			
				500.11.30.1	Keselamatan Pengusahaan Angkutan Umum	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.11.30.2	Keselamatan Awak Angkutan Umum dan awak kapal sungai dan danau	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.11.31		Audit Keselamatan			
				500.11.31.1	Pedoman audit keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.11.31.2	Identifikasi daerah rawan kecelakaan jalan dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.11.31.3	Audit faktor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.11.32		Inspeksi Keselamatan			

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				500.11.32.1	Pedoman keselamatan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.11.32.2	Inspeksi keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.11.32.3	Investigasi kecelakaan sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.11.33		Parkir			
				500.11.33.1	Surat Tugas Juru Parkir	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.11.33.2	Izin tempat khusus parkir swasta	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.11.33.3	Surat Tugas TKP Pemerintah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
		500.12			KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
			500.12.1		Kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.12.2		Telekomunikasi			
				500.12.2.1	Layanan Jaringan Telekomunikasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.12.2.2	Layanan Jasa Telekomunikasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				500.12.2.3	Penomoran Telekomunikasi dan Informatika	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.12.2.4	Kelayakan Sistem Telekomunikasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.12.3		Penyiaran			
				500.12.3.1	Pemetaan Penyelenggaraan Radio dan Televisi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.12.3.2	Database Penyelenggaraan Radio dan Televisi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.12.4		Telekomunikasi Khusus, Penyiaran Publik dan Kewajiban Universal			
				500.12.4.1	Telekomunikasi Khusus Pemerintah Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.12.4.2	Telekomunikasi Khusus Non Pemerintah Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.12.4.3	Layanan Khusus Penyiaran	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.12.4.4	Pelayanan Kewajiban Universal	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.12.4.5	Pengembangan Infrastruktur	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.12.5		Pengendalian Informatika			

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				500.12.5.1	Monitoring dan Evaluasi Jaringan Telekomunikasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.12.5.2	Monitoring dan Evaluasi Jasa Telekomunikasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.12.5.3	Monitoring dan Evaluasi Penyiaran	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.12.5.4	Pencegahan dan Penertiban	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.12.6		e- Government			
				500.12.6.1	Tata Kelola e-Government	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawas an internal dan eksternal serta penegak hukum
				500.12.6.2	Teknologi dan Infrastruktur e Government	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawas an internal dan eksternal serta penegak hukum
				500.12.6.3	Interoperabilitas dan Interkonektivitas e- Government	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawas an internal dan eksternal serta penegak hukum

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				500.12.6.4	Aplikasi Layanan Pemerintahan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawas an internal dan eksternal serta penegak hukum
				500.12.6.5	Aplikasi Layanan Publik	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawas an internal dan eksternal serta penegak hukum
			500.12.7		e- Business			
				500.12.7.1	Tata Kelola e-Business	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawas an internal dan eksternal serta penegak hukum
				500.12.7.2	Teknologi dan Infrastruktur e Business	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawas an internal dan eksternal serta penegak hukum
				500.12.7.3	Interoperabilitas dan Interkonektivitas e-Business	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawas an internal dan eksternal serta penegak hukum
				500.12.7.4	Aplikasi Layanan e-Business	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawas an internal dan eksternal serta penegak hukum

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			500.12.8		Pemberdayaan Informatika Masyarakat			
				500.12.8.1	Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perkotaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.12.8.2	Pemberdayaan Informatika Masyarakat Pedesaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.12.9		Pemberdayaan Industri Informatika			
				500.12.9.1	Industri Infrastruktur dan Layanan Aplikasi Informatika	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.12.9.2	Industri Perangkat Informatika Pengguna	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.12.9.3	Industri Perangkat Lunak	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.12.9.4	Industri Konten Multimedia	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.12.10		Keamanan Informasi			
				500.12.10.1	Tata Kelola Keamanan Informasi	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawas an internal dan eksternal serta penegak hukum
				500.12.10.2	Teknologi Keamanan Informasi	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawas an internal dan eksternal serta penegak hukum

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				500.12.10.3	Monitoring, Evaluasi dan Tanggap Darurat Keamanan Informasi	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawas an internal dan eksternal serta penegak hukum
				500.12.10.4	Penyidikan dan Penindakan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawas an internal dan eksternal serta penegak hukum
				500.12.10.5	Budaya Keamanan Informasi	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawas an internal dan eksternal serta penegak hukum
			500.12.11		Komunikasi Publik			
				500.12.11.1	Tata Kelola Komunikasi Publik	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.12.11.2	Pengelolaan Opini Publik	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.12.11.3	Layanan Komunikasi Publik	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.12.12		Pengolahan dan Penyediaan Informasi			
				500.12.12.1	Informasi Politik, Hukum, dan Keamanan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.12.12.2	Informasi Perekonomian	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				500.12.12.3	Informasi Kesejahteraan Rakyat	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.12.13		Pengelolaan Media Publik			
				500.12.13.1	Media Cetak	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.12.13.2	Media Online	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.12.13.3	Media Luar Ruang dan Audio Visual	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.12.14		Kemitraan Komunikasi			
				500.12.14.1	Kemitraan Pemerintah dan Lembaga Negara	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.12.14.2	Kemitraan Media dan Dunia Usaha	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.12.14.3	Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan dan Profesi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.12.15		Infrastruktur Informatika			
				500.12.15.1	Jaringan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawas an internal dan eksternal serta penegak hukum

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				500.12.15.2	Piranti Teknologi Informatika	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawas an internal dan eksternal serta penegak hukum
				500.12.15.3	Keamanan Informatika	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawas an internal dan eksternal serta penegak hukum
			500.12.16		Sistem dan Data			
				500.12.16.1	Portal dan Konten	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawas an internal dan eksternal serta penegak hukum
				500.12.16.2	Pengumpulan dan Pengolahan Data	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawas an internal dan eksternal serta penegak hukum
				500.12.16.3	Pengembangan Aplikasi	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawas an internal dan eksternal serta penegak hukum
			500.12.17		Pusat Kerjasama			
				500.12.17.1	Kerja Sama daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				500.12.17.2	Kerja Sama Bilateral	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.12.18		Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat			
				500.12.18.1	Pelayanan Informasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.12.18.2	Hubungan Masyarakat	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.12.18.3	Bimbingan Teknis	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
		500.13			PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			
			500.13.1		Kebijakan di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.13.2		Pengembangan Destinasi Wisata			
				500.13.2.1	Perancangan Destinasi dan Investasi Pariwisata	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.13.2.2	Pengembangan Daya Tarik Wisata	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.13.2.3	Industri Pariwisata	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.13.2.4	Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				500.13.2.5	Pengembangan Wisata Minat Khusus, Konvensi, Insentif, dan Event	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.13.3		Pemasaran Pariwisata			
				500.13.3.1	Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.13.3.2	Promosi Pariwisata Luar Negeri	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.13.3.3	Promosi Pariwisata Dalam Negeri	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.13.3.4	Pencitraan Indonesia	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.13.4		Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya			
				500.13.4.1	Pengembangan industri Perfilman	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.13.4.2	Pengembangan Seni Pertunjukan dan Industri Musik	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.13.4.3	Pengembangan Seni Rupa	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.13.5		Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan IPTEK			
				500.13.5.1	Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				500.13.5.2	Desain dan Arsitektur	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.13.5.3	Kerjasama dan Fasilitasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.13.6		Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			
				500.13.6.1	Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisataaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.13.6.2	Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Ekonomi Kreatif	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.13.6.3	Pengembangan SDM Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.13.6.4	Kompetensi Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
		500.14			STATISTIK			
			500.14.1		Kebijakan di bidang Statistik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.14.2		Sensus Penduduk, Pertanian, dan Ekonomi			
				500.14.2.1	Perencanaan,			

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				500.14.2.2	Persiapan, Antara lain: Penyusunan rancangan organisasi kegiatan sensus, Penyusunan Kuesioner, Penyusunan konsep dan definisi, Penyusunan metodologi (cakupan, organisasi, lapangan, ukuran statistik, prosedur), Penyusunan buku pedoman (pencacahan, pengawasan, pengolahan), Penyusunan peta wilayah kerja dan muatan peta wilayah Penyusunan pedoman sosialisasi, Sosialisasi kegiatan kepada stakeholder dan sumber data (leaflet, poster, pertemuan), Pelaksanaan pertemuan koordinasi (intern dan ekstern), Pelaksanaan pelatihan instruktur (TOT), Pelaksanaan pelatihan petugas, Penyusunan program pengolahan (rule validasi, pemeriksaan data entri, tabulasi), Pelatihan petugas pengolahan, Perancangan tabel,	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.14.2.3	Pelaksanaan Lapangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				500.14.2.4	Pengolahan, Antara lain: Pengelolaan dokumen (penerimaan/ pengiriman, pengelompokkan/Batching), Pemeriksaan dokumen dan pengkodean (Editing/Coding), Perekaman data (entri, scanner), Tabulasi Data, Pemeriksaan tabulasi, Laporan konsistensi tabulasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.14.2.5	Analisis dan Penyajian Hasil Sensus	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.14.2.6	Diseminasi hasil sensus	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.14.3		Survei			
				500.14.3.1	Perencanaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.14.3.2	Persiapan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.14.3.3	Pelaksanaan Lapangan, Antara lain: Pelaksanaan listing, Pemilihan sampel, Pengumpulan data, Pemeriksaan, Pengawasan Lapangan, Monitoring kualitas	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				500.14.3.4	Pengolahan, Antara lain: Pengelolaan dokumen (penerimaan/ pengiriman, pengelompokkan/ Batching), Pemeriksaan dokumen dan pengkodean (Editing/Coding), Perekaman data (entri, scanner), Tabulasi Data, Pemeriksaan tabulasi, Laporan konsistensi tabulasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.14.3.5	Analisis dan Penyajian Hasil Survei, Antara lain: Pembahasan angka hasil pengolahan, Penyusunan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.14.3.6	Diseminasi hasil Survei	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.14.4		Konsolidasi Data Statistik			
				500.14.4.1	Kompilasi Data	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.14.4.2	Analisis data	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.14.4.3	Penyusunan Publikasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.14.5		Evaluasi dan Pelaporan Sensus, Survei, dan Konsolidasi Data Statistik	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
		500.15			KETENAGAKERJAAN			

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			500.15.1		Kebijakan di bidang Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.15.2		Perencanaan Tenaga Kerja			
				500.15.2.1	Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Pemerintah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.15.2.2	Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Swasta	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.15.3		Pengembangan Standarisasi Kompetensi			
				500.15.3.1	Penerapan Standar Kompetensi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.15.3.2	Pengembangan Standarisasi Kompetensi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.15.3.3	Pengembangan Program Pelatihan Ketenagakerjaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.15.3.4	Pengembangan Program Pelatihan Produktivitas dan Kewirausahaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.15.3.5	Pengembangan Program Pelatihan Ketransmigrasian	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.15.4		Bina Lembaga dan Sarana Pelatihan Kerja			
				500.15.4.1	Akreditasi dan Sistem Informasi Kelembagaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				500.15.4.2	Pengembangan Sarana dan Fasilitas Lembaga Pelatihan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.15.4.3	Pengembangan Standar Mutu (PSM) Lembaga Pelatihan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.15.4.4	Sistem Pendanaan dan Kerjasama Antar Lembaga	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.15.5		Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan			
				500.15.5.1	Instruktur dan PSM Lembaga Pelatihan Pemerintah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.15.5.2	Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.15.5.3	Tenaga Pelatihan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.15.5.4	Sistem Informasi Instruktur, PSM, dan Tenaga Pelatihan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.15.6		Bina Pemagangan			
				500.15.6.1	Pemagangan Dalam Negeri	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.15.6.2	Pemagangan Luar Negeri	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.15.6.3	Perizinan dan Advokasi Pemagangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				500.15.6.4	Promosi dan Jenjang Pemagangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.15.7		Produktivitas dan Kewirausahaan			
				500.15.7.1	Pengembangan Promosi dan Kerjasama Produktivitas dan Kewirausahaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.15.7.2	Pengembangan Sistem dan Peningkatan Produktivitas	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.15.7.3	Pengembangan Pengukuran dan Kajian Produktivitas	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.15.7.4	Pengembangan Kewirausahaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.15.8		Pengembangan Pasar Kerja			
				500.15.8.1	Informasi Pasar Kerja	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.15.8.2	Analisis Pasar Kerja	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.15.8.3	Bursa Kerja	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.15.8.4	Analisis Jabatan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.15.9		Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri			

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				500.15.9.1	Antar Kerja	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.15.9.2	Penempatan Tenaga Kerja Khusus	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.15.9.3	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.15.9.4	Pemberdayaan Pengantar Kerja	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.15.10		Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja Sektor Informal			
				500.15.10.1	Tenaga Kerja Mandiri dan Sektoral Informal	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.15.10.2	Pengembangan Padat Karya	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.15.10.3	Terapan Teknologi Tepat Guna	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.15.10.4	Pemberdayaan Pendampingan dan Kerjasama Antar Lembaga	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.15.11		Standardisasi Profesi			
				500.15.11.1	Sistem Informasi dan Registrasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.15.11.2	Pembakuan Akreditasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			500.15.12		Persyaratan Kerja, Kesejahteraan, dan Analisis Diskriminasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.15.12.1	Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerjasama Bersama	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.15.12.2	Perjanjian Kerja	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.15.12.3	Kesejahteraan Pekerja	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.15.12.4	Analisis Diskriminasi Syarat Kerja	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.15.13		Kelembagaan dan Pemasarakatan Hubungan Industrial			
				500.15.13.1	Organisasi Pekerja dan Pengusaha	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.15.13.2	Kelembagaan Hubungan Industrial	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.15.13.3	Pemasarakatan Hubungan Industrial	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.15.14		Pengupahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.15.14.1	Pengupahan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				500.15.14.2	Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Hubungan Kerja	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.15.15		Pencegahan dan Penyelesaian Pelestarian Hubungan Industrial			
				500.15.15.1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.15.15.2	Penyelenggaraan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.15.15.3	Pemberdayaan Kelembagaan dan Tenaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.15.16		Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja			
				500.15.16.1	Pengawasan Norma Kerja	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.15.16.2	Pengawasan Norma Hubungan Kerja dan Perlindungan Berserikat	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.15.16.3	Pengawasan Norma Penempatan dan Latihan Tenaga Kerja	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.15.17		Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak			
				500.15.17.1	Pengawasan Norma Kerja Perempuan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				500.15.17.2	Pengawasan Norma Kerja Anak	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.15.17.3	Kerjasama Lintas Sektoral	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.15.17.4	Advokasi Tenaga Kerja Perempuan dan Anak	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.15.18		Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja			
				500.15.18.1	Pengawasan Norma Mekanik, Pesawat Uap dan Bejana Tekan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.15.18.2	Pengawasan Norma Konstruksi Bangunan, Listrik dan Penanggulangan Kebakaran	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.15.18.3	Pengawasan Norma Kesehatan Kerja	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.15.18.4	Pengawasan Norma Lingkungan Kerja dan Bahan Berbahaya	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.15.18.5	Pengawasan Norma Kelembagaan, Keahlian dan Sistem Manajemen K3	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.15.19		Laporan Hasil Pengawasan Ketenagakerjaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.15.20		Bina Penegakan Hukum			
				500.15.20.1	Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				500.15.20.2	Penyidikan Norma Ketenagakerjaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.15.20.3	Pengembangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.15.20.4	Kerjasama Penegakan Hukum	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.15.21		Pengkajian dan Bimbingan Teknis Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)			
				500.15.21.1	Analisis dan Standardisasi bidang K 3	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.15.21.2	Hasil kajian, perekayasaan dan penerapan teknologi dan alih teknologi K 3	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.15.21.3	Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengkajian K 3	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.15.21.4	Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pelayanan K3	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.15.22		Pengembangan SDM dan Kompetensi K3			
				500.15.22.1	Program, Analisis dan Standardisasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.15.22.2	Penyebarluasan Informasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				500.15.22.3	Kerjasama Tingkat Nasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.15.22.4	Kerjasama Tingkat Regional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.15.22.5	Kerjasama Tingkat Internasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.15.22.6	Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
		500.16			PENANAMAN MODAL			
			500.16.1		Kebijakan di bidang Penanaman Modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.16.2		Perencanaan Penanaman Modal			
				500.16.2.1	Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.16.2.2	Perencanaan Industri Manufaktur	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.16.2.3	Perencanaan Jasa dan Kawasan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.16.2.4	Perencanaan Infrastruktur	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.16.3		Pengembangan Iklim Penanaman Modal			

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				500.16.3.1	Deregulasi Penanaman Modal	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.16.3.2	Pengembangan Potensi Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.16.3.3	Pemberdayaan Usaha	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.16.3.4	Pemberdayaan Usaha Pembinaan dan Penyuluhan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.16.3.5	Pemberdayaan Usaha Kemitraan Usaha	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.16.3.6	Pemberdayaan Usaha Pelayanan Usaha	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.16.4		Promosi Penanaman Modal			
				500.16.4.1	Pengembangan Promosi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.16.4.2	Analisis Strategi Promosi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.16.4.3	Fasilitasi Promosi Luar Negeri	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.16.4.4	Promosi Sektoral	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.16.4.5	Fasilitasi Promosi Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				500.16.4.6	Pameran dan Sarana Promosi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.16.5		Kerja Sama Penanaman Modal			
				500.16.5.1	Kerja Sama Bilateral dan Multilateral	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasan internal dan eksternal serta penegak hukum
				500.16.5.2	Kerja Sama Regional	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasan internal dan eksternal serta penegak hukum
				500.16.5.3	Kerja Sama Dunia Usaha Internasional	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasan internal dan eksternal serta penegak hukum
			500.16.6		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal			
				500.16.6.1	Pemantauan Penanaman Modal	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasan internal dan eksternal serta penegak hukum
				500.16.6.2	Data Realisasi Penanaman Modal	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasan internal dan eksternal serta penegak hukum

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				500.16.6.3	Bimbingan Sosialisasi Ketentuan Penanaman Modal	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasan internal dan eksternal serta penegak hukum
				500.16.6.4	Fasilitasi Penyelesaian Masalah	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasan internal dan eksternal serta penegak hukum
				500.16.6.5	Pengawasan Penanaman Modal	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasan internal dan eksternal serta penegak hukum
				500.16.6.6	Pencabutan/Pembatalan Perizinan Penanaman Modal	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasan internal dan eksternal serta penegak hukum
			500.16.7		Pelayanan Penanaman Modal			
				500.16.7.1	Pelayanan Aplikasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.16.7.2	Pelayanan Perijinan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.16.7.3	Pelayanan Konsultasi Perijinan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				500.16.7.4	Pelayanan Non Perijinan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.16.7.5	Pelayanan Fasilitas	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
		500.17			PERTANAHAN			
			500.17.1		Kebijakan di bidang Pertanahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.17.2		Pengadaan dan Penataan Administrasi Pertanahan			
				500.17.2.1	Fasilitasi Pengadaan Tanah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.17.2.2	Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.17.2.3	Data dan Informasi Pertanahan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.17.2.4	Advokasi dan Pengendalian	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.17.3		Penatagunaan dan Penguatan Hak Atas Tanah			
				500.17.3.1	Penatagunaan Tanah	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawas an internal dan eksternal serta penegak hukum

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				500.17.3.2	Data dan Pemetaan Tematik	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawas an internal dan eksternal serta penegak hukum
				500.17.3.3	Penguatan Atas Tanah	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawas an internal dan eksternal serta penegak hukum
			500.17.4		Sengketa Tanah			
				500.17.4.1	Pengkajian dan Penanganan Sengketa	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawas an internal dan eksternal serta penegak hukum
				500.17.4.2	Advokasi dan Pengendalian	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawas an internal dan eksternal serta penegak hukum
		500.18			TRANSMIGRASI			
			500.18.1		Kebijakan di bidang Transmigrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawas an internal dan eksternal serta penegak hukum
			500.18.2		Penyediaan Tanah Transmigrasi			
				500.18.2.1	Fasilitasi Pengadaan Tanah	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawas an internal dan eksternal serta penegak hukum

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				500.18.2.2	Pengurusan Legalitas Tanah	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawas an internal dan eksternal serta penegak hukum
				500.18.2.3	Dokumentasi Pertanahan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawas an internal dan eksternal serta penegak hukum
				500.18.2.4	Advokasi Pertanahan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawas an internal dan eksternal serta penegak hukum
			500.18.3		Pembangunan Pemukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi			
				500.18.3.1	Penyiapan Lahan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawas an internal dan eksternal serta penegak hukum
				500.18.3.2	Penyiapan Sarana	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawas an internal dan eksternal serta penegak hukum
				500.18.3.3	Penyiapan Prasarana	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawas an internal dan eksternal serta penegak hukum

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				500.18.3.4	Evaluasi Kelayakan Permukiman	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawas an internal dan eksternal serta penegak hukum
			500.18.4		Fasilitasi Penempatan Transmigrasi			
				500.18.4.1	Penyiapan Calon Transmigrasi	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawas an internal dan eksternal serta penegak hukum
				500.18.4.2	Penyiapan Perpindahan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawas an internal dan eksternal serta penegak hukum
				500.18.4.3	Pelaksanaan Perpindahan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasan
								internal dan eksternal serta penegak hukum
				500.18.4.4	Penataan dan Adaptasi	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawas an internal dan eksternal serta penegak hukum
			500.18.5		Partisipasi Masyarakat			
				500.18.5.1	Promosi dan Motivasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				500.18.5.2	Kerjasama Kelembagaan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawas an internal dan eksternal serta penegak hukum
				500.18.5.3	Kerjasama Antar Daerah	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawas an internal dan eksternal serta penegak hukum
				500.18.5.4	Pelayanan Investasi	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawas an internal dan eksternal serta penegak hukum
			500.18.6		Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi			
				500.18.6.1	Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawas an internal dan eksternal serta penegak hukum
				500.18.6.2	Bina Sistem Informasi	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawas an internal dan eksternal serta penegak hukum
				500.18.6.3	Perencanaan Pengembangan Kawasan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				500.18.6.4	Perencanaan Pengembangan Masyarakat	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.18.6.5	Perencanaan Pengembangan Pusat Pertumbuhan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawas an internal dan eksternal serta penegak hukum
			500.18.7		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat			
				500.18.7.1	Bantuan Pangan dan Kesehatan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.18.7.2	Fasilitas Sosial Budaya	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.18.7.3	Pengembangan Kelembagaan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawas an internal dan eksternal serta penegak hukum
				500.18.7.4	Bina Pendampingan Masyarakat Transmigrasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.18.8		Pengembangan Usaha			
				500.18.8.1	Kewirausahaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.18.8.2	Produksi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.18.8.3	Pengolahan Hasil dan Pemasaran	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				500.18.8.4	Lembaga Ekonomi dan permodalan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.18.9		Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan			
				500.18.9.1	Analisis dan Standarisasi Sarana dan Prasarana	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.18.9.2	Pengembangan Sarana	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.18.9.3	Pengembangan Prasarana	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.18.9.4	Evaluasi Pengembangan Sarana dan Prasarana	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			500.18.10		Penyerasian Lingkungan			
				500.18.10.1	Persiapan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.18.10.2	Adaptasi dan Mitigasi Lingkungan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.18.10.3	Evaluasi Perkembangan Permukiman Transmigrasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				500.18.10.4	Evaluasi Perkembangan Pusat Pertumbuhan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
	600				PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN			
		600.1			PEKERJAAN UMUM			

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			600.1.1		Kebijakan di bidang Pekerjaan Umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Tergantung pada jenis arsip yang lebih spesifik	Tergantung pada jenis arsip yang lebih spesifik	Tergantung pada jenis arsip yang lebih spesifik
			600.1.2		Penatagunaan Sumber Daya Air			
				600.1.2.1	Perencanaan Wilayah Sungai	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasa n internal dan eksternal serta penegak hukum
				600.1.2.2	Kelembagaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				600.1.2.3	Pemanfaatan Sumber Daya Air	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				600.1.2.4	Hidrologi dan Lingkungan Sumber Daya Air	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				600.1.2.5	Pengaturan dan Pemantauan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasa n internal dan eksternal serta penegak hukum
			600.1.3		Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air			
				600.1.3.1	Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				600.1.3.2	Manajemen Mutu	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				600.1.3.3	Informasi dan Data Sumber Daya Air	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				600.1.3.4	Keterpaduan Pemrograman	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			600.1.4		Pengelolaan Sumber Daya Air			
				600.1.4.1	Pengelolaan Sungai dan Pantai	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				600.1.4.2	Pengelolaan Irigasi dan Rawa	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				600.1.4.3	Pengelolaan Bendungan, Danau, Situ, dan Embung	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				600.1.4.4	Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			600.1.5					
				600.1.5.1	Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan Pantai	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				600.1.5.2	Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				600.1.5.3	Operasi dan Pemeliharaan Bendungan, Danau, Situ, dan Embung	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				600.1.5.4	Operasi dan Pemeliharaan Air Tanah dan Air Baku	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			600.1.7		Pengembangan Jaringan Jalan			
				600.1.7.1	Keterpaduan Perencanaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				600.1.7.2	Sistem Jaringan Jalan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasa n internal dan eksternal serta penegak hukum
				600.1.7.3	Lingkungan dan Keselamatan Jalan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			600.1.8		Pembangunan Jalan			
				600.1.8.1	Standar dan Pedoman	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				600.1.8.2	Manajemen Konstruksi	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasa n internal dan eksternal serta penegak hukum
				600.1.8.3	Pengelolaan Gedometrik, Perkerasan, dan Drainage	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				600.1.8.4	Pengelolaan Geoteknik dan Manajemen Lereng	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			600.1.9		Preservasi Jalan			

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				600.1.9.1	Standar dan Pedoman	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				600.1.9.2	Perencanaan Teknis	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				600.1.9.3	Teknik Rekonstruksi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				600.1.9.4	Teknik Pemeliharaan Jalan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			600.1.10		Pengelolaan Jembatan			
				600.1.10.1	Standar dan Pedoman	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				600.1.10.2	Perencanaan Teknis	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				600.1.10.3	Teknik Jembatan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				600.1.10.4	Teknik Terowongan dan Jembatan Khusus	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			600.1.11		Pengelolaan Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan, dan Fasilitas Jalan Daerah			
				600.1.11.1	Bimbingan Teknik Jalan Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				600.1.11.2	Pengembangan Jalan Metropolitan dan Kota Besar	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasa n internal dan eksternal serta penegak hukum
				600.1.11.3	Pembinaan Teknik Jalan Bebas Hambatan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			600.1.12		Pengaturan Jalan Tol			
				600.1.12.1	Persiapan perusahaan jalan tol	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasa n internal dan eksternal serta penegak hukum
				600.1.12.2	Pengadaan Investasi Jalan Tol	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasa n internal dan eksternal serta penegak hukum
				600.1.12.3	Teknik Pengaturan Jalan Tol	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				600.1.12.4	Pengambilalihan hak perusahaan jalan tol	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			600.1.13		Keterpaduan Infrastruktur Permukiman			
				600.1.13.1	Keterpaduan Perencanaan dan Kemitraan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasa n internal dan eksternal serta penegak hukum

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				600.1.13.2	Keterpaduan Pembiayaan dan Pelaksanaan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasa n internal dan eksternal serta penegak hukum
			600.1.14		Pengembangan Kawasan Permukiman			
				600.1.14.1	Perencanaan Teknis	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				600.1.14.2	Kawasan Permukiman Perkotaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				600.1.14.3	Kawasan Permukiman Pedesaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				600.1.14.4	Kawasan Permukiman Khusus	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				600.1.14.5	Kelembagaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			600.1.15		Pembinaan Penataan Bangunan			
				600.1.15.1	Perencanaan Teknis	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				600.1.15.2	Penataan Bangunan Gedung	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				600.1.15.3	Pengelolaan Rumah Negara	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				600.1.15.4	Penataan Bangunan dan Lingkungan Khusus	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				600.1.15.5	Kelembagaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			600.1.16		Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum			
				600.1.16.1	Perencanaan Teknis	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				600.1.16.2	Sistem Penyediaan Air Minum Perkotaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				600.1.16.3	Sistem Penyediaan Air Minum Pedesaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				600.1.16.4	Sistem Penyediaan Air Minum Khusus	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				600.1.16.5	Kelembagaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				600.1.16.6	Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				600.1.16.7	Pengelolaan Laboratorium dan Bengkel Kerja	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			600.1.17		Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman			
				600.1.17.1	Perencanaan Teknis	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				600.1.17.2	Pengelolaan Air Limbah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				600.1.17.3	Pengelolaan Persampahan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				600.1.17.4	Penyehatan Lingkungan Permukiman Khusus	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				600.1.17.5	Kelembagaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				600.1.17.6	Pengelolaan Laboratorium dan Bengkel Kerja	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			600.1.18		Pemantauan dan Evaluasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
		600.2			PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN			
			600.2.1		Kebijakan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			600.2.2		Perencanaan Pembiayaan Perumahan			
				600.2.2.1	Keterpaduan Perencanaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				600.2.2.2	Strategi Pembiayaan dan Analisa Pasar Perumahan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				600.2.2.3	Kemitraan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasa n internal dan eksternal serta penegak hukum
			600.2.3		Pola Pembiayaan Perumahan			
				600.2.3.1	Pola Pembiayaan Perumahan Rumah Umum	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				600.2.3.2	Pola Pembiayaan Perumahan Rumah Swadaya dan Mikro Perumahan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				600.2.3.3	Pola Investasi Perumahan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			600.2.4		Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan			
				600.2.4.1	Sumber Pembiayaan Primer	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				600.2.4.2	Sumber Pembiayaan Sekunder	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				600.2.4.3	Sumber Tabungan Perumahan dan Pembiayaan Lainnya	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				600.2.4.4	Sistem Pembiayaan Perumahan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				600.2.4.5	Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			600.2.5		Perencanaan Penyediaan Perumahan			

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				600.2.5.1	Keterpaduan Perencanaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				600.2.5.2	Analisa Teknik	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				600.2.5.3	Rencana Pengembangan Lingkungan Hunian	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				600.2.5.4	Kemitraan dan Kelembagaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			600.2.6		Penyediaan Rumah Susun			
				600.2.6.1	Perencanaan Teknik	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				600.2.6.2	Penyediaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				600.2.6.3	Penghunian, Pengalihan, dan Pemanfaatan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				600.2.6.4	Pengelolaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			600.2.7		Penyediaan Rumah Khusus			
				600.2.7.1	Perencanaan Teknik	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				600.2.7.2	Penyediaan dan Pengelolaan Rumah Tapak Khusus	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				600.2.7.3	Bimbingan teknis dan supervisi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				600.2.7.4	Penyelenggaraan Bantuan Rumah Swadaya	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				600.2.7.5	Perencanaan Teknik	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				600.2.7.6	Fasilitas Backlog Rumah Swadaya dan Rumah Tidak Layak Huni	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				600.2.7.7	Pelaksanaan Bantuan Simultan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			600.2.8		Penyediaan Rumah Umum dan Komersial			
				600.2.8.1	Perencanaan Teknik	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				600.2.8.2	Pemberian Bantuan Rumah Umum	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				600.2.8.3	Fasilitasi Hunian Berimbang	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				600.2.8.4	Fasilitasi Penyediaan Lahan Perumahan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			600.2.9		Investasi Infrastruktur			

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				600.2.9.1	Pelaksanaan Kebijakan Investasi Infrastruktur	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasa n internal dan eksternal serta penegak hukum
				600.2.9.2	Sinkronisasi Investasi Infrastruktur	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasa n internal dan eksternal serta penegak hukum
				600.2.9.3	Fasilitasi dan Mitigasi Risiko Investasi Infrastruktur	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				600.2.9.4	Pasar Infrastruktur	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			600.2.10		Penyelenggaraan Jasa Konstruksi			
				600.2.10.1	Sistem Penyelenggaraan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasa n internal dan eksternal
								serta penegak hukum
				600.2.10.2	Kontrak Konstruksi	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasa n internal dan eksternal serta penegak hukum
				600.2.10.3	Konstruksi Berkelanjutan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasa n internal dan eksternal serta penegak hukum

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				600.2.10.4	Manajemen Mutu	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			600.2.11		Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi			
				600.2.11.1	Kelembagaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				600.2.11.2	Material dan Peralatan Konstruksi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				600.2.11.3	Teknologi Konstruksi dan Produksi Dalam Negeri	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				600.2.11.4	Usaha Jasa Konstruksi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			600.2.12		Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi			
				600.2.12.1	Standar dan Materi Kompetensi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				600.2.12.2	Penerapan Kompetensi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				600.2.12.3	Pengembangan Profesi Jasa Konstruksi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				600.2.12.4	Pengembangan Produktivitas	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			600.2.13		Peningkatan Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi			

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				600.2.13.1	Peningkatan Kerjasama	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasa n internal dan eksternal serta penegak hukum
				600.2.13.2	Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasa n internal dan eksternal serta penegak hukum
			600.2.14		Peningkatan Jasa Konstruksi			
				600.2.14.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Rencana Kerja	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				600.2.14.2	Pelaksanaan Pengendalian Mutu	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			600.2.15		Penerapan Teknologi Konstruksi			
				600.2.15.1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Kerjasama Penerapan Teknologi Konstruksi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				600.2.15.2	Pengembangan Materi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				600.2.15.3	Pendayagunaan Material dan Peralatan Konstruksi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			600.2.16		Rencana Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Perumahan Rakyat (PUPR)			

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				600.2.16.1	Antar Sektor	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasa n internal dan eksternal serta penegak hukum
				600.2.16.2	Antar Wilayah	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasa n internal dan eksternal serta penegak hukum
			600.2.17		Pengembangan Kawasan Strategis			
				600.2.17.1	Keterpaduan Infrastruktur Kawasan Strategis	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasa n internal dan eksternal serta penegak hukum
				600.2.17.2	Pengembangan Infrastruktur Antarkawasan Strategis	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasa n internal dan eksternal serta penegak hukum
			600.2.18		Pengembangan Kawasan Perkotaan			
				600.2.18.1	Pengembangan Infrastruktur Kawasan Metropolitan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				600.2.18.2	Pengembangan Infrastruktur Kawasan Kota Besar dan Kota Baru	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				600.2.18.3	Pengembangan Infrastruktur Kawasan Kota Kecil dan Pedesaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				600.2.18.4	Analisa Manfaat dan Skema Pembiayaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				600.2.18.5	Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Infrastruktur Perumahan Rakyat (PUPR)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			600.2.19		Pemantauan dan Evaluasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
		600.3			TATA RUANG (TATA KOTA)			
			600.3.1		Kebijakan di bidang Tata Ruang yang dilakukan Pemerintahan Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			600.3.2		Perencanaan			
				600.3.2.1	Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RT/RW)	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasa n internal dan eksternal serta penegak hukum
				600.3.2.2	Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasa n internal dan eksternal serta penegak hukum
				600.3.2.3	Rencana Tata Ruang Strategis Kabupaten	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasa n internal dan eksternal serta penegak hukum

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				600.3.2.4	Rencana Tata Bangun Lingkungan (RTBL)	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasa n internal dan eksternal serta penegak hukum
				600.3.2.5	Rencana Pengembangan Sistem Sarana dan Prasarana Kabupaten	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasa n internal dan eksternal serta penegak hukum
				600.3.2.6	Rencana Teknis Prasarana Kota	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasa n internal dan eksternal serta penegak hukum
				600.3.2.7	Rencana Teknis Rencana Peremajaan dan Pengembangan Kotas Prasarana Kota	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasa n internal dan eksternal serta penegak hukum
			600.3.3		Pemanfaatan dan Pengendalian			
				600.3.3.1	Evaluasi dan Pengawasan Penata Ruang	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				600.3.3.2	Ijin Pemanfaatan Ruang	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				600.3.3.3	Pembatalan Ijin Pemanfaatan Ruang	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			600.3.4		Pemetaan			

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				600.3.4.1	Peta Dasar	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasa n internal dan eksternal serta penegak hukum
				600.3.4.2	Survey Pemetaan Ruang Darat	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasa n internal dan eksternal serta penegak hukum
				600.3.4.3	Survey Pemetaan Ruang Air	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasa n internal dan eksternal serta penegak hukum
				600.3.4.4	Survey Pemetaan Ruang Udara	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasa n internal dan eksternal serta penegak hukum
		600.4			LINGKUNGAN HIDUP			
			600.4.1		Kebijakan di bidang Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasa n internal dan eksternal serta penegak hukum
			600.4.2		Perencanaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup			

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				600.4.2.1	Inventarisasi, Penerapan ekoregion, dan rencana perlindungan dan pengelolaan Lingkungan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasa n internal dan eksternal serta penegak hukum
				600.4.2.2	Evaluasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasa n internal dan eksternal serta penegak hukum
			600.4.3		Penerapan Kebijakan Wilayah dan Sektor			
				600.4.3.1	Evaluasi Penerapan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				600.4.3.2	Perencanaan Lingkungan Hidup	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			600.4.4		Ekonomi Lingkungan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			600.4.5		Dampak Lingkungan			
				600.4.5.1	Bimtek Dampak Lingkungan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				600.4.5.2	Penerapan sistem kebijakan Dampak lingkungan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				600.4.5.3	Evaluasi dan Tindak Lanjut	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			600.4.6		Pemantauan dan Pengawasan			

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				600.4.6.1	Manufaktur Prasarana dan Jasa	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				600.4.6.2	Pertambangan Energi, Minyak dan Gas	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				600.4.6.3	Agro Industri dan Usaha Skala Kecil	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				600.4.6.4	Udara Sumber Bergerak	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			600.4.7		Evaluasi dan Pengembangan			
				600.4.7.1	Manufaktur, Prasarana, dan Jasa	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				600.4.7.2	Pertambangan Energi, Minyak dan Gas	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				600.4.7.3	Agro Industri dan Usaha Skala Kecil	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				600.4.7.4	Udara Sumber Bergerak	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			600.4.8		Keanekaragaman Hayati dan pengendalian Kerusakan Lahan			
				600.4.8.1	Pengembangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				600.4.8.2	Pemanfaatan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				600.4.8.3	Pengelolaan Sumber Daya Genetik	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				600.4.8.4	Keamanan Hayati	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				600.4.8.5	Pengendalian kerusakan Lahan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			600.4.9		Kerusakan Ekosistem Perairan Darat			
				600.4.9.1	Kerusakan Ekosistem	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				600.4.9.2	Rawa	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			600.4.10		Mitigasi dan pelestarian Fungsi Atmosfer			
				600.4.10.1	Perangkat mitigasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				600.4.10.2	Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				600.4.10.3	Pengendalian Bahan Perusak Ozon	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				600.4.10.4	Pengendalian Kerusakan Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			600.4.11		Adaptasi Perubahan Iklim			

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				600.4.11.1	Perangkat Adaptasi Perubahan Iklim antara lain: Pengembangan perangkat Adaptasi Perubahan Iklim, Pemantauan dan Evaluasi Adaptasi Perusahaan Iklim	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				600.4.11.2	Kerentanan Perubahan Iklim	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			600.4.12		Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun			
				600.4.12.1	Registrasi dan Notifikasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				600.4.12.2	Pemantauan Bahan Berbahaya dan Beracun	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				600.4.12.3	Evaluasi dan Tindak Lanjut	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			600.4.13		Verifikasi Pengelolaan Limbah bahan Berbahaya dan beracun			
				600.4.13.1	Pengumpulan dan pemanfaatan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				600.4.13.2	Pengangkutan dan Pengolahan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				600.4.13.3	Penimbunan dan Dumping	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				600.4.13.4	Notifikasi dan Rekomendasi Limbah Lintas batas	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			600.4.14		Pengelolaan Limbah B3 dan Pemulihan Kontaminasi Limbah B3			
				600.4.14.1	Pemantauan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				600.4.14.2	Tanggap darurat dan pemelihan Kontaminasi	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasa n internal dan eksternal serta penegak hukum
			600.4.15		Pengelolaan Sampah			
				600.4.15.1	Pembatasan sampah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				600.4.15.2	Daur Ulang dan Pemanfaatan Sampah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				600.4.15.3	Pembentukan Dewan Adipura	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				600.4.15.4	Penetapan pemenang adipura	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			600.4.16		Hukum Administrasi Lingkungan			
				600.4.16.1	Pengelolaan dan pengembangan pengaduan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				600.4.16.2	Penataan hukum administrasi lingkungan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasa n internal dan eksternal serta penegak hukum
			600.4.17		Penyelesaian Sengketa Lingkungan			
				600.4.17.1	Penyelesaian sengketa Melalui Pengadilan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasa n internal dan eksternal serta penegak hukum
				600.4.17.2	Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasa n internal
								dan eksternal serta penegak hukum
			600.4.18		Penegakan hukum pidana lingkungan			
				600.4.18.1	Penyidikan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				600.4.18.2	Koordinasi penuntutan, evaluasi, dan tindak lanjut	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				600.4.18.3	Koordinasi pembinaan penyidik PNS	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			600.4.19		Komunikasi Lingkungan			
				600.4.19.1	Pengembangan Komunikasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				600.4.19.2	Publikasi dan Kampanye	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			600.4.20		Penguatan Inisiatif Masyarakat			
				600.4.20.1	Komunitas Pendidikan Lingkungan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				600.4.20.2	Kearifan Lingkungan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			600.4.21		Peningkatan Peran Masyarakat			
				600.4.21.1	Masyarakat Perkotaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				600.4.21.2	Masyarakat Pedesaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			600.4.22		Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan			
				600.4.22.1	Organisasi Sosial Masyarakat	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				600.4.22.2	Organisasi Profesi Dunia Usaha	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			600.4.23		Data dan Informasi Lingkungan			
				600.4.23.1	Pengelolaan Data	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				600.4.23.2	Pengelolaan Informasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				600.4.23.3	Pengembangan Perangkat Lunak	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				600.4.23.4	Pengembangan Sistem dan Layanan Jaringan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			600.4.24		Kelembagaan Lingkungan			
				600.4.24.1	Kelembagaan dan Tata Laksana	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				600.4.24.2	Fasilitasi Standar Pelayanan Minimal	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			600.4.25		Standarisasi dan teknologi			
				600.4.25.1	Standarisasi Manajemen dan dan Pengujian Lingkungan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				600.4.25.2	Standarisasi Kompetensi Keahlian dan Lembaga Penyedia Jasa Lingkungan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				600.4.25.3	Teknologi Ramah Lingkungan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			600.4.26		Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan			
				600.4.26.1	Pemantauan dan Kajian Kualitas Lingkungan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				600.4.26.2	Laboratorium Rujukan dan Pengujian	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
	700				PENGAWASAN			
		700.1			PENGAWASAN INTERNAL			
			700.1.1		Rencana Pengawasan			

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				700.1.1.1	Rencana Strategis Pengawasan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasan internal dan eksternal serta penegak hukum
				700.1.1.2	Rencana Kerja Pengawas Tahunan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasan internal dan eksternal serta penegak hukum
				700.1.1.3	Rencana Kinerja Tahunan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasan internal dan eksternal serta penegak hukum
				700.1.1.4	Rencana dan Penetapan Kinerja Tahunan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasan internal dan eksternal serta penegak hukum
				700.1.1.5	Rakor Pengawasan Tingkat Daerah	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasan internal dan eksternal serta penegak hukum
			700.1.2		Pelaksanaan Pengawasan			

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				700.1.2.1	Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI) yang memerlukan tindak lanjut (TL)	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasan internal dan eksternal serta penegak hukum
				700.1.2.2	Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan memerlukan tindak lanjut	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasan internal dan eksternal serta penegak hukum
				700.1.2.3	Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan tidak memerlukan tindak lanjut	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasan internal dan eksternal serta penegak hukum
				700.1.2.4	Laporan Perkembangan Penanganan Surat Pengaduan Masyarakat	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasan internal dan eksternal
								serta penegak hukum
				700.1.2.5	Laporan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Temuan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasan internal dan eksternal serta penegak hukum

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				700.1.2.6	Laporan Perkembangan Barang Milik Negara	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasan internal dan eksternal serta penegak hukum
				700.1.2.7	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				700.1.2.8	Laporan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan Review	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				700.1.2.9	Good Corporate Governance (GCG)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
	800				KEPEGAWAIAN			
		800.1			SUMBER DAYA MANUSIA			
			800.1.1		Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara			
				800.1.1.1	Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara Antara lain: Bahan penyusunan rencana kebutuhan, Analisis Kebutuhan, Pengolahan data kebutuhan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				800.1.1.2	Perencanaan Pertimbangan Formasi Antara lain: Pertimbangan teknis penetapan formasi ASN, Pertimbangan teknis penetapan formasi ikatan dinas	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				800.1.1.3	Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				800.1.1.4	Standarisasi Jabatan Antara lain: Informasi Jabatan, Kompetensi Jabatan, Klasifikasi Jabatan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			800.1.2		Formasi dan Pengadaan Pegawai			
				800.1.2.1	Formasi ASN Antara lain: Usulan formasi, Usulan permintaan formasi kepada Menpan RB dan Kepala BKN, Persetujuan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
					Formasi, Penetapan Formasi, Penetapan Formasi Khusus			
				800.1.2.2	Proses Rekrutmen/Pengadaan ASN Antara lain: Proses Rekrutmen ASN, Penetapan Pengumuman Kelulusan ASN	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasan internal dan eksternal serta penegak hukum
				800.1.2.3	Pengumuman Kelulusan ASN	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				800.1.2.4	Berkas Lamaran Yang Tidak Diterima	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				800.1.2.5	Pengangkatan ASN	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				800.1.2.6	Open Biding (Seleksi Terbuka Jabatan)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				800.1.2.7	Pengelolaan Sistem Rekrutmen ASN	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				800.1.2.8	Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi ASN	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			800.1.3		Mutasi Pegawai			
				800.1.3.1	Usulan Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan, Dipekerjakan, Penugasan Sementara, Mutasi antar Perwakilan, Mutasi ke dan dari Perwakilan, Pemindahan Sementara, Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasan internal dan eksternal serta penegak hukum
				800.1.3.2	Kenaikan Pangkat/Golongan/Jabatan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasan internal dan eksternal serta penegak hukum
				800.1.3.3	Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Struktural/Fungsional	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasan internal dan eksternal serta penegak hukum
				800.1.3.4	Perubahan Data Dasar/ Status/Kedudukan Hukum Pegawai	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasan internal dan eksternal serta penegak hukum
				800.1.3.5	Peninjauan Masa Kerja	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasan internal dan eksternal serta penegak hukum

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				800.1.3.6	Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (BAPERJAKAT)	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasan internal dan eksternal serta penegak hukum
			800.1.4		Pengembangan Karir			
				800.1.4.1	Usulan Tugas Belajar/ Ijin Belajar/ Diklat/ Kursus/ Magang/ Ujian Dinas/ Praktek Kerja di Instansi lain/ Pertukaran antar ASN dengan pegawai swasta	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasan internal dan eksternal serta penegak hukum
				800.1.4.2	Penyesuaian ijazah	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasan internal dan eksternal serta penegak hukum
				800.1.4.3	Penyusunan Sistem Karier	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasan internal dan eksternal serta penegak hukum
				800.1.4.4	Standar Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasan internal dan eksternal serta penegak hukum
				800.1.4.5	Angka Kredit Antara lain: Pengajuan Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit, Penilaian Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasan internal dan eksternal serta penegak hukum
			800.1.5		Kinerja Aparatur Sipil Negara			

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				800.1.5.1	Hasil Penilaian Kinerja dan Standar Kerja	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasan internal dan eksternal serta penegak hukum
				800.1.5.2	Pengelolaan Database dan Analisis Sistem Informasi Kinerja	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasan internal dan eksternal serta penegak hukum
				800.1.5.3	Evaluasi dan Pemantauan Penilaian Kinerja dan Standar Kinerja	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasan internal dan eksternal serta penegak hukum
			800.1.6		Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN			
				800.1.6.1	Kode Etik Pegawai	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasan internal dan eksternal serta penegak hukum
				800.1.6.2	Disiplin			
				800.1.6.3	Pemberhentian Dengan Hormat	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasan internal dan eksternal serta penegak hukum

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				800.1.6.4	Pemberhentian Dengan Tidak Hormat	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasan internal dan eksternal serta penegak hukum
				800.1.6.5	Pemberhentian Sementara	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasan internal dan eksternal serta penegak hukum
				800.1.6.6	Pensiun ASN Antara lain: Administrasi Pensiun ASN, Penetapan Pensiun ASN, Penetapan Pertimbangan Teknis Pensiun ASN, Pensiun Pejabat Negara dan Janda/ Dudanya	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasan internal dan eksternal serta penegak hukum
			800.1.7		Bantuan Hukum	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasan internal dan eksternal serta penegak hukum
			800.1.8		Status dan Kedudukan Pegawai			
				800.1.8.1	Status Kepegawaian	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasan internal dan eksternal serta penegak hukum
				800.1.8.2	Kedudukan Kepegawaian	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasan internal dan eksternal serta penegak hukum

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				800.1.8.3	Keberatan Pegawai	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasan internal dan eksternal serta penegak hukum
				800.1.8.4	Perselisihan/Sengketa Kepegawaian	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasan internal dan eksternal serta penegak hukum
			800.1.9		Sistem Informasi Kepegawaian			
				800.1.9.1	Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasan internal dan eksternal serta penegak hukum
				800.1.9.2	Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasan internal dan eksternal serta penegak hukum
				800.1.9.3	Pengembangan Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Elektronik	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasan internal dan eksternal serta penegak hukum
				800.1.9.4	Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Fisik	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasan internal dan eksternal serta penegak hukum
			800.1.10		Pengawasan dan pengendalian			

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				800.1.10.1	Formasi, Pengadaan dan Pasca Diklat	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasan internal dan eksternal serta penegak hukum
				800.1.10.2	Kepangkatan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Dalam Jabatan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasan internal dan eksternal serta penegak hukum
				800.1.10.3	Gaji dan Tunjangan, Kesejahteraan dan Kinerja	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasan internal dan eksternal serta penegak hukum
				800.1.10.4	Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasan internal dan eksternal serta penegak hukum
				800.1.10.5	Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasan internal dan eksternal serta penegak hukum
				800.1.10.6	Sanggahan terhadap Permasalahan Tenaga Honorer	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasan internal dan eksternal serta penegak hukum
			800.1.11		Administrasi Pegawai			

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				800.1.11.1	Surat Perintah Dinas/Surat Tugas	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasan internal dan eksternal serta penegak hukum
				800.1.11.2	Cuti Sakit	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasan internal dan eksternal serta penegak hukum
				800.1.11.3	Cuti Bersalin	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasan internal dan eksternal serta penegak hukum
				800.1.11.4	Cuti Tahunan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasan internal dan eksternal serta penegak hukum
				800.1.11.5	Cuti Alasan Penting	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasan internal dan eksternal serta penegak hukum
				800.1.11.6	Cuti Besar	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasan internal dan eksternal serta penegak hukum

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				800.1.11.7	Cuti Di luar Tanggungan Negara	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasan internal dan eksternal serta penegak hukum
				800.1.11.8	Karpeg/KPE/Karis/Karsu	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasan internal dan eksternal serta penegak hukum
				800.1.11.9	Keanggotaan Organisasi Profesi/ Kedinasan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasan internal dan eksternal serta penegak hukum
				800.1.11.10	Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P)	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasan internal dan eksternal serta penegak hukum
				800.1.11.11	Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4)	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasan internal dan eksternal serta penegak hukum
				800.1.11.12	Daftar Urut Kepangkatan (DUK)	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasan internal dan eksternal serta penegak hukum

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				800.1.11.13	Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala, Mutasi Gaji/ tunjangan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasan internal dan eksternal serta penegak hukum
			800.1.12		Kesejahteraan Pegawai			
				800.1.12.1	Pemeliharaan Kesehatan Pegawai	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				800.1.12.2	Asuransi Pegawai/BPJS	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				800.1.12.3	Tabungan Perumahan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				800.1.12.4	Bantuan Sosial	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				800.1.12.5	Pakaian Dinas	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				800.1.12.6	Layanan Pegawai yang Meninggal Karena Dinas	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				800.1.12.7	Pemberian Tali Kasih	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				800.1.12.8	Pemberian Piagam Penghargaan dan Tanda Jasa	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				800.1.12.9	Olahraga dan Rekreasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				800.1.12.10	Rekam Medis	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasan internal dan eksternal serta penegak hukum
			800.1.13		Administrasi Perseorangan			
				800.1.13.1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasan internal dan eksternal serta penegak hukum
				800.1.13.2	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasan internal dan eksternal serta penegak hukum
				800.1.13.3	Pejabat Negara dan pejabat lainnya yang disetarakan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasan internal dan eksternal serta penegak hukum
				800.1.13.4	Sekretaris Daerah	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasan internal dan eksternal serta penegak hukum
				800.1.13.5	ASN berjasa/terlibat dalam peristiwa berskala nasional	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasan internal dan eksternal serta penegak hukum
			800.1.14		Penilaian Kompetensi			

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				800.1.14.1	Penilaian Kompetensi	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasan internal dan eksternal serta penegak hukum
				800.1.14.2	Hasil Penilaian Kompetensi	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasan internal dan eksternal serta penegak hukum
		800.2			PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
			800.2.1		Kebijakan di bidang Pendidikan dan Pelatihan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			800.2.2		Pendidikan dan Pelatihan			
				800.2.2.1	Sistem Informasi program dan pembinaan diklat	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				800.2.2.2	Pedoman-pedoman kediklatan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				800.2.2.3	Kurikulum-kurikulum diklat	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				800.2.2.4	Modul-modul diklat	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				800.2.2.5	Panduan fasilitator	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				800.2.2.6	Saran/rekomendasi penyelenggaraan diklat	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				800.2.2.7	Notulen sosialisasi/Rapat Koordinasi Kebijakan Diklat	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				800.2.2.8	Monitoring dan evaluasi program dan pembinaan diklat	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				800.2.2.9	Konsultasi, advokasi, asistensi diklat	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			800.2.3		Widyaiswara			
				800.2.3.1	Seleksi dan pengembangan Widyaiswara	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				800.2.3.2	Sertifikasi Widyaiswara	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				800.2.3.3	Monitoring dan evaluasi Widyaiswara	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				800.2.3.4	Penilaian Widyaiswara	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				800.2.3.5	Konsultasi, advokasi dan asistensi Widyaiswara	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				800.2.3.6	Sistem Informasi Pembinaan Widyaiswara	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			800.2.4		Penyelenggaraan Diklat			

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				800.2.4.1	Perencanaan; peserta, pengajar, penjadwalan Penyelenggaraan Diklat	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				800.2.4.2	Penyelenggaraan Penyelenggaraan Diklat	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				800.2.4.3	Konsultasi, advokasi, asistensi penyelenggaraan diklat	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				800.2.4.4	Pengembangan bahan ajar dan metodologi pembelajaran	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				800.2.4.5	Sistem informasi diklat	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				800.2.4.6	Monitoring Penyelenggara Diklat	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				800.2.4.7	Monitoring dan evaluasi Pasca diklat	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			800.2.5		Alumni	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
	900				KEUANGAN			
		900.1			KEUANGAN DAERAH			
			900.1.1		Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P)			
				900.1.1.1	Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran (PPA)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				900.1.1.2	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKASKPD)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				900.1.1.3	Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				900.1.1.4	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			900.1.2		Penyusunan Anggaran			
				900.1.2.1	Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) kecamatan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				900.1.2.2	Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kota	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				900.1.2.3	Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RDPA) SKPD yang telah disetujui Sekretaris Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				900.1.2.4	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang telah disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			900.1.3		Pelaksanaan Anggaran			
				900.1.3.1	Surat Penyedia Dana (SPP, SPM dan SP2D): UP, GU, TU, LS	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				900.1.3.2	Pendapatan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				900.1.3.3	Belanja	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				900.1.3.4	Pembiayaan Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				900.1.3.5	Dokumen Penatausahaan Keuangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				900.1.3.6	Pertanggungjawaban Pengguna Dana	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
					pertanggung jawaban APBD disahkan			
				900.1.3.7	Daftar Gaji	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				900.1.3.8	Kartu Gaji	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				900.1.3.9	Data Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				900.1.3.10	Laporan Keuangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			900.1.4		Pinjaman/Hibah Luar Negeri			
				900.1.4.1	Permohonan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (Blue Book)	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasan internal dan eksternal serta penegak hukum

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				900.1.4.2	Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membiayai (Green Book)	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasan internal dan eksternal serta penegak hukum
				900.1.4.3	Dokumen Memorandum of Understanding (MoU), dan dokumen sejenisnya	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasan internal dan eksternal serta penegak hukum
				900.1.4.4	Dokumen Loan Agreement (PHLN) Antara lain: Draft Agreement, Legal Opinion, Surat Menyurat dengan Lender	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasan internal dan eksternal serta penegak hukum
				900.1.4.5	Alokasi dan Relokasi Pengguna Dana Luar Negeri, antara lain: usulan luncuran dana	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasan internal dan eksternal serta penegak hukum
				900.1.4.6	Aplikasi Penarikan Dana BLN berikut lampirannya	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasan internal dan eksternal serta penegak hukum
				900.1.4.7	Dokumen Otorisasi Penarikan Dana (Payment Advice)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				900.1.4.8	Dokumen Realisasi Pencairan Dana Bantuan Luar Negeri, yaitu: Surat Perintah Pencairan Dana, SPM beserta lampirannya, a.l.: SPP, Kontrak, BA, dan data pendukung lainnya.	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				900.1.4.9	Replenishment (Permintaan Penarikan Dana dari Negara Donor) meliputi antara lain: No Objection Letter (NOL), Project Implementation, Notification of Contract, Withdrawal Authorization (WA).	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasan internal dan eksternal serta penegak hukum
				900.1.4.10	Staff Appraisal Report	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasan internal dan eksternal serta penegak hukum
				900.1.4.11	Report /Laporan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasan internal dan eksternal serta penegak hukum
				900.1.4.12	Laporan Hutang Daerah	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasan internal dan eksternal serta penegak hukum

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				900.1.4.13	Completion Report/Annual Report	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasan internal dan eksternal serta penegak hukum
				900.1.4.14	Ketentuan/Peraturan yang menyangkut Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasan internal dan eksternal serta penegak hukum
			900.1.5		Pengelolaan APBD/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN)	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasan internal dan eksternal serta penegak hukum
			900.1.6		Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)			
				900.1.6.1	Manual Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasan internal dan
								eksternal serta penegak hukum
				900.1.6.2	Dokumen Kebijakan Akuntansi	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasan internal dan eksternal serta penegak hukum
				900.1.6.3	Arsip Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				900.1.6.4	Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Bulanan /Triwulanan /Semesteran	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			900.1.7		Penyaluran Anggaran Tugas Pembantuan			
				900.1.7.1	Surat Penetapan Pemimpin Proyek/Bagian Proyek, Bendahara, atas Pengguna Anggaran Kegiatan Pembantuan, termasuk Specimen Tanda Tangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				900.1.7.2	Berkas Permintaan Pembayaran (SPP) dan lampirannya: SPP-SPP- Daftar Perincian Pengguna SPPR-SPDR-L, SPM-LS, SPM-DU, bilyet giro, SPM Nihil, Penagihan/Invoice, Faktur Pajak, Bukti Penerimaan Kas/Bank beserta Bukti Pendukungnya a.l.: Copy Faktur Pajak dan Nota Kredit Bank, Permintaan Pelayanan Jasa/Service Report dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				900.1.7.3	Buku Rekening Bank	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				900.1.7.4	Keputusan Pembukuan Rekening	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				900.1.7.5	Pembukuan anggaran terdiri antara lain: Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu, Register dan Buku Tambahan, Daftar Pembukuan Pencairan/Pengeluaran (DPP), Daftar Himpunan Pencairan (DHP), dan Rekening Koran	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			900.1.8		Penerimaan Anggaran Tugas Pembantuan			
				900.1.8.1	Berkas Penerimaan Keuangan Pelaksanaan dan Tugas Pembantuan termasuk Dana Sisa atau Pengeluaran lainnya	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				900.1.8.2	Berkas Penerimaan Pajak termasuk PPh 21, PPh 22, PPh 23	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			900.1.9		Penyusunan Anggaran Pilkada dan Biaya Bantuan Pemilu Dari APBD meliputi: Kebijakan Keuangan Pilkada dan Penyusunan Anggaran Bantuan Pemilu, Peraturan/Pedoman/Standar Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Operasional dan Kontingensi untuk Biaya Pilkada dan Bantuan Pemilu, Bahan Usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Pilkada KPUD dan Panwasda Kota, PPK, PPS, KPPS dan Permohonan Pengajuan RKA KPUD dan Panwas, Berkas Pembahasan RKA Pilkada dan Bantuan Pemilu, Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Pilkada dan Bantuan Pemilu Kota, Dokumen Rancangan Anggaran Satuan Kerja (DRASK) Pilkada KPUD dan Panwas Kota dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD, Berkas Pembentukan Dana Cadangan Pilkada, Bahan Rapat	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			900.1.10		Pelaksanaan Anggaran PILKADA dan Anggaran Biaya Bantuan Pemilu			
				900.1.10.1	Berkas Penetapan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara KPUD, Bendahara Panwasda dan Bendahara pada Panitia Pilkada dan Pemilu	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				900.1.10.2	Berkas Penerimaan Komisi, Rabat Pembayaran Pengadaan Jasa, Bunga, Pelaksanaan Pilkada/Pemilu	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				900.1.10.3	Berkas setor sisa dana Pilkada/Pemilu termasuk setor komisi pengadaan barang/jasa, rabat, bunga, jasa giro Berkas Penyaluran Biaya Pemilu termasuk diantaranya Bukti Transfer Bank	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				900.1.10.4	Pedoman Dokumen Penyediaan Pembiayaan Kegiatan Operasional (PPKO) Pemilu termasuk Perubahan/Pergeseran/Revisin ya	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			900.1.11		Pemeriksaan/Pengawasan Keuangan Daerah			
				900.1.11.1	Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasan internal dan eksternal serta penegak hukum
				900.1.11.2	Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Internal	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasan internal dan eksternal serta penegak hukum

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				900.1.11.3	Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasan internal dan eksternal serta penegak hukum
				900.1.11.4	Dokumen Penyelesaian Kerugian Daerah	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan pengawasan internal dan eksternal serta penegak hukum
			900.1.12		Anggaran Daerah			
				900.1.12.1	Anggaran Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				900.1.12.2	Dukungan Teknis Anggaran Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			900.1.13		Pendapatan dan Investasi Daerah			

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				900.1.13.1	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Antara lain: fasilitasi pelaksanaan kebijakan standardisasi pajak daerah dan retribusi daerah, penyiapan bahan perumusan bimbingan teknis pajak daerah dan retribusi daerah, penyiapan bahan perumusan analisis dan evaluasi, pemantauan pajak daerah dan retribusi daerah, penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi pemberian insentif pajak daerah dan retribusi daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				900.1.13.2	Badan Usaha Milik Daerah Antara lain: fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang usaha milik daerah lembaga keuangan, fasilitas serta bimbingan teknis di bidang badan usaha milik daerah lembaga non keuangan, penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi badan usaha milik daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				900.1.13.3	Badan Layanan Umum Daerah Antara lain: analisis, standardisasi teknis, fasilitasi serta bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, Pembinaan pelaksanaan kebijakan, standardisasi teknis, prosedur dan kriteria, fasilitasi serta bimbingan teknis penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
					umum daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah			
				900.1.13.4	Pengelolaan Kekayaan Daerah Antara lain: fasilitasi serta bimbingan teknis pengelolaan kekayaan, Fasilitasi serta bimbingan teknis investasi daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan kekayaan dan investasi daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				900.1.13.5	Pinjam Dan Obligasi Daerah Antara lain: fasilitasi pelaksanaan kebijakan pinjaman dan hibah kepada pemerintah daerah dan/atau badan usaha milik daerah, Fasilitasi pelaksanaan kebijakan obligasi daerah, Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dana bergulir yang bersumber dari APBN, Bimbingan teknis obligasi daerah, dana bergulir serta penyertaan modal daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pinjaman dan hibah, obligasi daerah, dan dana bergulir, dan penyertaan modal daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			900.1.14		Fasilitasi Dana Perimbangan			
				900.1.14.1	Fasilitasi Dana Alokasi Umum Antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar penghitungan, dan rekonsiliasi dana alokasi umum, Sosialisasi dan supervisi dana alokasi umum, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana alokasi umum	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				900.1.14.2	Fasilitasi Dana Alokasi Khusus Antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar, Sosialisasi dan supervisi dana alokasi khusus, penyiapan pelaksanaan monitoring, evaluasi dana alokasi khusus, Penyiapan pelaksanaan monitoring, evaluasi dana alokasi khusus	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				900.1.14.3	Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam Antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar perhitungan, dan rekonsiliasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam, Sosialisasi dan supervisi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				900.1.14.4	Dana Otonomi Khusus dan Dana Transfer Lainnya Antara lain: Sosialisasi dan supervisi dana otonomi khusus, Sosialisasi dan supervisi dan transfer lainnya, Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan otonomi khusus dan dana transfer lainnya	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				900.1.14.5	Dukungan Teknis Fasilitasi Dana Perimbangan Antara lain: Penyiapan sinkronisasi kebijakan dan perimbangan, Penyiapan dukungan teknis dana perimbangan, Penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan dana perimbangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
			900.1.15		Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah			
				900.1.15.1	Akuntansi Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				900.1.15.2	Pembinaan Kinerja dan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah Antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan kinerja dan kapasitas pengelolaan keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

NO	KODE KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DA		
	P	S	T	K	URAIAN KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				900.1.15.3	Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah Antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				900.1.15.4	Kajian Kebijakan dan Bantuan Keterangan Ahli Antara lain: Penyiapan bahan bantuan keterangan ahli di bidang keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal
				900.1.15.5	Data Informasi dan Pengelolaan Keuangan Daerah Antara lain: Penyiapan sinkronisasi kebijakan pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, Penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, Pengelolaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapaun	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorang an, lembaga dan negara.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggun ya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah an.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh pihak	Unit pengolah terkait
yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait
Pengguna internal dan eksternal	Unit Pengolah Terkait
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan	Unit pengolah terkait
tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan	Unit pengolah terkait
tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional dan/ketertiban umum	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional dan/ketertiban umum	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional dan/ketertiban umum	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional dan/ketertiban umum	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional dan/ketertiban umum	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional dan/ketertiban umum	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional dan/ketertiban umum	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional dan/ketertiban umum	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional dan/ketertiban umum	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional dan/ketertiban umum	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait.

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak	Unit pengolah terkait
berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi <u>lembaga pemerintahan</u> .	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya	Unit Pengolah Terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya	Unit pengolah terkait
pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional dan/ketertiban umum	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait Unit
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait Unit
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait Unit
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait Unit
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait Unit
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait Unit
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait Unit
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait Unit

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait Unit
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait Unit
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait Unit
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait Unit
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait Unit
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait Unit
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait Unit
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait Unit
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait Unit
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait Unit
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait Unit
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait Unit

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait Unit
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait Unit
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait Unit
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait Unit
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait Unit
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait Unit
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait Unit
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait Unit
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait Unit
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait Unit
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait Unit

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait Unit
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait Unit
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait Unit
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi <u>lembaga pemerintahan</u>	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi <u>lembaga pemerintahan</u>	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi <u>lembaga pemerintahan</u>	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi <u>lembaga pemerintahan</u>	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat	Unit pengolah terkait
mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat	Unit pengolah terkait
mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat	Unit pengolah terkait
mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Tergantung pada jenis arsip yang lebih spesifik	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait Unit
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait Unit
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Karena memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas OPD	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya	Unit pengolah terkait
pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait Unit
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait Unit
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait Unit
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait Unit

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait Unit
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait Unit
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait Unit
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait Unit
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait Unit

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait Unit
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait Unit
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait Unit
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait Unit
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait Unit
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat	Unit pengolah terkait Unit
mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Inspektorat
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Inspektorat
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Inspektorat
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Inspektorat
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Inspektorat

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Inspektorat
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Inspektorat
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Inspektorat
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Inspektorat
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait Unit
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait Unit
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait Unit

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait Unit
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait Unit
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait Unit
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat	Unit pengolah terkait Unit
mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait Unit
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait Unit

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait Unit
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait Unit

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait Unit
Apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait Unit
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
Apabila diketahui publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

N AKSES ARSIP DINAMIS

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	11

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

MUSA AHMAD